

Budaya Kerja Pegawai Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Oleh
Adeleida S. Mongan¹
Dr. Drs. Willy F. Pesoth. MS²
Dr. Drs. Agustinus B. Pati. M.Si³

Abstract

Employees in carrying out its duties and functions not in accordance with the vision, mission, goals and objectives of the work as a reflection of the application of the basic values of work culture as the State apparatus. This research was conducted with the aim of analyzing the culture of employees working at the General Secretariat of the Regional Bureau of North Sulawesi into the design used is qualitative .

This study concludes that the work culture in the agency has not fully unite the way of thinking , behaving and acting employees who look at the work discipline, openness, mutual respect and cooperation. By her need to make adjustments to the work culture of the organization working with the leader become exemplary in every execution of tasks that can be manifested in attitudes and behavior on a daily basi .

Keywords : Work Culture, Employees, Public Organization.

PENDAHULUAN

Sampai saat ini aparat birokrasi pemerintah belum sepenuhnya melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dibebankan kepadanya berdasarkan norma-norma yang ditetapkan dan di harapkan oleh masyarakat. Kondisi ini dapat dilihat melalui berbagai penyimpangan yang terjadi semakin lama semakin parah dan berakibat pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun.

Pendapat sementara orang bahwa rendahnya kinerja pegawai organisasi publik/pemerintah di indikasikan dengan budaya kerja lambat, birokratis, malas, sering terlambat masuk kantor, pulang sebelum selesai jam kerja, suka menunda pekerjaan. Sementara itu, waktu luang dikantor diisi dengan ngobrol, main catur, main *game* di komputer, main kartu remi atau domino dan lain-lain telah menjadi

¹ Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

² Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

³ Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

pemandangan umum di kantor - kantor pemerintah. Situasi yang demikian inilah sebagai gambaran budaya kerja yang tidak mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.

Biro umum merupakan salah satu dari Sembilan biro pada Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Utara di bawah komando Asisten Administrasi Umum bersama Biro Organisasi & Kepegawaian, dan Biro Perlengkapan. Biro Umum ini terdiri dari lima bagian dan delapan belas sub bagian. Di lihat dari tugas dan fungsinya, biro ini tergolong sibuk dibandingkan tiga biro lainnya dibawah asisten administrasi Umum. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan, Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya belum sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Setda Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini ditunjukkan oleh kurangnya disiplin, konsistensi dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Para pegawai belum memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi, serta rendahnya semangat dan motivasi kerja pegawai. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sikap dan perilaku pegawai pada Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Utara belum didasarkan pada nilai-nilai dasar budaya kerja sebagai aparatur Negara. Padahal, nilai-nilai dasar budaya kerja tersebut sangat penting dan menentukan dalam mewujudkan visi dan misi Setda Provinsi Sulawesi Utara.

Budaya Kerja merupakan falsafah dasar yang didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Budaya kerja pegawai memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga perilaku pegawai yang ada agar dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang.

Budaya kerja itu tidak akan muncul begitu saja, akan tetapi harus diupayakan dengan sungguh – sungguh melalui suatu proses yang terkendali dengan melibatkan semua SDM dalam seperangkat system, alat – alat dan teknik – teknik pendukung. Budaya kerja merupakan sarana untuk merubah cara kerja

lama menjadi cara kerja baru yang akan berorientasi untuk memuaskan pelanggan atau masyarakat. Pelaksanaan budaya kerja aparatur Negara dengan nilai-nilai yang seharusnya merupakan langkah awal yang sebaiknya dipilih dalam upaya melakukan Reformasi birokrasi secara keseluruhan, sehingga dapat menjadi birokrasi yang efisien dan efektif dengan aparatur yang bersih, transparan, dan professional dalam menjalankan tugasnya.

Bertitik tolak dari fenomena masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : bagaimana budaya kerja pegawai pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara ? yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis budaya kerja pegawai pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik keilmuan terhadap pengembangan ilmu di bidang manajemen sumberdaya manusia pada umumnya, dan secara khusus dalam budaya kerja pegawai dan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk menciptakan budaya kerja pegawai yang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Budaya secara etimologis berasal dari kata budhi (akal) sehingga dikembangkan menjadi budi-daya, yaitu kemampuan akal budi seseorang ataupun kelompok manusia. Ndraha (1997) dalam bukunya Budaya Organisasi mengemukakan pendapat Edward Burnett, Vijay Sathe, dan Edgar H. Schein tentang budaya. Burnett mengatakan bahwa budaya mempunyai pengertian teknografis yang luas meliputi ilmu pengetahuan, keyakinan/percaya, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan berbagai kemampuan dan kebiasaan lainnya yang didapat sebagai anggota masyarakat.

Sementara itu, Sathe dalam Ndraha (1997) mengartikan budaya sebagai seperangkat asumsi penting yang dimiliki bersama anggota masyarakat. Slocum dalam West (2000:128) mendefinisikan budaya sebagai asumsi-asumsi dan pola-

pola makna yang mendasar, yang dianggap sudah selayaknya dianut dan dimanifestasikan oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam organisasi. Budaya diartikan juga sebagai seperangkat perilaku, perasaan dan kerangka psikologis yang terinternalisasi sangat mendalam dan dimiliki bersama oleh anggota masyarakat (Osbon dan Plastrik, 2000:252).

Pengertian diatas memberikan makna bahwa budaya merupakan perilaku konvensional masyarakat dan ia mempengaruhi semua tindakan meskipun sebagian besar tidak di sadarkannya. Budaya memberikan stabilitas dan jaminan, karena dapat memahami hal-hal yang sedang terjadi dalam masyarakat dan mengetahui cara menanggapi. Sebagai contoh dapat dilihat apabila seorang pegawai pindah ke tempat kerja yang lain. Dalam lingkungan yang baru pegawai dituntut untuk belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapi untuk menghindari kemungkinan akan terjadi konsekuensi negatif.

Birokrasi sebagaimana organisasi yang lain tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan budaya. Dalam aktivitasnya juga terlibat secara insentif melalui pola-pola interaksi yang terbentuk di dalamnya dengan sistem nilai dan budaya lokal. Budaya birokrasi yang berkembang di suatu daerah tertentu misalnya, tidak dapat dilepaskan dari pola budaya lingkungan sosial yang melingkupinya. Sehubungan dengan itu, Dwiyanto (2002) mengemukakan bahwa budaya birokrasi dapat digambarkan sebagai sebuah sistem atau seperangkat nilai yang memiliki simbol, orientasi nilai, keyakinan, pengetahuan dan pengalaman kehidupan yang terinternalisasi ke dalam pikiran. Seperangkat nilai tersebut diaktualisasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh setiap anggota dari sebuah organisasi birokrasi selalu bersinggungan dengan aspek budaya masyarakat setempat.

Budaya kerja adalah keseluruhan kepercayaan (*beliefs*) dan nilai-nilai (*values*) yang tumbuh dan berkembang dalam suatu organisasi, menjadi dasar cara berpikir, berperilaku dan bertindak dari seluruh individu organisasi, dan diturunkan dari satu generasi ke generasi. Budaya kerja dapat didayagunakan sebagai daya dorong yang efektif dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Budaya kerja yang efektif dapat menyatukan cara berpikir,

berperilaku dan bertindak seluruh organisasi individu organisasi; mempermudah penetapan dan implementasi visi, misi dan strategi organisasi; memperkuat kerjasama tim, menghilangkan friksi-friksi internal yang timbul; memperkuat ketahanan dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal.

Pemimpin mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk budaya kerja dalam organisasi. Triguno (2004:1) mengemukakan bahwa budaya kerja merupakan suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai – nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja. Sehingga budaya kerja merupakan cara kerja sehari-hari yang bermutu dan selalu mendasari nilai-nilai yang penuh makna, sehingga menjadi motivasi, memberi inspirasi untuk senantiasa bekerja lebih baik dan memuaskan bagi masyarakat yang dilayani (Kepmenpan Nomor 25/KEP/M/PAN/04/2002).

Robert Kreitner dan Anglo Kinicki (2003:127) menjelaskan bahwa budaya kerja terbentuk dalam satuan kerja atau organisasi itu berdiri, artinya pembentukan budaya kerja terjadi ketika lingkungan kerja atau organisasi belajar dalam menghadapi permasalahan yang mengangkut masalah organisasi. Cakupan makna setiap nilai budaya kerja tersebut dinyatakan dalam bentuk :

1. Disiplin, yang meliputi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur kerja, waktu kerja dalam bentuk perilaku yang senantiasa berpihak pada norma dan peraturan yang berlaku di dalam maupun di luar organisasi.
2. Keterbukaan, yaitu kesiapan untuk memberi dan menerima informasi yang benar dari dan kepada sesama mitra kerja untuk kepentingan organisasi.
3. Saling menghargai, yaitu perilaku kerja yang menunjukkan penghargaan terhadap individu, penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab orang lain sesama mitra kerja.
4. Kerjasama, yaitu kesediaan untuk memberi dan menerima kontribusi dari dan atau kepada mitra kerja dalam bentuk saran dan target kerja.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan terdahulu dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka desain yang digunakan yaitu kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 1995). Penelitian ini dilaksanakan pada Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Utara. Dengan informan penelitian yaitu Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Utara ialah 5 kepala bagian, 7 kepala sub bagian, 6 staf pegawai dan 2 orang masyarakat pengguna jasa layanan biro umum, keseluruhan informan berjumlah 20 orang. Data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis dengan cara mengedit data penelitian di lapangan, melakukan reduksi data dengan membuat abstraksi dalam suatu rangkuman data, dikelompokkan kedalam beberapa kategori sesuai dengan fokus penelitian, melakukan penafsiran data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, pengarsipan, urusan rumah tangga pimpinan dan urusan dalam Sekretariat Daerah Provinsi , melaksanakan keprotokolan dan perjalanan Dinas, melaksanakan urusan perbekalan, pemeliharaan dan perlengkapan serta sandi dan telekomunikasi.

Budaya kerja setiap pegawai atau unit kerja penting artinya dalam meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, tanggung jawab merupakan implementasi dari motivasi, disiplin dan etos kerja yang tergambar dari ketaatan pegawai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan. Secara konseptual bahwa cakupan makan yang terkandung pada budaya kerja mencerminkan disiplin yang terlihat pada ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur kerja, waktu kerja; keterbukaan dalam memberikan dan menerima informasi maupun dalam hubungan kerja,

adanya sikap saling menghargai sebagai wujud penghargaan terhadap individu, tugas dan tanggungjawab serta adanya kerjasama sebagai kesediaan memberi dan menerima kontribusi dari dan kepada teman kerja dalam mencapai sasaran atau tujuan organisasi.

Budaya kerja yang dicerminkan oleh disiplin kerja pegawai berdasarkan hasil penelitian terlihat pada komitmen dan konsistensi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan di instansi ini belum sepenuhnya sejalan dengan visi, misi dan tujuan organisasi. Hal ini disebabkan karena ada sebagian pegawai yang tidak memahami pekerjaan yang menyangkut bidang tugas mereka. Padahal wewenang dan tanggung jawab, sudah ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Berdasarkan wawancara dengan para informan, ada informan yang menyatakan bahwa masih ada pegawai melayani tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kondisi yang demikian menunjukkan ketidakmampuan pegawai dalam menjalankan disiplin kerja. Mereka melayani secara sembarangan yang penting sudah melayani supaya kelihatan ada respon dari pegawai padahal tidak sesuai dengan prosedur yang sesungguhnya. Ada informasi yang menyatakan bahwa pegawai kurang tanggap dalam melayani keperluan masyarakat. Sikap mereka acuh tak acuh dalam memberikan tanggapan terhadap keperluan dan kepentingan masyarakat.

Menurut Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2003, unsur kualitas pelayanan harus mengikuti prosedur sederhana dan mudah difahami, mudah dilaksanakan, dibuat dalam bentuk bagan alir, dipampang diruangan pelayanan, bisa berbentuk bulat, kotak maupun tandah panah dan ditulis dengan huruf cetak mudah dibaca dalam jarak pandang minimal 3 meter. Transparansi dalam pelayanan publik mutlak diberikan dalam hal manajemen, prosedur pelayanan persyaratan teknis dan administrasi pelayanan, rincian biaya pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab, lokasi pelayanan, janji pelayanan, standar pelayanan publik, dan informasi pelayanan. Hal ini tidak tampak di instansi ini. Peningkatan pelayanan publik ditandai oleh peningkatan karya (*performance improvement*) yang secara konsepsional dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui

perbaikan atau peningkatan efisiensi, efektivitas, kualitas, kreativitas dan manajemen. Menurut Hidayat dan Sucherly (1986) cara – cara ini jika diterapkan dengan baik maka akan memuaskan pelayanan bagi pegawai itu sendiri maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Disiplin dan keterbukaan pegawai terlihat dari sikap professional dalam bekerja. Profesionalisme pegawai dilihat dari kemampuan dan ketrampilan kerja menunjukkan masih ada pegawai yang tidak sesuai antara latar belakang pendidikan dan ketrampilan pegawai dengan jabatan/bidang tugas. Namun demikian ada pegawai yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan ingin meningkatkan kemampuan mereka. Pada bagian arsip Ekspedisi dan TU Biro masih kurangnya kompetensi Staf terutama pengetahuan dibidang perundang-undangan dan peraturan kearsipan. Fasilitas komputer yang ada saat ini sering mengalami gangguan yang berdampak pada kelancaran pekerjaan serta kurangnya lemari arsip.

Pada bagian Tata Usaha Pimpinan terdapat surat yang diolah oleh instansi/unit kerja belum sesuai dengan tata naskah dinas sesuai dengan Kepmendagri no 2 tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi. Kurangnya data/informasi pendukung untuk pembuatan sambutan/materi terutama dari Instansi pelaksana kegiatan. Banyaknya surat yang ditindaklanjuti Sekda tanpa melalui mekanisme (dibuat telaahan Kepala SKPD). Pada bagian Sandi/Telkom masih kurang tenaga operator teknis dan penguasaan bahasa serta fasilitas perkantoran belum memadai.

Ada informan yang menyatakan bahwa pegawai kurang profesional, hal ini disebabkan karena ada pegawai yang tidak sesuai dengan job (bidang tugas), sehingga pada saat melayani tidak tahu apa yang harus diperbuat. Sementara itu ada pegawai yang mengatakan tidak sesuai antara pendidikan formal yang dimiliki dengan tugas karena para pegawai umumnya berkualifikasi pendidikan tidak dibidang pekerjaan yang mereka tekuni sekarang dan mereka ini yang sudah mendekati masa-masa pensiun. Mereka adalah pegawai yang sudah lama mengabdikan diri di instansi ini yang sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi karena akan memasuki masa pensiun.

Menurut Awaludin (1993) pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumberdaya manusia terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Adapun sasarannya yaitu: 1) Mengembangkan keahlian supaya pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. 2) Mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan diselesaikan secara rasional. 3) Mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemampuan kerjasama dengan teman-teman, pegawai dan pimpinan.

Menurut Simamora (1999) sumberdaya manusia adalah kemampuan terpadu dan daya pikir dengan fisik yang dimiliki seseorang individu sangat menentukan kecepatan dan ketepatan kualitas hasil pekerjaan sehingga bila semua jenis dan sumber tingkat pekerjaan dipadukan dengan baik akan didapatkan irama kerja yang dinamis dan produktif. Kenyataan membuktikan bahwa manusia memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, ketrampilan pengetahuan, dorongan, daya dan karya. Sumberdaya manusia merupakan potensi yang memiliki rasio rasa dan karsa. Potensi tersebut sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan.

Pegawai, dalam berpikir kreatif dan inovatif belum sepenuhnya disebabkan karena sudah menjadi kebiasaan bahwa segala sesuatu harus bertanya dan melapor kepada pimpinan atau atasan. Sehingga mereka kurang kreatif berbagai masalah yang ditemui pegawai kurang tanggap hanya acuh tak acuh seolah-olah nanti pimpinan saja yang menyelesaikan masalah tersebut. Peranan pimpinan dalam memotivasi bawahan untuk bekerja sesuai prosedur standar operasional, membangun kerjasama antar pegawai, sangat sering dilakukan bahkan berulang-ulang pada saat apel pagi dan sore atau saat rapat koordinasi bahkan pimpinan di unit kerja ini dapat dijadikan teladan dalam hal prosedur standar operasional sesuai visi, misi dan tujuan organisasi. Hardjito, (1997) mengemukakan bahwa seseorang pemimpin harus memiliki empat sifat yakni (a) Kemampuan melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan, (b) kemampuan dalam mengambil keputusan, (c) kemampuan melimpahkan atau mendelegasikan wewenang, dan (d), kemampuan menanamkan kesetiaan.

Menurut Mckeena dan Beech (2000) kepemimpinan merupakan kemampuan manajemen dalam melibatkan pada pegawai secara riil dalam setiap proses pengambilan keputusan. Setiap pegawai akan merasa bangga diundang oleh pimpinan untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan organisasi, apalagi duduk dalam satu meja atau suatu pertemuan, diminta memberikan pendapat dan usul sehubungan dengan penetapan dan penyusunan perencanaan organisasi kedepan. Makin besar jumlah pegawai memungkinkan tidak seluruhnya dapat dilibatkan secara aktif dalam pertemuan. Untuk itu sangat membutuhkan keikutsertaan perwakilan pegawai dalam arti merekalah sangat representasi dari pada pegawai yang lain untuk bersama-sama dengan pimpinan merumuskan dan menetapkan rencana yang akan dikerjakan.

Berkenan dengan sikap mental para pegawai maka keterlibatan mental dan emosional dari para pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, masih bersifat lebih banyak emosi di bandingkan dengan rasio. Padahal yang diharapkan dari pegawai ada keseimbangan antara emosi dan rasio. Partisipasi yang tidak saja lahiriah tetapi juga batiniah. Pada pegawai dalam rangka kegiatan pekerjaan melibatkan diri dengan sesungguhnya memberikan pendapat dan pokok pikirannya dengan baik dalam setiap pengambilan keputusan (termasuk penyusunan rencana).

Keterlibatan mental emosional pegawai dalam suatu pekerjaan dalam menyusun perencanaan antara lain meliputi : (a). Memahami situasi dan kondisi tugas pekerjaan secara tepat dan mudah, (b). Menganalisis, dan menentukan permasalahan pokok yang dihadapi dan perlu diatasi, (c). Menentukan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dan perlu diatasi, (d). Merumuskan rencana program dan kegiatan yang lebih berkualitas sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta melaksanakannya secara partisipatif dengan penuh rasa tanggung jawab (Anonimus, 1996).

Menurut McKeena dan Beech (2000) bahwa tingkat partisipasi pegawai mempunyai pengaruh besar pada bagaimana sebuah organisasi berjalan, dan biasanya dikaitkan dengan dua area penting, yaitu gaya manajemen dan perwakilan pegawai seperti pemimpin. Jika pegawai dilibatkan maka hal ini besar

manfaatnya bagi kelancaran, dan kesuksesan bagi suatu instansi. Dianggap bahwa bila pegawai dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan maka mereka akan mempunyai rasa memiliki yang lebih besar terhadap keputusan yang dibuat dan semakin besar pula komitmen mereka untuk mengimplementasikannya.

Peran pemimpin memotivasi pegawai yang nampak dalam peran aparatur memotivasi pegawai untuk berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan tugas dan pekerjaan, meliputi sub-sub indikator sebagai berikut : (a). Melakukan komunikasi, (b). Mengetahui dan memenuhi keinginan-keinginan pegawai, (c) mengembangkan efektif, (d). Membina human relation, (e) memberikan penghargaan, (f). Pemantauan, dan penilaian kegiatan-kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemimpin memotivasi pegawai sangatlah penting untuk memacu dan menimbulkan kesadaran pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Kenyataan pada instansi ini menunjukkan bahwa masih ada pemimpin yang belum memainkan peranannya memotivasi pegawai, sehingga mempengaruhi budaya kerja mereka. Masih ada pemimpin yang kurang menyadari peran pemimpin memotivasi pegawai dapat mengakibatkan setiap kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan instansi ini dapat terhambat.

Tanggung jawab pegawai terhadap tugas yang diberikan kepada setiap pegawai atau unit kerja penting artinya dalam meningkatkan kinerja organisasi. Selain itu, tanggungjawab merupakan implementasi dari motivasi, disiplin dan etos kerja yang tergambar dari ketaatan pegawai melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur dan jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan. Hasil penelitian di instansi ini belum semua pegawai bertanggung jawab terhadap tugas pekerjaan. Masih ada pegawai yang tidak disiplin tentang apel pagi maupun sore. Datang terlambat dan mengisi absen setelah itu menghilang dengan alasan tugas luar dan tidak kembali lagi untuk apel sore. Hal ini membuat pegawai yang rajin dan disiplin merasa cemburu karena waktu menerima tunjangan sama-sama menerima dalam jumlah yang sama karena hanya dihitung/dilihat berdasarkan kehadiran (absen).

Untuk meningkatkan budaya kerja yang baik, pelayanan atau efektivitas pelaksanaan tugas pekerjaan, maka disiplin pegawai harus ditertibkan, profesionalisme pegawai ditingkatkan, tanggungjawab pegawai ditingkatkan, kerjasama tim/kelompok dan jadwal waktu apel pagi dan sore harus diperhatikan oleh setiap pegawai diawasi oleh pimpinan. Hal ini tentunya berkaitan dengan kemampuan pegawai untuk dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan instansi maupun dalam instansi itu sendiri. Sebagai contoh, adanya sikap mental pegawai yang cenderung dengan sengaja menunda-nunda pekerjaan akan membentuk suatu budaya kerja yang tidak baik bagi instansi ini.

Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa bawahan pegawai merasa takut untuk bertindak bahkan enggan untuk melakukan suatu terobosan apalagi jika menemui suatu masalah dalam pelaksanaan tugas. Situasi yang demikian sebagai wujud dari tidak terbentuknya situasi yang saling terbuka dalam memberikan dan menerima informasi kepada sesama teman kerja maupun dari pimpinan kepada bawahan untuk kepentingan organisasi. Sulistyani (2003), mengatakan bahwa dalam menjalankan berbagai tugasnya, birokrasi membagi kegiatan-kegiatan pemerintah menjadi bagian-bagian yang masing-masing memiliki fungsi yang khas. Pembagian kerja seperti ini memungkinkan terjadinya spesialis fungsi. Dengan cara seperti ini, penugasan spesialisasi untuk tugas-tugas khusus bila dilakukan dan setiap mereka bertanggung jawab atas keberhasilan pekerjaannya masing-masing. Pembagian kerja tidak akan terjadi ketika arus informasi tersendat sebagai bentuk dari tidak adanya keterbukaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain dalam organisasi.

Menurut Sulistyani, ciri khas birokrasi yaitu wewenang yang disusun secara hierarki atau berjenjang. Hirarki itu berbentuk piramid yang memiliki konsekuensi semakin tinggi suatu jenjang berarti pula semakin besar wewenang yang melekat didalamnya dan semakin sedikit penghuninya. Hirarki wewenang ini sekaligus mengindikasikan adanya hirarki tanggung jawab. Pada setiap hirarki, para pejabat birokrasi memiliki hak memberikan perintah dan pengarahan pada bawahannya, dan para bawahan itu berkewajiban untuk mematuhi. Hal inilah

yang membuat para pegawai merasa enggan apabila menemui pimpinan hanya untuk melaporkan keputusan yang sudah diambilnya karena pegawai hanya merasa mempunyai kewajiban untuk mematuhi semua perintah dari atasan.

Dalam hal saling menghargai sebagai bentuk perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap individu, tugas dan tanggungjawab yang dimiliki nyata terlihat pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi dalam organisasi serta penguasaan terhadap ilmu dan teknologi. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi dalam organisasi serta penguasaan terhadap ilmu dan teknologi tergantung pada pegawai yang bersangkutan karena ada pegawai yang mau berusaha. Pegawai yang menguasai ilmu dan teknologi yakni kemampuan beradaptasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi diperhadapkan pada situasi dimana mereka tidak bisa mengembangkan itu dikantor karena fasilitas komputer hanya terbatas. Hal ini juga diikuti dengan temuan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hanya pegawai-pegawai tertentu melaksanakan pekerjaan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dan dapat dipercaya. Pada bagian arsip Ekspedisi dan TU Biro ditemukan bahwa fasilitas komputer saat ini sering mengalami gangguan yang berdampak pada kelancaran pekerjaan. Pada bagian sandi/Telkom kurangnya tenaga operator teknis dan penguasaan bahasa.

Di instansi ini sangat diperlukan adanya pengalaman yang cukup tinggi serta pengetahuan teknis yang memadai dari para pegawai. Karena itu pekerjaan menuntut pengalaman yang tinggi serta latihan yang cukup luas agar para pegawai dapat menghadapi permasalahan yang muncul. Diperlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu dan teknologi, Yang umumnya berkembang sangat cepat. Dengan variasi tugas yang banyak, dan rumit memerlukan teknologi dalam meghadapinya. Kegiatan-kegiatan yang rumit tersebut kadang tidak ditangani dengan formula, prosedur maupun theknik yang sudah baku. Permasalahan umumnya diselesaikan dengan menggunakan sejumlah pengetahuan yang konvesional sebagai acua.

Permasalahan yang banyak berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan sebagai wujud kerjasama dalam memberi dan menerima kontribusi dari dan

kepada teman kerja dalam pencapaian tujuan organisasi berdasarkan hasil wawancara banyak disebabkan oleh keterbatasan sarana kerja seperti computer. Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa komputer yang ada sering mengalami gangguan padahal jumlahnya terbatas. Menurut Indrajid (2001) bahwa pemanfaatan teknologi secara tepat akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja suatu organisasi. Dalam kaitan ini hambatan yang dihadapi oleh instansi ini ialah bagaimana memanfaatkan kemajuan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Pada kondisi yang demikian maka diperlukannya kerja sama pada semua bagian untuk mau dan dapat bekerja sama satu dengan yang lain dalam menyelesaikan pekerjaan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa budaya kerja di instansi belum sepenuhnya menyatukan cara berpikir, berperilaku dan bertindak pegawai yang terlihat pada disiplin kerja, keterbukaan, saling menghargai dan kerjasama. Implikasi dari adanya budaya kerja tersebut diatas berkaitan dengan pegawai kurang disiplin, sarana dan prasarana penunjang belum memadai. Demikian pula halnya dengan profesionalisme, kemampuan, ketrampilan, dan penguasaan teknologi dari pegawai yang belum menunjang. Kondisi tersebut juga diikuti dengan loyalitas pegawai masih diragukan, dalam hal kerjasama dan berfikir kreatif dan inovatif belum semua dilaksanakan pegawai. Sikap mental, kejujuran dan tanggungjawab masih relatif rendah, keadilan dan transparansi masih belum dilaksanakan. Pada situasi yang demikian mengakibatkan budaya kerja pegawai di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara belum dapat menerapkan visi, misi dan strategi organisasi; belum bisa memperkuat kerja sama tim, belum bisa menghilangkan friksi-friksi internal yang timbul serta belum dapat memperkuat ketahanan dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal.

Dalam upaya menumbuhkan budaya kerja yang baik di Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara maka, disarankan Pegawai perlu melakukan penyesuaian dengan budaya kerja yang dimiliki oleh organisasi kerja,

Pemimpin menjadi teladan dalam setiap pelaksanaan tugas yang dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap hari, memperkuat kerja sama tim dengan cara mengadakan kegiatan *family day* yang melibatkan seluruh pegawai di Biro Umum, sikap saling menghargai diarahkan pada loyalitas kerja bukan individu pimpinan, menempatkan pegawai dengan memperhatikan sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh pegawai pada jabatan sebelumnya dan pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin berdasarkan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUTAKA

- Anonimus, 1996, perencanaan partisipatif pembangunan masyarakat desa (P3MD) buku 1 Pemahaman Dasar. Ditjen Pembangunan Masyarakat Desa Depdagri, Jakarta.
- Awaludin, 1993. Pengantar manajemen Sumber Daya Manusia, balai pustaka Jakarta.
- Dwiyanto,A. 2002. Penilaian Kerja Organisasi Publik Makalah dalm seminar sehari: Kinerja Organisasi Sektor Publik, Kebijakan Dan Penerapannya. Fisipol UGM. Yogyakarta.
- Hidayat dan Sucherly. 1986. Konsep dasar dan Pengertian Produktivitas Serta Interpretasi Hasil Pengukurannya. PRISMA. Jakarta.
- Indrajid, R.E.2001. Manajemen Sistim Informasi dan Teknologi Iformasi. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Kreitner R. dan Anglo K. 2003. Perilaku Organisasi, Buku 1 dan 2. Salemba Empat: Jakarta
- Mckeena, E and N. Beech, 2000, Manajemen Sumberdaya Manusia, (terjemahan oleh Toto budi Sutomo), Penerbit Andi Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 1995. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Karya, Bandung.
- Ndraha T. 1997. Budaya Organisasi. Rineka Cipta; Jakarta.
- Osborn. D. dan Peter.P (2002). Memangkas Birokrasi. Edisi Revisi. Penerbit PPM: Jakarta.
- Simamora, H. 1999. Manajemen Sumberdaya Manusia. Edisi Kedua Bagian Penerbit STIEE. YPKN. Yogyakarta.

Sulistiyani, A.T dan Rosidah, 2003, Manajemen Sumberdaya Manusia. Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.

Triguno. 2004. Budaya Kerja: Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif Untuk Meningkatkan Produktivitas Kerja. Edisi Keenam. Golden Terayon: Yogyakarta.

West. M A. 2000. Mengembangkan Kreativitas dalam Organisasi. Edisi Pertama. Kanisius; Jakarta.

Efektivitas Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Oleh
Flora Worotitjan⁴
Dr. Drs. Willy F. Pesoth. MS⁵
Dr. Drs. Novie R. Pioh. M.Si⁶

Abstract

Allowance for employee performance based on efforts to increase the motivation and discipline as well as boost productivity Civil Servants in the scope of the Provincial Government of North Sulawesi . This study aimed to analyze the effectiveness of regional performance benefits of employees in the Civil Service Agency of North Sulawesi Province .

By using a qualitative design , the study concluded that administration of performance-based performance benefits of civil servants in the Regional Employment Board has not efektif make employees have the ability to adjust , resulting in job performance and job satisfaction . The determination of the amount of allowances to her performance based on workload analysis not tingkaan positions and classes , tailored to the competency -based reward system .

Keywords : Effectiveness, Performance Benefits, Employee.

PENDAHULUAN

Upaya mewujudkan profesionalisme kerja guna mendukung peningkatan kinerja di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Gubernur telah mengeluarkan suatu kebijakan yang lebih banyak dikenal oleh masyarakat umum dengan sebutan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 328 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kebijakan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ini didasarkan pada upaya untuk meningkatkan motivasi dan disiplin serta memacu produktivitas Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Penerapan kebijakan ini berlaku pada semua

⁴ Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

⁵ Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

⁶ Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Utara termasuk Badan Kepegawaian Daerah.

Adapun besaran tunjangan kinerja ini dibagi dalam tiga kelompok jabatan yaitu pejabat structural, pejabat fungsional dan pelaksana (non struktural/non fungsional) dengan besaran tunjangan Rp. 1.750.000,- sampai dengan Rp. 25. 000.000,-. Dengan pemberian tunjangan tambahan penghasilan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan disiplin kerja pegawai sehingga memiliki produktivitas atau kinerja yang tinggi. Pemberian tunjangan kinerja ini diharapkan aparat atau pegawai yang ada termasuk pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar dalam penyelenggaraan pelayanan kepegawaian di lingkup Pemerintah Sulawesi Utara. Akan tetapi sejauh mana kebijakan ini dinilai efektif meningkatkan kinerja pegawai dan kinerja organisasi menjadi suatu pertanyaan mendasar yang sampai pada saat ini baik oleh pembuat kebijakan maupun masyarakat selaku penerima layanan dari aparat sipil yang ada. Sebab permasalahan yang berkaitan dengan kualitas kerja seperti penyelesaian pekerjaan yang masih belum tepat waktu, adanya pegawai yang datang terlambat pulang lebih awal, pegawai yang menunda-nunda pekerjaan.

Badan Kepegawaian Daerah dengan tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari sorotan kinerja pelayanan kepegawaian yang ada. Mewujudkan aparatur sipil yang professional dan memiliki kualitas kerja yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wewenang dan tanggungjawab Badan Kepegawaian Daerah. Hal ini sebagaimana yang termaktup dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara serta Keputusan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Bagan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Permasalahan lainnya yang berkaitan dengan produktivitas kerja masih dijumpai dalam penyelenggaraan kerja di Bagan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara seperti dalam menyelesaikan tugas-tugas rutin dalam pelayanan sering terlambat, kurangnya rasa tanggungjawab pada pekerjaan disebabkan belum tumbuh rasa memiliki di antara para pegawai bahkan masih sering tergantung kepada yang lain, sehingga pekerjaan tidak dapat ditangani secara baik dan hasilnya tidak memenuhi harapan, misalnya banyak berkas yang hilang dikarenakan tidak adanya kepastian tentang pegawai pelaksanaannya, dari segi kualitas produk layanan yang diberikan dianggap masih rendah dan terkesan tidak dikerjakan secara profesional karena kurangnya kepastian persyaratan dan waktu penyelesaian, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kehadiran pegawai yang masih rendah, pegawai kerap kali datang, istirahat dan pulang tidak sesuai aturan. Oleh penelitian ini dilakukan untuk tujuan menganalisis efektivitas pemberian tunjangan kinerja daerah pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

KAJIAN PUSTAKA

Memahami tentang tunjangan kinerja pegawai khususnya di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara dapat dijelaskan melalui nomenklatur kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara melalui Surat Keputusan Nomor 328 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kebijakan pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai ini didasarkan pada upaya untuk meningkatkan motivasi dan disiplin serta memacu produktivitas Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini dianggap penting untuk diberikan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja. Sehingga pemahaman mengenai tunjangan kinerja pegawai adalah mengenai tunjangan tambahan penghasilan.

Menjadi pertanyaan mendasar, apakah pemberian tunjangan kinerja telah efektif meningkatkan meningkatkan motivasi dan disiplin serta memacu produktivitas pegawai. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar efektif

yang artinya ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) dan penggunaan metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal). Pada dasarnya pemahaman mengenai efektivitas secara umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil ataupun tujuan yang hendak dicapai. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan Riggs (1988:309) bahwa, “Efektivitas lebih mengacu pada jangkauan tujuan yang akan dicapai”. Sedangkan Robins (1994:53) mengemukakan konsep efektivitas dengan menyatakan bahwa, “Keefektifan didefinisikan sebagai sejauhmana sebuah organisasi mewujudkan tujuan-tujuannya”.

Konsep efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli menunjukkan bahwa efektivitas merupakan suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Dapat pula dipahami bahwa efektivitas itu sendiri adalah melakukan sesuatu yang benar atau adanya tindakan yang tepat. Gibson et al (1996:32), ada lima hal pokok yang menjadi ukuran efektivitas yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan pengembangan. Sementara itu Steers (1985:192) mengemukakan alat ukur efektivitas kerja meliputi unsur kemampuan menyesuaikan diri / prestasi kerja dan kepuasan kerja.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif yang dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat (Cresswell. 1994). Data diperoleh dari Informan yang diwawancarai pada penelitian ini berjumlah 10 orang yang kesemuanya berasal dari Kepala Badan, unsur Kepala Bidang, unsur Kepala Sub Bagian, unsur Kepala Sub Bidang dan staf yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, ditambah dengan pengamatan dan studi dokumen. Analisis atas hasil penelitian dilakukan melalui tahapan kategorisasi dan mereduksi data, yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, melakukan interpretasi pada data, pengambilan keputusan dan melakukan verifikasi atas hasil analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian tunjangan kinerja daerah atau yang disebut dengan tunjangan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara didasarkan pada Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 328 Tahun 2013. Pemberian tambahan penghasilan ini didasarkan pada prestasi kerja pegawai dengan harapan dapat meningkatkan motivasi kerja dan disiplin kerja serta memacu produktivitas kerja.

Pegawai di badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang berjumlah 61 orang juga merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan data yang ada, tambahan penghasilan telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan lampiran I Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 328 Tahun 2013 yang didasarkan pada jabatan yang dibagi ataspejabat struktural dari eselon Ib sampai dengan eselon IVb, kemudian pejabat fungsional dan pelaksana (pegawai non structural dan non fungsional). Dilihat dari besaran tunjangan yang diberikan dianggap bukan kecil. Berdasarkan lampiran I Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 328 Tahun 2013, seorang Kepala Badan yang secara struktural masuk dalam eselon IIa mendapatkan tambahan penghasilan Rp. 15.000.000,- Kepala Bidang dalam eselon IIIa mendapatkan tambahan penghasilan Rp. 5.000.00,- Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian dalam eselon IVa mendapatkan tambahan penghasilan Rp. 3.000.000,- sementara staf golongan III dan golongan IV mendapatkan tambahan penghasilan Rp. 2.100.000,- dan staf golongan I dan golongan II mendapatkan tambahan penghasilan Rp. 1.750.000,-

Tambahan penghasilan juga diikuti dengan penilaian kinerja pegawai dengan mengacu pada lampiran II Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 328 Tahun 2013 yang berisikan penilaian kinerja dengan memperhatikan produktivitas, efisiensi, inovasi, kerjasama, kecepatan, tanggungjawab dan ketaatan. Lampiran II ini merupakan lembar penilaian berkaitan dengan tanggung jawab kerja yang diberikan kepada masing – masing pegawai berdasarkan jabatan pada struktur organisasi Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah melalui perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas, pemberian dukungan atas penyelenggara pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah, penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, pengadaan dan pengembangan, mutasi dan pensiun, jaringan informasi dan kesejahteraan pegawai, pembinaan dan pengawasan pegawai maupun melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan ditemukan bahwa pegawai selalu berupaya menyelesaikan pekerjaan yang ada pada bidang kerjanya sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Akan tetapi yang menjadi kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kerja berkaitan dengan sistem yang digunakan, dokumen pendukung yang dibutuhkan dan tidak dimiliki oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan teknis pembinaan kepegawaian yang tergantung pada unsur pimpinan di Provinsi Sulawesi Utara.

Akan tetapi dari hasil wawancara yang ada terungkap bahwa ada banyak pekerjaan yang berkaitan dengan sistem yang menghubungkan dengan Pemerintah Pusat yang menggunakan jaringan internet diselesaikan dengan menggunakan waktu yang lama (menyesuaikan pada situasi dan kondisi jaringan) sehingga banyak pekerjaan yang dilakukan diluar jam kantor. Pada saat ada mutasi maupun promosi dan pergantian pejabat, pegawai harus menunggu hasil dari tim Bakerjakat, menyiapkan segala dokumen yang dibutuhkan oleh tim Bakerjakat. Kesemuanya ini banyak kali dilakukan di luar jam kantor termasuk mengedarkan undangan pelantikan pada waktu yang sangat terbatas. Kondisi – kondisi inilah yang banyak dihadapi oleh pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai data yang menggambarkan prestasi kerja pegawai. Namun sampai dengan saat ini diakui oleh informan dimana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah berupaya semaksimal mungkin dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dalam menjalankan tanggungjawab

kerja dalam manajemen kepegawaian di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara.

Pemberian tambahan tunjangan penghasilan dianggap oleh informan sebagai bentuk menghormati atas pekerjaan yang dilakukan. Sebab diakui oleh informan dimana ada pekerjaan-pekerjaan yang memang dilakukan melebihi jam kerja. Membentuk kepuasan kerja memang salah satunya adalah dengan melakukan pemberian tunjangan. Kepuasan kerja yang dirasakan oleh pegawai atas adanya tunjangan tambahan penghasilan menjadikan unsur pimpinan dan staf memiliki hubungan kerja yang baik. Sebab dengan pemberian tunjangan inilah pegawai merasa pekerjaan yang dihasilkan dihargai oleh pimpinan. Hubungan kerja yang tercipta antara sesama pegawai yang mendorong mereka memiliki semangat kerja yang baik sehingga membawa hasil kerja yang diharapkan tentunya menjamin adanya kebebasan dalam berpendapat diantara pegawai.

Efektivitas pemberian tunjangan tambahan penghasilan yang dianalisis melalui dimensi kemampuan menyesuaikan diri dipahami sebagai suatu situasi yang harus dijalankan oleh pegawai yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk dapat melakukan penyesuaian diri dengan keberadaan organisasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2008 tentang uraian tugas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Pemberian tunjangan tambahan penghasilan atau yang dikenal dengan sebutan tunjangan kinerja daerah dapat menjadikan pegawai yang ada untuk mampu menyesuaikan diri dengan baik dan benar dengan tugas dan tanggungjawab yang melekat padanya berdasarkan struktur jabatan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Upaya yang seharusnya dilakukan oleh pegawai adalah bagaimana melakukan penyesuaian antara tujuan organisasi dengan tujuan pribadi.

Satu hal yang cukup menarik yang ditemukan dari wawancara dengan informan ditemukan bahwa para informan menyadari bahwa kesemuanya memiliki keterbatasan baik dalam menjalankan tugas berdasarkan jabatan yang ada dan bahwa tunjangan tambahan penghasilan merupakan salah satu hal yang

mereka terima dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Kemampuan menyesuaikan diri harus memperhatikan prinsip ketaatan pada ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari indikator penilaian kinerja berdasarkan lampiran II Surat Keputusan Nomor 328 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pegawai harus mampu menyesuaikan diri dengan segala aturan yang ditetapkan baik menyangkut kewenangan kerja maupun berkaitan dengan disiplin kepegawaian. Sehingga melalui hal inilah maka setiap pegawai diharapkan dapat melakukan penyesuaian diri dengan organisasi dan penyesuaian diri dengan pola penilaian kinerja yang diterapkan.

Pemberian tunjangan tambahan penghasilan dari hasil penelitian ini belum memberikan penilaian pada tercapainya efektifitas sebagaimana yang diharapkan dari adanya Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 328 Tahun 2013 tentang pemberian tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga dari data yang ditemukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa upaya mencapai prestasi kerja dengan adanya pemberian tunjangan penghasilan memerlukan perbaikan kemampuan pegawai dengan memperhatikan konsep kompetensi. Kemampuan, kecakapan maupun pengalaman secara konseptual akan berkaitan dengan yang namanya kompetensi. Pegawai yang memiliki kompetensi baik tentunya akan mampu menunjukkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang diharapkan dari adanya pemberian tunjangan tambahan penghasilan dalam menggambarkan efektivitas pelaksanaan kebijakan ini adalah pada hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan waktu yang dimiliki oleh pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Penyesuaian diri ini diharapkan terjadi melalui adanya motif berprestasi dalam penyelesaian pekerjaan setiap hari. Pemberian tunjangan tambahan penghasilan memberikan konsekwensi kepada pegawai untuk memiliki disiplin

kerja yang tinggi dalam menjalankan pekerjaan. Disiplin kerja dalam hal ini berkaitan dengan ketaatan pada waktu kerja (jam kerja : tiba-pulang), waktu melayani, waktu menyelesaikan pekerjaan dan lain sebagainya. Disiplin kerja pegawai sebagai bentuk penyesuaian diri menjadi nyata dari sikap pegawai yang mematuhi atau melaksanakan peraturan/ketentuan dalam bekerja, mengikuti prosedur kerja, perintah kerja dan pengendalian kerja yang telah ditetapkan.

Disiplin yang dimiliki seorang pegawai secara individu atau secara bersama-sama dapat menciptakan nilai-nilai atau hasil yang diharapkan lembaganya, dalam hal menjalankan setiap tugas dan pekerjaan yang diberikan. Sehingga dengan adanya disiplin kerja yang tinggi dari pegawai pemerintah akan lebih siap dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Sebab memang harus diakui bahwa kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap organisasi yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja didalamnya maupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Jika kemampuan menyesuaikan diri tersebut dapat berjalan maka tujuan organisasi dapat tercapai.

Sistem penghargaan pegawai dirancang untuk tujuan atau kepentingan kedua belah pihak, yaitu pegawai dan organisasi. Bagi pegawai, sistem penghargaan dimaksudkan untuk menumbuhkan motivasi dan semangat kerja serta kepuasan kerja. Adanya pengakuan organisasi terhadap kinerja yang dicapai oleh pegawai akan menimbulkan pengukuhan atas sikap dan perilaku yang telah dilakukan. Kepuasan kerja pegawai akan mencegah terjadinya ketidakhadiran, pemborosan waktu, turnover dan, disisi lain, dapat membangkitkan semangat kerja, sehingga pegawai terdorong untuk berprestasi dan berkinerja dengan baik. Dengan demikian, kebutuhan dan kepentingan pegawai akan relatif terpenuhi. Bagi organisasi, sistem penghargaan dapat menimbulkan kinerja organisasi meningkat, sebagai konsekuensi dari semangat dan gairah kerja pegawai. Organisasi dapat meminimalkan alokasi sumber daya finansial yang tidak perlu,

selain itu organisasi dapat melakukan optimalisasi sumber daya pegawai, untuk memacu pencapaian tujuan organisasi.

Berkaitan dengan konsep efektivitas, pemberian tambahan penghasilan diharapkan pegawai merasa puas atau memiliki tingkat kepuasan tertentu sehingga dengan adanya rasa puas tersebut menjadi motivasi yang mendorong pegawai untuk berkinerja baik dalam pekerjaannya. Dari wawancara yang dilakukan menunjukkan adanya rasa puas dalam batas kewajaran dengan adanya pemberian tunjangan tambahan penghasilan. Sebab informan mengungkapkan bahwa ada banyak pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai melebihi jam kerja yang ada. Serta beban kerja yang dimiliki oleh pegawai pada kegiatan-kegiatan tertentu rasanya terlalu besar sehingga memerlukan tambahan tenaga dan waktu. Penilaian akan kinerja sebagaimana lampiran 2 Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 328 Tahun 2013 mengisyaratkan pegawai untuk bekerja cepat dan taat pada ketentuan yang ada. Akan tetapi ketaatan pada ketentuan dan waktu perlu untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.

Sebab harus diakui bahwa efektivitas kerja pegawai maupun organisasi akan juga berkaitan dengan karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan dan karakteristik pekerja serta kebijakan dan praktek manajemen sebagaimana yang dikemukakan oleh Steers (1985:9). Karakteristik organisasi (terdiri dari struktur dan teknologi organisasi), Dimaksud dengan struktur ialah hubungan yang relatif tetap sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi sehubungan dengan susunan sumber daya manusia, yang meliputi faktor-faktor seperti luasnya desentralisasi pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan rumusan interaksi antar-pribadi dan cara bagaimana orang-orang akan dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi. Karakteristik Lingkungan berkaitan dengan lingkungan pekerjaan suatu organisasi) yang berupa lingkungan *intern*, yang meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja misalnya pekerja, orientasi pada prestasi serta lingkungan *ekstern* yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi kepuasan serta tindakan di dalam organisasi misalnya kondisi ekonomi pasar dan peraturan pemerintah. Sementara

karakteristik pekerja yaitu perhatian diberikan kepada perbedaan individual antar pada pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas yang menuju pada rasa keterkaitan terhadap organisasi dan prestasi kerja individu dan kebijakan dan praktek manajemen yaitu peranan manajemen dalam prestasi organisasi dalam hal ini betapa variasi gaya, kebijakan dan praktek kepemimpinan dapat memperhatikan atau mcrintangi pencapaian tujuan.

Dari hal diatas terlihat jelas bahwa untuk menghasilkan suatu efektivitas kerja melalui adanya kepuasan kerja dengan diberikannya tambahan penghasilan juga tidak lepas dari organisasi itu sendiri melalui karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan serta kebijakan dan praktek manajemen yang berlaku dan ada di lingkungan kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sebab sistem penghargaan terkait dengan bagaimana organisasi memberikan pengakuan dan imbalan kepada pegawai dalam karangka menjaga keselarasan antara kebutuhan individu dengan tujuan organisasi. Sistem penghargaan dapat mendorong perilaku pegawai atau memberikan pengukuhan atas perilaku pegawai yang telah dilakukan. Olehnya Armstrong (2004) menyatakan bahwa manajemen/sistem penghargaan dapat meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi, sehingga mendorong pencapaian misi dan strategi organisasi dan membantu mencapai keberlangsungan keuntungan kompetitif dan meningkatkan nilai shareholder.

Sistem penghargaan idealnya dapat mendorong pegawai untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Dengan diberikan penghargaan idealnya dapat mendorong pegawai untuk lebih meningkatkan kinerjanya. Dengan diberikan penghargaan baik berupa finansial ataupun nonfinansial, pegawai cenderung memiliki harapan (ekspektasi) untuk memperoleh penghargaan tersebut. Oleh karenanya, bentuk penghargaan sedapat mungkin buat orang tertarik dan mendorong untuk mencapainya. Penghargaan diberikan kepada pegawai secara setelah orang tersebut menyelesaikan pekerjaannya. Jarak waktu pemberian penghargaan yang terlalu lama dari aktivitas pekerjaan dapat menyebabkan penghargaan menjadi tidak efektif atau orang sudah lupa terhadap prestasi yang dicapainya.

Memperhatikan berbagai hal diatas yang menjelaskan kepuasan pegawai dengan pemberian tambahan penghasilan maka sistem penghargaan berbasis kompetensi merupakan suatu sistem dalam pemberian penghargaan (gaji, intensif/bonus) dengan mendasarkan pada kompetensi yang dicapai oleh seorang pegawai. Apabila suatu organisasi telah menerapkan manajemen SDM dengan model kompetensi, maka persyaratan jabatan telah ditetapkan dengan standar kompetensi tertentu sehingga kepuasan kerja pegawai dapat tercapai dan dengan mudah diukur. Sebab kepuasan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapannya sebagaimana yang dikemukakan oleh Kotler (2000). Oleh karena itu, tingkat kepuasan adalah fungsi dari perbedaan antara kinerja (hasil) yang dirasakan dengan harapan. Setiap jabatan dalam organisasi telah ditentukan dimensi-dimensi kompetensi yang dipersyaratkan dan, bahkan, sampai skala nilai atau level tertentu. Dengan demikian, pada saat evaluasi atau penilaian kinerja, setiap pegawai dengan jabatan yang diembannya akan di nilai atau diukur sejauh mana pencapaian standar kompetensinya. Kinerja pegawai akan diketahui pencapaian level kompetensinya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian tunjangan kinerja berdasarkan prestasi kerja pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian Daerah belum efektif menjadikan pegawai memiliki kemampuan menyesuaikan diri, menghasilkan prestasi kerja dan kepuasan kerja. Pada penerapannya pemberian tunjangan kinerja lebih memperhatikan kehadiran pegawai setiap hari di tempat kerja (absensi menjadi patokan utama) bukan pada indikator penilaian kinerja yang ditetapkan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja yaitu produktivitas, efektivitas, efisiensi, inovasi, kerjasama, kecepatan, tanggungjawab dan ketaatan. Meskipun pemberian tunjangan kinerja diharapkan akan memotivasi pegawai untuk meningkatkan kualitas dan volume pekerjaannya namun masih ada pegawai belum efektif melakukan penyesuaian diri dalam hal disiplin waktu kerja dan pemanfaatan fasilitas kerja.

Pegawai memiliki pemahaman bahwa pemberian tunjangan kinerja merupakan kompensasi atas beban kerja yang dilakukan atas pekerjaan lebih dan yang dilakukan melebihi jam kerja (*over time*). Besaran tambahan penghasilan yang diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum memperhatikan besaran beban kerja individu pegawai akan tetapi besarnya lebih memperhatikan tingkatan jabatan dengan berdasarkan pada pejabatan struktural, fungsional dan pelaksana non struktural dan non fungsional. Sementara beban kerja dari masing-masing level jabatan struktural, fungsional maupun pelaksana berbeda antara satu dengan lainnya baik dalam instansi maupun luar instansi.

Didasarkan pada simpulan yang ada, maka disarankan untuk melakukan pengkajian secara ilmiah dalam penentuan besaran tunjangan kinerja yang didasarkan pada analisis beban kerja bukan tingkatan jabatan dan golongan serta pemberian tunjangan kinerja perlu disesuaikan dengan sistem penghargaan berbasis kompetensi. Selain itu pegawai melakukan penyesuaian diri dan mengubah perilaku kerja dalam menjalankan pekerjaannya dengan diterapkannya tunjangan kinerja, pegawai menjalankan pekerjaan dengan memperhatikan standart operasional prosedural pada setiap pekerjaan di bidang kerja, meningkatkan semangat dan motivasi dalam menjalankan pekerjaan dengan cara tidak menunda-nunda pekerjaan dan mengubah pemahaman bahwa pemberian tunjangan kinerja bukan sebagai kompensasi atas waktu kerja lebih (*over time*).

DAFTAR PUTAKA

- Armstrong Michael. 2004. Performance Management. Tugu Publiser. Yogyakarta.
- Creswell, J W. 1994. Qualitative Inquiry and Reasearch Disign. California: Sage.
- Gibson L. J., J. M. Ivanvevich dan J. H. Donnely Jr.1996. Organisasi dan Manajemen : Perilaku, Struktur dan Proses, ahli Bahasa Djoerban Wahid SH. Erlangga. Jakarta.
- Keputusan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Bagan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 328 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Kotler, P. 2000. Manajemen Pemasaran. Edisi Milenium. Edisi Bahasa Indonesia. Alih Bahasa: Ors. Benjamin Molan. Revisi ke edisi sepuluh. Penerbit PT. Prenhallindo. Jakarta.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara.

Riggs, F.W., 1988, Administrasi Negara-Negara Berkembang : Teori Masyarakat Prismatis, Diterjemahkan oleh : Tim Penerjemah Yasogama. Rajawali Pers. Jakarta.

Robins, P. S. 1994. Teori Organisasi : Struktur, Desain dan Aplikasi. Penerbit Arcan. Jakarta.

Steers, R. M, 1985, Efektifitas Organisasi (diterjemahkan oleh Dra. Magdalena Jamin) dari Judul Asli : Organizational Effectiveness, A Behavioral View. Kerjasama LP2M dan Penerbit Erlangga. Jakarta.

Pemberdayaan Petani Melalui Pemberian Dana Bantuan Sosial *In-cash Transfer* Kepada Kelompok Tani Dalam rangka Optimasi Lahan Sawah di Kabupaten Minahasa

Oleh

Dolf Heymans Christian Palandeng⁷

Dr. Drs. Markus Kaunang, MSi⁸

Prof. Dr. Ir. L. C. Mandey, MS⁹

Abstract

In agricultural development, which became one of the main problems, especially for the farmers is the lack of capital. One attempt to overcome these problems the government is to provide social assistance to the petani. Tujuan of this study examines the Farmer Empowerment Through Social Assistance Fund Granting In-Cash Transfers To Farmers Group Optimization in the Context of Wetland In Minahasa.

Based on the results of this study concluded that social assistance In-Cash Transfers To Farmers Group Optimization in the Context of Wetland In Minahasa can empower groups especially in strengthening capital, the provision and rehabilitation of agricultural infrastructure and facilities, institutional capacity building and human resource capacity as well as tackling poverty group of inability trying farmer so that the agricultural production process can still take place.

Keywords: Farmer Empowerment Fund, Social Assistance.

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam pembentukan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama

⁷ Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

⁸ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

⁹ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi pertanian.

Di dalam pembangunan pertanian, yang menjadi salah satu permasalahan pokok khususnya bagi para petani yaitu kurangnya modal. Menghadapi permasalahan kurangnya modal tersebut maka secara otomatis petani tidak mampu meningkatkan hasil pertaniannya. Salah satu usaha untuk mengatasi permasalahan tersebut yang dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan bantuan sosial kepada para petani.

Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif serta mempunyai kejelasan penggunaannya. Bantuan dapat berupa uang atau barang (*in-cash transfers*). Bantuan sosial melalui pola transfer uang dilaksanakan dengan mentransfer dana bantuan sosial langsung kepada kelompok sasaran sehingga secara langsung dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang telah diprogramkan. Pemerintah mengharapkan permasalahan petani khususnya dalam hal kurangnya modal dapat teratasi dengan adanya bantuan sosial.

Lahan pertanian adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting, karena lahan merupakan media tumbuh bagi tanaman. Banyak lahan-lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan, apabila ditangani maka lahan dimaksud dapat menghasilkan produksi yang optimal. Optimasi lahan pertanian merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usahatani tanaman pangan melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung lahan, sehingga dapat menjadi lahan usahatani yang lebih produktif. Kegiatan optimasi lahan diarahkan untuk menunjang terwujudnya ketahanan pangan danantisipasi kerawanan pangan dan dalam rangka untuk mendukung surplus 10 juta ton beras serta untuk meningkatkan IP diatas 1,8. Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pemberdayaan Petani Melalui Pemberian Dana Bantuan Sosial *In-Cash Transfer*

Kepada Kelompok Tani Dalam Rangka Optimasi Lahan Sawah Di Kabupaten Minahasa.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Bantuan Sosial

Pengertian bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 129/Permentan/OT.140/12/2013 adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatnya kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.Sasaran dari penyaluran belanja bantuan sosial Kementerian Pertanian, yaitu:Menguatnya permodalan usaha, tersedia dan meningkatnya penggunaan prasarana dan sarana pertanian, meningkatkan kapasitas kelembangaan dan kemampuan sumber daya manusia petani/pelaku usaha; Meningkatkan kemampuan kelompok/lembaga sasaran dalam mengatasi resiko rawan pangan dan resiko kegagalan usaha tani; Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan kelompok sasaran; dan Meningkatkan kemampuan kelompok/lembaga sasaran mempertahankan proses produksi pertanian pasca bencana.

2. Konsep Pemberdayaan Petani

Menurut Tjandraningsih (1996),pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untukmeraih keberdayaannya. Pemberdayaan adalah membantu klien untukmemperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukantindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasukmengurangi hambatan pribadi dan sosial.

Menurut Prijono dan Pranaka (1996), dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok

tanam pada tanah pertanian. Definisi petani menurut Anwas (1992), mengemukakan bahwa petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu.

3. Konsep Kelompok Tani

Kelompok tani adalah petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya), keakraban dan keserasian yang dipimpin oleh seorang ketua.(Trimo, 2006). Kelompok tani menurut Mardikanto diartikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau yang terdiri dari petani dewasa (pria/wanita) maupun petani taruna (pemuda/pemudi) yang terikat secara formal dalam suatu wilayah keluarga atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani (Mardikanto, 1993).

Kelompok tani pada dasarnya merupakan sistem sosial yaitu suatu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat oleh kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Di dalam kelompok ini akan terjadi suatu situasi kelompok dimana setiap petani anggota telah melakukan interaksi untuk mencapai tujuan bersama dan mengenal satu sama lain. (Syamsuddin, 1995).

4. Konsep Optimasi Lahan

Menurut Anonim (2014), optimasi lahan pertanian adalah usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan yang sementara tidak diusahakan atau IP rendah menjadi lahan usahatani yang lebih produktif, melalui perbaikan fisik dan kimiawi tanah. Bantuan sarana dan prasarana lainnya dalam menunjang peningkatan areal tanam dan atau indeks pertanaman (IP).Bilamana dilaksanakan pada lahan kering berlereng, maka dapat diterapkan kaidah konservasi untuk mencegah erosi dan penurunan provitas lahan.Khusus pada daerah rawa dan bekas tambang dapat diterapkan teknologi reklamasi untuk mengoptimalkan profitas lahan.Pelaksanaan fisik meliputi pembersihan lahan dan pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam, perbaikan kesuburan lahan, perbaikan sarana dan prasarana serta pemeliharaan (Anonim, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia (Marshall, 1995). Penelitian kualitatif juga digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dan tipe penelitian untuk mendapatkan data yang mendalam. Moleong (2002) menyatakan "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Informan dalam penelitian ini diambil sebanyak 15 informan, dengan rincian 7 orang dari petani/kelompok petani penerima dana bantuan sosial *In-Cash Transfer* dalam rangka optimalisasi lahan sawah, 3 orang dari tokoh masyarakat di Kabupaten Minahasa yang mengetahui tentang pelaksanaan bantuan sosial *In-Cash Transfer* kepada kelompok petani dalam rangka optimalisasi lahan sawah dan 5 orang dari Pemerintah baik dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara maupun dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Minahasa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah model interaktif dari Miles dan Huberman. Analisis interaktif di mana data yang diperoleh dari lapangan akan mengalami reduksi data. Hal ini dilakukan untuk menemukan fokus penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1992), mengemukakan bahwa analisa dengan menggunakan analisa model interaktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Minahasa merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, terletak di ujung utara pulau Sulawesi. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.029,82 km² atau 6,73% dari luas Provinsi Sulawesi Utara dan ibukota kabupaten ialah Tondano yang terbagi atas 25 Kecamatan dan 227 Desa. Topografi Kabupaten Minahasa sangat bervariasi dari datar, bergelombang, berbukit sampai dengan bergunung, lahan untuk pertanian didominasi lahan bergelombang sampai dengan berbukit. Lahan datar lebih banyak ditemukan di

wilayah pantai, daerah aliran sungai dan sekitar danau Tondano dengan kemiringan tanah antara 0 – 3%.

Kabupaten Minahasa mempunyai jumlah penduduk sebesar 343.014 jiwa (tahun 2013). Angkatan kerja pada tahun 2013 sebesar 136.139 jiwa dan angkatan kerja atau yang bekerja di bidang pertanian sebesar 42,60 % dari jumlah angkatan kerja di Kabupaten Minahasa (BPS, 2013). Pengembangan usaha pertanian khususnya padi sawah terdapat pada beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Tondano Barat dengan luas 683 Ha, Kecamatan Tondano Timur dengan luas 1.136,5 Ha, Kecamatan Tondano Utara dengan luas 144 Ha, Kecamatan Tondano Selatan dengan luas 493 Ha, Kecamatan Langowan Barat dengan luas 305,5 Ha, Kecamatan Langowan Timur dengan luas 562,5 Ha, Kecamatan Langowan Selatan dengan luas 145 Ha, Kecamatan Langowan Utara dengan luas 158,2 Ha, Kecamatan Kakas dengan luas 701 Ha, Kecamatan Kakas dengan luas 644 Ha, Kecamatan Tompaso dengan luas 519 Ha, Kecamatan Remboken dengan luas 323 Ha, Kecamatan Kawangkoan dengan luas 261 Ha, Kecamatan Kawangkoan Barat dengan luas 200 Ha, Kecamatan Kawangkoan Utara dengan luas 50 Ha, Kecamatan Sonder dengan luas 363 Ha, Kecamatan Tombariri dengan luas 85 Ha, Kecamatan Kombi dengan luas 36 Ha, Kecamatan Eris dengan luas 193 Ha, Kecamatan Pineleng dengan luas 44 Ha dan Kecamatan Tombulu dengan luas 147 Ha sesuai data potensi sawah 2014 per kecamatan Provinsi Sulawesi Utara (Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, 2014).

Adapun mekanisme penetapan penerima dan bantuan sosial melalui transfer uang (*in cash transfer*), yaitu: Perencanaan pengelolaan dana bantuan sosial ini dilaksanakan mulai di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang mencakup pembentukan tim teknis, penyusunan Juknis, rencana seleksi calon penerima dan calon lokasi (CP/CL), penyaluran dana belanja bantuan sosial, pembinaan dan pelaporannya. Kegiatan dimulai dari adanya pedoman teknis dari Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Provinsi dengan mengacu kepada Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014. Petunjuk Teknis

(Juknis) dibuat dan disusun dengan maksud untuk mengatur hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam Petunjuk pelaksanaan (Juklak). Juknis disusun secara fleksibel dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi masing-masing wilayah.

Kriteria calon penerima dana bantuan sosial disusun sebagai dasar untuk melakukan seleksi calon penerima dana bantuan sosial agar sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kriteria calon penerima dana bantuan sosial mencakup kriteria umum calon petani/kelompok tani, kriteria khusus calon lokasi dan kriteria teknis. Kriteria umum calon petani/kelompok tani penerima dana bantuan sosial melalui transfer uang (*in cash transfer*), antara lain: 1) Petani yang tergabung dalam suatu kelompok usaha harus memiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yang jelas, 2) Kelompok tani penerima dana bantuan sosial yang menghadapi keterbatasan permodalan pengembangan usaha tani yang memiliki potensi untuk dikembangkan, 3) Kelompok tani yang mengalami resiko sosial, dan 4) Kelompok tani yang sudah ada dalam sistim database e-proposal tahun 2014. Kriteria khusus calon lokasi penerima dana bantuan sosial melalui transfer uang (*in cash transfer*), antara lain Calon lokasi tersebut layak dan berpotensi ditumbuhkembangkan usaha pertaniannya, Jenis usaha tani (hulu, on farm, hilir) yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani, Jenis dan volume dana yang akan disalurkan disesuaikan dengan kondisi agro-ekosistem dan kebutuhan kelompok tani. Kriteria teknis calon penerima dana bantuan sosial disusun oleh masing-masing eselon – I lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan dituangkan ke dalam Pedoman Teknis.

Seleksi CP/CL secara umum meliputi seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis dengan tahapan meliputi seleksi daftar panjang (*long list*), daftar sedang (*medium list*), dan daftar pendek (*short list*). Adapun tahapan seleksi CP/CL ialah seluruh usulan/proposal yang masuk di dalam e-proposal direkapitulasi menjadi daftar *long-list* calon petani/calon lokasi penerima dana bantuan sosial Kementerian Pertanian. Selanjutnya dari daftar panjang (*long list*) dilakukan proses seleksi administrasi. Seleksi administrasi meliputi verifikasi

nama kelompok, nama ketua kelompok, alamat kelompok, jenis usaha kelompok, besarnya usulan dana belanja bantuan sosial, sesuai dengan data yang terdapat di dalam usulan/proposal. Bagi CP/CL yang lulus seleksi teknis direkapitulasi ke dalam daftar sedang (*medium list*). Berdasarkan daftar sedang (*medium list*), Tim Teknis melakukan seleksi aspek teknis dengan cara verifikasi dan membandingkan kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan data usulan/proposal. Bagi CP/CL yang lulus seleksi teknis direkapitulasi ke dalam daftar pendek (*short list*).

Penerima Dana berdasarkan daftar pendek (*short list*) CP/CL, untuk kegiatan tugas pembantuan kabupaten/kota, Tim Teknis mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi calon penerima dana bantuan sosial. Selanjutnya Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota mengesahkan kelompok tani penerima dana bantuan sosial melalui transfer uang (*in cash transfer*). Berdasarkan daftar pendek (*short list*) CP/CL kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan provinsi, Tim Teknis mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi calon penerima dana bantuan sosial. Selanjutnya Gubernur atau Kepala Dinas Pertanian Provinsi atas nama Gubernur mengesahkan kelompok tani penerima dana bantuan sosial. Kelompok ditetapkan dengan keputusan sebagai penerima dana bantuan sosial dan berhak menerima dana bantuan sosial.

Proses pengajuan dana bantuan sosial kementerian pertanian tahun anggaran 2014 dilakukan dengan ketentuan rencana usaha kelompok (RUK) disusun oleh kelompok tani terpilih dan disahkan/ditandatangani ketua kelompok, kelompok tani terpilih membuka rekening tabungan pada bank pemerintah terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota, ketua kelompok tani mengusulkan RUK kepada PPK. Setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian/Petugas lapang lainnya dan disetujui oleh ketua tim teknis, PPK meneliti RUK dari masing-masing yang akan dibiayai dan selanjutnya mengajukan RUK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Penyaluran dana kepada kelompok tani, terlebih dahulu PPK menyampaikan permintaan LS kepada KPPN Kementerian Keuangan dan kuitansi

harus ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui/disetujui oleh PPK Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dibuat surat perjanjian kerjasama antara PPK dengan kelompok tentang pemanfaatan dana bantuan sosial kelompok tani. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya disampaikan SPM-LS ke KPPN setempat, dan KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk kegiatan belanja bantuan sosial transfer uang yang dananya ditampung pada pos belanja bantuan sosial pada DIPA Pusat dan DIPA dekonsentrasi dan tugas pembantuan provinsi, maka pengajuan dan penyaluran belanja bantuan sosial mengikuti pola tersebut di atas. Namun, penyebutan nama KPA dan PPK dan lainnya disesuaikan dengan Satker tersebut berada.

Prosedur pencairan dana bantuan sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014, antara lain Kelompok tani terpilih berhak menerima dana bantuan sosial melalui transfer ke rekening kelompok dari Bank Pemerintah; Kelompok tani terpilih berhak menggunakan dana bantuan sosial tersebut sesuai dengan RUK yang disetujui oleh PPK; Kelompok tani terpilih berhak menarik uang yang ada di rekening bank secara bertahap sesuai dengan tahapan pengadaan yang akan dilakukan kelompok dan jadwal kegiatan sebagaimana diatur dalam surat perjanjian kerjasama antara PPK dengan kelompok; Besarnya uang pada setiap penarikan dari rekening bank disesuaikan dengan besarnya kebutuhan belanja yang bersangkutan; Proses pengadaan dilakukan dengan didahului survey pasar, survey harga, dan mempelajari jenis/kualitas barang yang akan dibeli; Proses pengadaan barang oleh kelompok tani terpilih dilakukan secara transparan dan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas dari barang yang akan dibeli dan disaksikan oleh tokoh masyarakat atau aparat desa setempat, dan hasil dari pembelian dimanfaatkan oleh kelompok tani terpilih dan dicatat/dibukukan menjadi aset kelompok.

Prosedur pemanfaatan dana bantuan sosial yaitu seluruh transaksi kelompok dibukukan secara sederhana, bukti/kuitansi pembelian disimpan, bukti serah terima hasil pembelian kepada anggota kelompok dibukukan, ketua

kelompok tani terpilih wajib membuat laporan rutin penggunaan dana bantuan sosial kepada PPK, seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik, dana bantuan sosial digunakan untuk usaha produktif yang dilaksanakan dalam tahun berjalan dan usaha produktif tersebut diharapkan dapat memperoleh keuntungan yang memadai dan sebagian dari keuntungan kelompok dimanfaatkan untuk pemupukan modal, memperluas dan memperbesar skala usaha, mengembangkan unit usaha pertanian yang potensial serta memperkuat kelembagaan yang ada.

Hasil kajian pemberdayaan petani melalui pemberian dana bantuan sosial *in cash transfer* kepada kelompok tani dalam rangka optimasi lahan sawah di kabupaten Minahasa, yaitu Pelaksanaan bantuan sosial telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan pedoman teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berkompeten. Dengan adanya bantuan sosial kelompok tani/petani dapat terbantu dalam hal permodalan usaha dalam mengelola usahatani antara lain tersedianya dan meningkatnya penggunaan sarana prasarana pertanian serta meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kemampuan sumber daya manusia petani/pelaku usaha tani.

Bantuan sosial yang diberikan dapat meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengatasi resiko rawan pangan dan resiko kegagalan usahatani. Dengan adanya bantuan tersebut penerima bantuan sosial *in cash transfer* harus dalam kelembagaan kelompok sehingga mempermudah petugas penyuluh lapangan untuk membimbing dan membina petani/kelompok tani dalam mengelola usahatani.

Program bantuan sosial optimasi lahan dapat meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani/kelompok tani. Hal ini sebagai dampak dari terjadinya penambahan luas areal tanam dan IP diatas 2 serta produktifitas meningkat diatas 5 ton/Ha sehingga produksi secara umum memberikan kontribusi peningkatan produksi padi di Kabupaten Minahasa. Program bantuan sosial optimasi lahan meningkatkan kemampuan manajerial kelompok dalam mengelola organisasi kelompok tani sehingga dapat mempertahankan proses produksi maupun meningkatkan produksi padi. Kelompok tani dapat menentukan

sendiri apa yang dibutuhkan dalam pengelolaan usahatani serta dapat meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan sosial *In-Cash Transfer* Kepada Kelompok Tani Dalam Rangka Optimasi Lahan Sawah Di Kabupaten Minahasa dapat memberdayakan kelompok terutama dalam penguatan permodalan, penyediaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemampuan sumber daya manusia serta menanggulangi kemiskinan kelompok dari ketidakmampuan berusahatani sehingga proses produksi pertanian tetap dapat berlangsung; Menguatnya permodalan usaha, tersedia dan meningkatnya penggunaan prasarana dan sarana pertanian, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan; Meningkatnya lapangan kerja dan pendapatan kelompok; Meningkatnya kemampuan kelompok mempertahankan proses produksi pertanian; Meningkatnya produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing produk pertanian; Berkembangnya usaha pertanian dan tercapainya kemandirian pangan; Berkurangnya jumlah penduduk miskin/rawan pangan di perdesaan; Berkembangnya kemandirian petani dalam mempertahankan usaha pertanian.

Pelaksanaan Pemberdayaan Petani Melalui Pemberian Dana Bantuan Sosial *In-Cash Transfer* Kepada Kelompok Tani Dalam Rangka Optimasi Lahan Sawah Di Kabupaten Minahasa, berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. *Output* terealisasinya kegiatan pengembangan optimasi lahan dapat tercapai, meningkatnya indeks pertanaman (IP) dari rata-rata dibawah 2 menjadi diatas 2 dan meningkatnya produktivitas padi sawah dibawah 5 ton/ha menjadi diatas 5 ton/ha.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan kepada petani agar petani dapat lebih meningkatkan produktivitas padi sawah, kepada Pemerintah yaitu pengelolaan penyaluran dan bantuan sosial *in-cash transfer* kepada kelompok tani dalam rangka optimasi lahan sawah di Kabupaten Minahasa agar dapat dilanjutkan.

Program pengembangan optimasi lahan sawah di Kabupaten Minahasa yang diperoleh dari hasil penelitian ini direkomendasikan dapat diterapkan dalam kegiatan pengembangan optimasi lahan sawah di Kabupaten lainnya se- Provinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2014. Pedoman Teknis Pengembangan Optimalisasi Lahan Tahun Anggaran 2014. Direktorat Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. 2014. Jakarta
- Anwas A., 1992. Pengantar Ilmu Pertanian, Rineke Cipta. Jakarta.
- Kementerian Pertanian, 2014. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 129/Permentan/OT.140/12/2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2014.
- Mardikanto, T. 1993. Penyuluhan Pembangunan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta.
- Marshall, C. 2007. Designing Qualitative Research. Sage Publication. London.
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru. UI Press. Jakarta.
- Moleong, L.2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Prijono, O. S dan Pranarka, A.M.W., 1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta.
- Syamsuddin, A., 1995. 90 Tahun Penyuluhan Pertanian di Indonesia (1905-1995), BPLPP Departemen Pertanian, Jakarta.
- Tjandraningsih, I., 1996. Beberapa Catatan Pemberdayaan Buruh Anak, dalam Surya Mulandar : Dehumanisasi Anak Marginal, Berbagai Pengalaman Pemberdayaan. Kerjasama Yayasan Akatiga di Gugus Analisis, Bandung.
- Trimono, S.T. P. 2006. Evaluasi Penyuluhan Pertanian Permasalahan dan Upaya Pemecahannya di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Unpublished. Jakarta.

Perilaku Belajar Siswa Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Manado

Oleh
Lineke Hesmi Wauran¹⁰
Dr. Drs. Markus Kaunang, MSi¹¹
Dr. Very Y. Londa, S.Sos, MSi¹²

Abstract

This research study analyzes the behavior of students in SMPN 8 Manado. The data used in this research is secondary data is data collected from interviews with informants and secondary data is data that is collected through the article, literatur, journals and internet sites). Based on the results of the study, researchers analyzed that study the behavior of the students at SMPN 8 Manado unfavorable. Like truant, did not want to do chores, like storytelling in the classroom, nonchalance cuh to lessons, often ask permission out while studying, and do not obey the rules. The behavior of students in learning, whether it's bad behavior and bad behavior can not be separated from the role and responsibilities of a teacher as an educator. Attitudes and behavior of a student in teaching and learning activities closely related to the role of the teacher in teaching. Bad behavior on the show by some students during the learning process, must be addressed by teachers in the classroom at the time.

Keywords: Behavior, Learning, Student.

PENDAHULUAN

Guru sebagai tenaga pendidik, dengan segala upaya mendidik, membimbing dan mengajar siswa-siswinya agar bisa menjadi siswa yang baik, pandai, dan bermoral. Berkat pendidikan yang diberikan oleh para guru banyak murid yang berprestasi. Mereka mendapat nilai yang baik, mendapat ranking dikelas, mewakili sekolah untuk mengikuti lomba-lomba mata pelajaran, dan bahkan ada yang lulus dengan nilai dan perilaku yang baik pula, dan menjadi siswa teladan. Dilain pihak ada siswa yang mengalami hal buruk dalam belajar. Perilaku yang ditunjukkan dalam kegiatan belajar kurang baik. Tidak mau mengikuti kegiatan belajar, tidak mengerjakan tugas, minat belajar kurang, rasa hormat kepada guru kurang, suka membolos, datang ke sekolah tapi tidak masuk kelas hanya berkeliaran dilingkungan sekolah atau hanya berdiam di kantin

¹⁰ Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

¹¹ Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

¹² Staf Pengajar Pada Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

sekolah sampai jam pelajaran selesai, merokok di dalam kelas, berkelahi, dan ada yang membawa barang tajam. Bahkan ada siswa yang sudah ditangani berulang kali masih saja membuat kasus yang sama. Realitas inilah yang terjadi di SMP Negeri 8 Manado, yang membuat penulis berefleksi dan mencoba mengangkat aspek perilaku sebagai unsur yang penting, yang perlu diperhatikan dalam pendidikan sekolah. Karena itu penulis sebagai peneliti terpanggil untuk meneliti dan membahas tentang Perilaku Belajar Siswa di SMP Negeri 8 Manado.

KAJIAN PUSTAKA

Ada beberapa pengertian tentang perilaku menurut para ahli diantaranya yakni;

1. Petty Cocopio. Menurutnya, perilaku adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, objek atau issue
2. Menurut Soekidjo Notoatmodjo. Menurutnya, Perilaku adalah reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek
3. Heri Purwanto, Perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek tadi.
4. Frederick Herbersz .Sama halnya dengan Maslow, Herbersz dalam studinya juga mengembangkan konsep-konsep motivasi yang mana merupakan penentu utama munculnya motivasi yaitu kondisi tempat kerja, upah kualitas pengawasan dan pengakuan, promosi dan peningkatan profesionalitas (menurut Mallery M Collins terj. Kathleen S.W. 1992).

Sementara itu definisi tentang belajar yakni; (1) Cronbach memberikan definisi ;*Learning is shown by a change in behavior as result of experience.* (2) Harold Spears memberikan batasan; *Learning is to observe, to read, to imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction.* (3) Geoch, mengatakan; *Learning is a change in performance as a result of practice.* Menurut Logan,dkk (1976) dan Tandjung (2001:70) belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang relative menetap sebagai hasil pengamatan dan latihan. Winkel (1997:193) berpendapat bahwa belajar pada manusia dapat dirumuskan sebagai suatu aktivitas mental dan psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan

lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan dan nilai sikap. Irwanto (1997:105) berpendapat bahwa belajar merupakan proses perubahan dari belum mampu sudah mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Menurut Moh. Surya (1981) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan. Slavina (1994:152) mengatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu yang disebabkan oleh pengalaman.

Syaifull Bahri Djamarah, mengemukakan ciri-ciri belajar sebagai berikut: (1) Perubahan yang terjadi secara sadar, (2) Perubahan dalam belajar yang bersifat fungsional, (3) Perubahan dalam belajar yang bersifat positif dan aktif, (4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, (5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, dan (6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku

Perilaku belajar dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas belajar. Belajar sendiri diartikan sebagai perubahan yang secara relative berlangsung lama pada perilaku yang diperoleh kemudian dari pengalaman-pengalaman (Davidoff, 1998:178). Skinner memberikan definisi belajar sebagai sebuah proses adaptasi perilaku yang progresif. Belajar sendiri merupakan suatu proses dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti dan sebagainya, untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang lebih baik secara keseluruhan akibat interaksinya dengan lingkungannya. Dan Syah (2005) mengartikan belajar sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relative menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif.

Diantara ciri-ciri perubahan khas yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting menurut Syah (2005) adalah :

1. Perubahan Intensional. Perubahan yang terjadi dalam proses belajar adalah berkat pengalaman atau praktik yang dilakukan dengan sengaja dan di sadari, atau dengan kata lain bukan kebetulan.
2. Perubahan Positif dan Aktif. Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Adapun perubahan aktif artinya tidak terjadi dengan sendirinya seperti

karena proses kematangan (misalnya, bayi yang bisa merangkak setelah bisa duduk), tetapi karena usaha siswa itu sendiri.

3. Perubahan Efektif dan Fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil guna. Artinya perubahan tersebut membawa pengaruh, makna dan manfaat tertentu bagi siswa.

Menurut Syah (2005: 132), secara global faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni:

1. Faktor Internal Siswa yakni keadaan atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Faktor ini meliputi dua aspek yakni: (a) Fisiologis; Kondisi umum yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. (b) Psikologis; Terdiri dari: Intelegensi, Sikap, Bakat, Minat, dan Motivasi.
2. Faktor Eksternal yakni kondisi lingkungan di sekitar siswa. Faktor ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: (a) Lingkungan Sosial, seperti guru dan teman sekelas, yang dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa sehingga menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar siswa. (b) Lingkungan Non-Sosial, seperti gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan oleh siswa.
3. Faktor Pendekatan Belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran.

Menurut Syah (2005:118) dalam memahami arti belajar dan inti dasar perubahan sikap karena belajar, para ahli sependapat bahwa perilaku belajar diwujudkan dalam Sembilan bentuk, yakni; (1) Kebiasaan.(2) Ketrampilan (3) Pengamatan (4) Berpikir Asosiatif dan Daya ingat, (5) Berpikir Rasional dan Kritis (6) Sikap (attitude) (7) Inhibisi (8) Apresiasi (9) Tingkah laku Afektif.

METODE PENELITIAN

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif . Metode kualitatif yaitu pendekatan dengan cara memandang objek penelitian sebagai suatu sistem, artinya objek kajian dilihat dari satuan yang terdiri dari unsur yang terkait dan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan bagaimana perilaku belajar siswa. Penelitian ini menetapkan objek penelitian adalah Perilaku Belajar Siswa yang mengambil lokasi penelitian di Sekolah Mengengah Pertama (SMP) 8 Manado.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi yang di lakukan, peneliti dapat melihat perilaku belajar siswa pada saat proses belajar mengajar kurang baik. Peneliti melihat perilaku siswa yang tidak patuh kepada guru, tidak mengikuti petunjuk, tidak mengikuti peraturan serta tidak menurut apa yang dikatakan oleh guru dan nasehat guru yang ada di dalam kelas pada saat itu. Keaktifan siswa juga di kelas kurang. Kurang aktifnya siswa di dalam mengikuti proses belajar terlihat pada saat guru melakukan tanya jawab dengan siswa tentang materi, dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa. Tidak banyak siswa yang merespon dengan baik, juga tidak banyak siswa yang bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru tersebut. Dan kalau tidak mengerti dengan apa yang dijelaskan oleh guru ada siswa yang tidak mau bertanya kepada guru tentang materi yang tidak dimengertinya. Mereka bersikap acuh tak acuh. Mengerti tidak mengerti tentang materi pelajaran, mereka diam saja.

Selain itu ada juga siswa yang dalam kegiatan belajar mengajar tidak mendengarkan guru dengan baik. Ada yang melamun, ada yang tidak konsentrasi dalam belajar, ada yang bercerita dengan teman di sebelahnya, ada yang menoleh kanan kiri, ada siswa yang keluar masuk minta izin dengan alasan buang air kecil, ada siswa yang tidak mau mencatat materi yang diberikan oleh guru, ada siswa selama jam pelajaran tidak berpakaian rapi mengeluarkan kemejanya, dan ada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik. Masih

banyak siswa yang tidak mau mengikuti pelajaran, bolos, dan bahkan tidak mau sekolah dalam waktu yang panjang. Sepertinya kegiatan belajar disekolah bukanlah hal yang menarik bagi para siswa. Kesadaran siswa kurang dalam belajar dan mencari tahu tentang sesuatu ilmu. Bahkan ada siswa yang datang ke sekolah hanya sekedar datang saja, tidak tahu buat apa, tidak ada niat untuk belajar, sehingga tidak masuk kelas dan berputar-putar di lingkungan sekolah sampai waktu belajarpun selesai. Perilaku belajar siswa memang belum maksimal. Perilaku-perilaku siswa yang tidak sesuai ini membawa pengaruh pada hasil belajar mereka.

Ada beberapa guru yang mempunyai temperaman yang tidak stabil, tidak dapat menguasai emosinya. Metode yang digunakan oleh para guru sangat monoton, sehingga suasana kelas menjadi kaku. Karena tidak menarik para informan meminta izin, dengan alasan untuk ke kamar kecil, tetapi tidak kembali sampai pelajaran selesai. Akibatnya mereka bolos terus menerus.

Peneliti juga masih melihat dan mendapatkan, ada sebagian anak didik yang menunjukkan perilaku yang baik dalam belajar. Mereka menjadi anak didik yang berprestasi, dan disiplin. Menurut mereka belajar sangat menyenangkan. Peneliti menganalisa bahwa terbentuknya perilaku siswa dalam belajar, baik itu perilaku yang buruk maupun perilaku yang buruk tidak lepas dari peran dan tanggung jawab dari seorang guru sebagai pendidik. Sikap dan perilaku seorang siswa di dalam kegiatan belajar mengajar erat kaitannya dengan peran guru di dalam mengajar. Perilaku buruk yang di tunjukkan oleh sebagian siswa selama proses belajar mengajar, harus dapat diatasi oleh guru yang ada di kelas saat itu.

Di SMP Negeri 8 Manado peran dan tanggung jawab guru sangatlah besar dilihat dari banyaknya jumlah siswa mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Masing-masing guru mempunyai cara tersendiri dalam mendidik dan mengajar para siswa, sebab keberhasilan siswa tidak lepas dari peranan para guru yang mengajar. Dari hasil wawancara dengan informan guru, sebagian besar mengatakan bahwa perilaku siswa yang buruk dalam belajar tidak lepas dari peran guru di dalam kelas. Buruk dan baiknya perilaku siswa dalam belajar, semuanya

itu tergantung pada guru yang mengajar di kelas. Tugas guru pertama-tama harus memperhatikan perilaku setiap siswa yang ada di kelas mengajarnya, sebelum memulai pelajarannya. Guru harus mengetahui latar belakang siswa, serta kemampuan belajar siswa, agar nantinya kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan kemampuan belajar siswa.

Tugas guru selalu berhubungan dengan sumber daya manusia. Aktivitas mengajar guru merupakan suatu aktivitas yang menimbulkan belajar. Guru mendeskripsikan, menerangkan, memberi pertanyaan dan mengevaluasi. Guru juga mendorong, memberikan sanksi hukuman dan ganjaran, dan bujukan. Guru melakukan banyak hal agar siswa mempelajari apa yang menurut pemikiran guru dapat dipelajari dan dimengerti oleh siswa. Guru yang profesional lebih mengetahui apa yang mereka ajarkan, bagaimana mengajarkannya dan siapa yang bisa di beri pelajaran. Guru diberi kesempatan penuh untuk dapat mengelolah kelas sebaik mungkin dan semenarik mungkin agar siswa termotivasi untuk belajar. Model dan pembelajaran juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh guru.

Jika guru berhadapan dengan siswa yang berperilaku buruk dalam kelasnya, guru harus mampu menghadapi anak tersebut, dan tahu bagaimana cara untuk dapat mengatasi masalah anak tersebut. Perilaku buruk yang sering dilakukan oleh siswa yakni sering keluar kelas pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Aktivitas siswa meninggalkan kelas ini untuk pergi ke kamar mandi atau keperluan-keperluan lainnya adalah yang cukup penting yang harus ditanggapi. Karena tidak benar dan tidak adil jika siswa yang bersangkutan harus merasa malu apabila meminta izin ke kamar mandi. Sebagaimana halnya orang dewasa yang merasa segan dan risih apabila harus berterus terang perlu pergi ke toilet. Jika guru mendiskusikan hal tersebut dengan siswa pada awal tahun ajaran baru, maka aktivitas pergi ke toilet tidak akan menjadi gangguan.

Salah satu keluhan terbesar dai para guru pada saat di wawancarai tentang perilaku siswa dalam belajar yakni siswa selalu bercerita di dalam kelas. Siswa selalu ribut disaat kegiatan belajar mengajar. Ada saja yang di buat siswa di kelas untuk rebut, padahal masih ada guru yang mengajar di depan kelas. Berhadapan

dengan situasi itu, Guru selalu memperingati siswa agar tenang. Bahkan ada guru yang berkali-kali memperingati siswa untuk tenang dalam selama pelajaran di kelas. Siswa bukannya mendengarkan guru yang menegur, melainkan mereka tidak mendengarkan peringatan guru tersebut. Perilaku belajar siswa itu kurang baik. Dan masih banyak perilaku buruk siswa yang di lakukan selama proses belajar mengajar berlangsung.

Dari hasil wawancara dengan informan guru, berhadapan dengan perilaku siswa yang buruk dalam belajar, informan mengatakan bahwa perlu ada upaya guru untuk dapat memperbaiki perilaku siswa kearah yang lebih baik. Guru jangan sampai lengah untuk mengawasi siswa-siswa dalam belajar. Penentuan metode dan cara pengelolaan kelas merupakan unsur yang penting juga untuk diperhatikan, agar siswa termotivasi untuk belajar.

Pihak sekolah sebagai suatu sistem yang paling pokok dalam pendidikan, harus selalu memberdayakan para guru, dengan cara mengikutsertakan setiap guru di berbagai diklat pendidikan. Karena guru memegang peranan sentral dalam perkembangan perilaku siswa, maka kompetensi guru perlu di tingkatkan. Peningkatan kompetensi guru dengan cara mengikuti workshop-workshop yang dilakukan oleh dinas pendidikan, mengikuti penataran-penataran dan diklat di bidang pendidikan. Dengan demikian guru sudah mapan dalam mengelolah kelas dan mengajar secara professional

Selain itu juga ada guru yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut informan guru tersebut, ia menambah pendidikannya dengan sekolah untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak lagi. Baginya seorang guru bukan saja hanya tahu mengajar, mendidik dan membimbing tapi juga harus mampu mengembangkan diri di dunia pendidikan. Ia ingin menjadi professional dibidangnya. Itulah yang disebut sebagai guru professional. Peningkatan Sumber daya manusia itu sangat penting. Hampir sebagian dari proses pendidikan sangat tergantung pada peranan pendidik.

Di SMP Negeri 8 Manado, ada beberapa orang yang khusus memperhatikan perkembangan murid masing-masing. Mereka itu adalah guru-guru di bidang *Bimbingan dan Konseling*. Para ahli bimbingan sekolah ini adalah

juga pendidik yaitu guru. Fungsi dan peran mereka lain yaitu bukan mengarahkan murid, melainkan membantu murid dalam mengarahkan dirinya sendiri.

Bimbingan adalah sarana untuk *mengindividualisasikan* pendidikan sekolah yaitu membantu murid-murid menimba manfaat sebanyak mungkin dari pengalaman-pengalamannya di sekolah. Ciri khas dari pelayanan ini terletak dalam hal memberikan bantuan (psikis-psikologis) kepada murid dalam hal membulatkan perkembangannya. Para siswa yang bermasalah dalam perilaku belajarnya, diserahkan kepada guru Bimbingan dan Konseling, untuk membantu murid-murid tersebut dalam mengarahkan dirinya sendiri.

Tujuan dari pemberian bimbingan konseling di sekolah ini adalah supaya setiap murid berkembang sejauh mungkin dan mengambil manfaat sebanyak mungkin dari pengalamannya di sekolah, mengingat ciri-ciri pribadinya dan tuntutan kehidupan dalam masyarakat. Dan dengan adanya Bimbingan dan Konseling di sekolah, diharapkan anak-anak didik yang berperilaku buruk, terbantu untuk dapat berubah ke arah yang lebih baik. Kecenderungan untuk berperilaku buruk, semakin berkurang dengan mendapat bimbingan dari para guru BK.

Kehidupan keluarga selalu mempengaruhi perkembangan budi pekerti setiap anak. Tugas orang tua terhadap anak, *Pertama*, mengurus Keperluan Materi Anak-anak. Tugas pertama dimana orang tua harus memberi makan, tempat perlindungan dan pakaian kepada anak-anak. *Kedua*, menciptakan Suasana "Home" bagi anak-anak. "Home" disini berarti bahwa di dalam keluarga itu anak-anak dapat berkembang dengan subur, merasakan kemesraan, kasih sayang, keramahtamahan, merasa aman, terlindung, dan lain-lain. Dirumahlah anak merasa tentram, tidak pernah kesepian dan selalu gembira. *Ketiga*, tugas pendidikan. Orang tua mendidik dan menuntun anak agar kepribadian terbentuk.

Di SMP Negeri 8 banyak terdapat anak-anak yang bermasalah dalam perilaku belajar. Perubahan perilaku para siswa tersebut dikarenakan dipengaruhi oleh status sosial ekonomi dalam hal ini status pekerjaan orang tua murid. Latar belakang keluarga turut pula membentuk watak dan kebiasaan dari anak didik. Watak itulah yang dibawa sampai disekolah.

Kelihatan sekali bahwa anak yang datang dari keluarga berantakan, dan yang tidak mendapat perhatian dari orang tuanya, sudah pasti kehidupan di sekolah juga menjadi kacau. Tapi bagi anak-anak yang datang dengan latar belakang keluarga yang baik, harmonis, aman dan bahagia, mereka selalu bersikap yang baik. Perilaku dalam belajar selalu baik, menjadi anak-anak didik yang patuh pada guru, dan seperti tidak ada beban dalam belajar. Sehingga mereka ini selalu mengukir prestasi dalam belajar. Disini jelas bahwa latar belakang keluarga sangat berpengaruh bagi perilaku anak. Pembentukan pribadi yang tidak akan terbentuk jika tidak ada kerja sama yang baik dengan orang tua murid.

Saat di cermati perilaku belajar siswa di SMP Negeri 8 Manado, peneliti mengkategorikan perilaku belajar siswa menjadi dua bagian yaitu; Pertama, perilaku belajar siswa yang baik dalam belajar dan Kedua, Perilaku siswa yang buruk dalam belajar. Perilaku belajar siswa yang baik dan perilaku belajar siswa yang buruk dalam belajar, telah diuraikan diatas sesuai dengan hasil penelitian pada siswa. Dan dari hasil penelitian tersebut, peneliti dapat mengemukakan beberapa faktor penyebab kenapa siswa memiliki perilaku buruk dalam belajar. Faktor-faktor tersebut, yakni faktor lingkungan, turut mendorong terjadinya perilaku buruk pada siswa dalam belajar dan faktor pribadi siswa juga menjadi penentu dalam perilaku belajarnya.

PENUTUP

Perilaku belajar yang ditunjukkan oleh sebagian siswa di SMP Negeri 8 Manado kurang baik. Kebiasaan suka membolos, keluar kelas dan tidak balik lagi sampai jam pelajaran selesai, bercerita dengan teman saat kegiatan belajar, melamun disaat belajar, tidak membuat tugas yang diberikan oleh guru, tidak mematuhi peraturan sekolah, bermain hp saat kegiatan belajar mengajar, mengganggu teman saat belajar, dan tertidur di kelas saat pelajaran di mulai, merupakan perilaku- perilaku belajar siswa yang buruk.

Perilaku merupakan suatu perubahan atau aktivitas atau sembarang respon baik itu reksi, tanggapan, jawaban atau balasan yang dilakukan oleh suatu organisme. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sehingga melalui belajar perubahan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seseorang diberbagai bidang yang terjadi akibat melakukan interaksi terus menerus dengan lingkungannya. Ciri-ciri belajar yang meliputi perubahan yang terjadi secara sadar; perubahan dalam belajar bersifat fungsional; perubahan belajar yang bersifat positif dan aktif; perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara; perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah; perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.

Sehingga perilaku belajar sebagai suatu aktivitas mental atau psikis, yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan nilai sikap. Perilaku siswa dalam belajar, ada perilaku yang mendukung pelajaran dan ada perilaku yang menghambat pelajaran. Selain keluarga yang juga turut berperan dalam membentuk perilaku anak, sekolah juga ikut berperan membantu anak didik berkembang menuju perkembangan perilaku yang lebih baik, yang dalam kehidupan perilaku mereka sehari-hari bertindak dan bertingkah laku sesuai dengan usia mereka. Perilaku belajar siswa yang buruk disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor pribadi.

Berdasarkan keseluruhan hasil temuan dalam penelitian ini, maka disarankan sekolah untuk terus menerus memantau secara intensif semua perilaku siswa dalam kegiatan belajar, guru harus mencari upaya apa yang akan dilakukan jika berhadapan dengan siswa yang berperilaku kurang baik dalam belajar, keluarga harus terus bekerja sama dengan sekolah untuk memantau perkembangan anak-anaknya. Keluarga juga harus mendukung apa yang menjadi program sekolah dalam rangka menumbuh-kembangkan perilaku anak kearah yang lebih baik, memberikan kesempatan dan mendampingi anak untuk mengembangkan diri dalam menentukan perilaku belajarnya. Adanya kolaborasi antara sekolah dan keluarga dari setiap peserta didik, secara berkelanjutan. Dengan adanya upaya komunikasi dan kerjasama yang baik antar semua komponen, yakni sekolah, keluarga, guru dan siswa sangat mendukung dalam

mencerdaskan kepribadian anak didik, dan membentuk perilaku yang baik dalam belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Collins, M. Mallary, terj. Wardhani Sri Kathleen, 1992, *Mengubah Perilaku Siswa: Pendekatan Positif*. Gunung Mulia. Jakarta
- Hasibuan, SP Malayu, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- John W, Santrock, 2008, *Analisis Perilaku Terapan dalam Pendidikan: Edisi Kedua: Psikologi Pendidikan*. Kencana. Jakarta.
- Maslow, A.H., 1984. *Motivasi dan Kepribadian, Teori Motivasi dan Rancangan Hirarki Kebutuhan Manusia*, PT. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Mukhtar, Samsu, Rukminim, 2002, *Pendidikan Anak Bangsa Pendidikan Untuk Semua*, PT Nimas Ultima. Jakarta.
- Nasution, S., 1982. *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar dan Mengajar*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Rohman, Arif, 2013. *Memahami Ilmu Pendidikan*, CV Aswaja Pressindo. Yogyakarta.
- Soemanto, Wasty, 1990. *Psikologi Pendidikan: Landasan Kerja Pemimpin dalam Pendidikan*, Renika Cipta. Jakarta.
- Syah, M. 2005. *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, PT. Remaja Rosdakarya Offset. Bandung.
- Syah, M. 2006. *Psikologi Pendidikan*, PT Rega Grafindo Persada. Jakarta.

Partisipasi dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kota Manado

Oleh
Ferdinand Kalesaran¹³
Prof. Dr. Ir. Ventje V. Rantung, MA¹⁴
Dr. Drs. Novi R. Pioh, M.Si¹⁵

Abstract

Participatory development model can be regarded as a form of reaction to management development paradigm or neo-liberalism is closely modeled on the many failures. The purpose of this study was to menganalisis types of community participation in the National Program for Community Empowerment Taas Urban Village District of Manado city Tikala through the stages of planning and decision-making, implementation, utilization and evaluation of activities.

The conclusion of this study is the village community Taas Tikala Manado city districts participate actively in decision-making, implementation, and utilization as well as the maintenance of the results of the activities, but still less involvement in the evaluation. It is recommended that people should take an active part in the evaluation, because at this stage is considered as feedback can provide input for the improvement of the implementation of the program / activity further.

Keywords: Participation, Community Empowerment.

PENDAHULUAN

Model pembangunan partisipatif dapat dikatakan sebagai suatu bentuk reaksi atas manajemen pembangunan yang berparadigma atau bermodelkan neo-liberalisme yang banyak mengalami kegagalan. Kebijakan pembangunan yang seperti ini lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan mengabaikan dimensi sosial-budaya masyarakat. Kebijakan ini biasanya terfokus hanya pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui *Gross National Product* (GNP) yang menekankan pada pertumbuhan dan melihat pembangunan sebagai pembangunan ekonomi, sehingga ukuran keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan produksi barang dan jasa secara nasional. Makin tinggi pertumbuhannya, makin berhasil pembangunan suatu bangsa/negara (Kenny, 1999).

¹³ Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

¹⁴ Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

¹⁵ Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

Berangkat dari kegagalan-kegagalan masa lalu di beberapa negara yang manajemen pembangunannya sangat sentralistik dan memposisikan masyarakat sebagai penerima manfaat pasif, sehingga memunculkan koreksi-koreksi dari banyak ahli yang berpendapat bahwa keberhasilan pembangunan harus melibatkan masyarakat secara aktif. Manusia/masyarakat harus dibangun, diberdayakan dan dilibatkan dalam perencanaan-perencanaan pembangunan secara partisipatif. Konsep partisipasi dalam pembangunan di masyarakat Indonesia sendiri bukanlah hal yang baru didengungkan. Partisipasi itu sendiri tidak lebih sebagai upaya pihak pemerintah untuk memobilisasi masyarakat dalam melaksanakan dan menyukseskan kebijakan yang telah mereka buat. Contohnya, masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan melalui membayar pajak dan bergotong-royong untuk pembangunan yang telah ditetapkan dari atas, dan lain-lain.

Partisipasi yang sebenarnya diharapkan agar tujuan pembangunan di masyarakat boleh berhasil, maka program perencanaan, pelaksanaan kegiatan, bahkan monitoring dan evaluasi serta pemeliharaan hasil pembangunan benar-benar melibatkan masyarakat. Alasan logisnya, karena merekalah yang paling tahu akan permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Konteks di atas mengandung pengertian partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pada masyarakat turut serta dalam melaksanakan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun harus dilibatkan sejak awal dalam perencanaan pembangunan di lingkungannya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-Mandiri Perkotaan) lahir dari semangat *community Empowerment* (pemberdayaan masyarakat), di mana partisipasi masyarakat menjadi konsekwensi logis dalam program. Artinya bahwa keterlibatan masyarakat banyak sangat diharapkan dalam program ini, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pemeliharaan serta pengembangan hasil-hasil kegiatan.

Fenomena yang terjadi di masyarakat awal masuknya PNPM-Mandiri Perkotaan disambut dengan antusias yang sangat tinggi, sehingga masyarakat turut terlibat/berpartisipasi dalam setiap tahapan program mulai dari kegiatan

sosialisasi, indentifikasi, perencanaan serta pelaksanaan kegiatan. Seiring dengan waktu, khususnya di Sulawesi Utara, sampai sekarang telah memasuki tahun ke-11, nampak animo masyarakat mulai menurun untuk terlibat langsung dalam setiap tahapan sebagaimana aturan program. Banyak masyarakat yang dulunya memiliki animo yang besar dan selalu terlibat dalam segala tahapan mulai mengendur. Fenomana lain, nampak bahwa keikutsertaan masyarakat dalam program, terutama mereka yang tergolong dalam masyarakat miskin lebih cenderung hanya untuk mengakses bantuan dana dari pemerintah lewat program ini. Padahal, tujuan sebenarnya adalah kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan, sedangkan dana bantuan berupa uang ataupun bahan hanyalah merupakan stimulan (Pedoman Umum P2KP-3, 2005).

Indikasi lain dalam program PNPM Mandiri Perkotaan adalah partisipasi masyarakat dalam rangka pemeliharaan hasil-hasil kegiatan. Begitu antusiasnya masyarakat ketika menerima program dan merencanakan serta melaksanakan, namun setelah selesai kegiatan dan dimanfaatkan, masyarakat tidak memelihara atau merawatnya. Kegiatan yang dibiayai oleh program tak dapat bertahan lama dan cenderung dibiarkan. Padahal dalam tahap awal identifikasi masalah, masyarakat sepakat untuk membangun dan menjaga atau merawat hasil-hasil kegiatan. Beberapa fenomena ini menimbulkan minat dan mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang Partisipasi dalam PNPM-Mandiri Perkotaan Kelurahan Taas Kecamatan Tikala Kota Manado. Kata partisipasi yang dimaksudkan dalam judul penelitian ini adalah partisipasi masyarakat, dan tujuan penelitian untuk mengenali jenis-jenis partisipasi masyarakat dalam PNPM-Mandiri Perkotaan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian partisipasi masyarakat dalam Kamus Tata Ruang (1998), adalah keterlibatan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai subyek dan obyek pembangunan; keterlibatan dalam tahap pembangunan ini dimulai sejak tahap perencanaan sampai dengan pengawasan berikut segala hak dan tanggung jawabnya. Akhir-akhir ini banyak studi yang secara khusus

mendalami konsep partisipasi yang terfokus pada kajian pengembangan masyarakat. Menurut Warner (dalam Adiyoso, 2009), berkembangnya kajian partisipasi masyarakat ini telah menarik perhatian dunia ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan konferensi Internasional tahun 1992 dengan Agenda 21 di Rio de Janeiro yang mengembangkan program aksi untuk pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development*. Program tersebut menitikberatkan pada konsultasi, akuntabilitas dan sumber daya. Gagasan tentang partisipasi masyarakat terus meningkat karena masyarakat di seluruh dunia menuntut hak untuk terlibat dalam proses pembangunan. Kebijakan dan praktek mengenai pemerintahan yang baik harus dilakukan, tidak hanya sekedar memastikan efektivitas pencapaian perekonomian, tapi juga harus menciptakan kesejahteraan manusia dan kesetaraan.

Peran serta masyarakat juga berhubungan dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Abe (2002), berpendapat bahwa peran serta masyarakat adalah hak bukan kewajiban. Hal itu sudah dinyatakan dalam deklarasi PBB mengenai hak asasi manusia (Bab 21), bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berperan serta dalam urusan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sama halnya dengan pendapat Kelly (2001), bahwa peran serta adalah serangkaian proses di mana masyarakat lokal dilibatkan dan berperan dalam isu yang berhubungan dengan mereka. Sampai di mana kekuasaan dibagi dalam pengambilan keputusan, tergantung jenis partisipasi tersebut.

Tujuan partisipasi masyarakat dapat berubah setiap waktu, tergantung lingkungannya. Menurut Kelly (dalam Adiyoso, 2009), awalnya partisipasi bertujuan untuk memberi kekuasaan kepada masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan di negara sedang berkembang. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi hidup masyarakat memaksa mereka untuk memainkan peran penting dalam pembangunan (Soetomo 2006). Sanoff (2000) berpendapat bahwa tujuan utama partisipasi adalah melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memberikan hak suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong dan melibatkan masyarakat serta menyatukan tujuan.

Pretty dalam Abiyoso (2009) membuat tipologi partisipasi dalam tujuh tingkatan berbeda, mulai dari partisipasi pasif ke mobilisasi sebagai berikut:

1. Partisipasi pasif. Masyarakat berpartisipasi melalui pesan yang disampaikan tentang apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Penyampaian pesan ini adalah sepihak oleh administrator atau pemimpin proyek tanpa mendengar tanggapan masyarakat. Informasi yang dibagikan hanya menjadi milik profesional luar (bukan masyarakat).
2. Partisipasi informatif. Masyarakat berpartisipasi dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan menggunakan pertanyaan survey atau pendekatan serupa. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam proses, seperti temuan riset yang tidak bisa dibagi atau dicek kebenarannya.
3. Partisipasi melalui konsultasi. Masyarakat berpartisipasi dengan dikonsultasikan dan orang luar mendengar pendapat mereka. Profesional luar ini mendefinisikan problem dan solusinya, dan memodifikasi sesuai dengan respon masyarakat. Proses konsultasi ini tidak melibatkan dalam pembuatan keputusan, dan profesional luar tidak berkewajiban menampung aspirasi masyarakat.
4. Partisipasi karena insentif material. Masyarakat berpartisipasi dengan memberi sumberdaya seperti tenaga sebagai imbalan makanan, uang atau bentuk insentif lain. Pendekatan ini banyak digunakan dalam pengelolaan lahan pertanian termasuk dalam kategori ini, petani menyediakan lahan tetapi tidak terlibat dalam proses eksperimen dan pembelajaran. Peran serta seperti ini biasa terlihat tapi penduduk tidak punya kepentingan lagi untuk memperpanjang aktifitas ini begitu insentifnya habis.
5. Partisipasi fungsional. Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk memenuhi tujuan yang berkaitan dengan proyek, atau menginisiasi organisasi sosial dari luar. Keterlibatan seperti ini cenderung tidak terjadi pada tahap awal siklus proyek atau perencanaan tapi setelah keputusan besar dibuat. Keterlibatan seperti ini cenderung tergantung pada fasilitator dan orang luar, walaupun mungkin nantinya bisa berubah menjadi mandiri.

6. Partisipasi interaktif. Masyarakat berpartisipasi melalui pengamatan bersama, yang ditujukan pada penyusunan rencana kerja dan pembentukan organisasi lokal yang baru atau memperkuat lembaga yang ada. Ini cenderung melibatkan metodologi antar disiplin ilmu yang berasal dari berbagai perspektif dan mempergunakan proses pembejaraan sistematis dan terstruktur. Kelompok ini mengambil kendali atas keputusan, sehingga masyarakat dapat mempertahankan struktur-struktur atau praktek-prakteknya.
7. Mobilisasi diri. Masyarakat berpartisipasi dengan berinisiatif tanpa ketergantungan pada lembaga luar untuk mengubah sistem. Mereka mengembangkan kontak dengan institusi luar untuk sumberdaya dan saran-saran yang mereka perlukan tapi tetap mempertahankan kontrol atas penggunaan sumber daya tersebut. Mobilisasi dan cara kerja kolektif seperti ini dapat atau tidak menyelesaikan ketimpangan distribusi baik terhadap kekayaan dan kekuasaan yang ada.

Lebih lanjut Cohen dan Uphoff (1977) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu:

1. *Participation in Decision Making* (partisipasi dalam pengambilan keputusan)
2. *Participation in Implementation* (Partisipasi dalam pelaksanaan)
3. *Participation in Benefits* (Partisipasi dalam pengambilan manfaat)
4. *Participation in Evaluation* (Partisipasi dalam evaluasi).

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik

yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menerima hasil pembangunan tergantung pada distribusi maksimal suatu hasil pembangunan yang dinikmati atau dirasakan masyarakat, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Bentuk partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya.

METODE PENELITIAN

- Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang dipilih karena permasalahannya belum jelas, masih remang-remang, bahkan malah masih gelap, dinamis, kompleks, holistik dan penuh makna, Sugiyono (2010). Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1990), mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang diperoleh adalah data primer yang bersumber dari wawancara kepada 14 orang informan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan PNPM Mandiri Perkotaan yaitu, Lurah, Kepala Lingkungan, dan anggota masyarakat kelurahan Taas, serta fasilitator pendamping tingkat kota Manado. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan-laporan resmi yang berasal dari berbagai sumber, seperti: kantor lurah maupun dari kantor Koordinator Kota PNMP Mandiri Perkotaan kota Manado. Adapun aktivitas dalam analisis data pada penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum PNPM Mandiri Perkotaan dalam implementasinya yaitu Peraturan Presiden nomor.13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, 2010). Pelaksanaan program ini mengharapkan seluruh elemen masyarakat dapat terlibat dan mengambil bagian secara partisipatif dalam setiap tahapan siklus mulai dari tahap pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil dan pemeliharannya, serta evaluasi. Partisipasi masyarakat jika tidak ada, maka program ini tidak akan berjalan dengan semestinya, karena setiap tahapan siklus harus dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan didampingi para fasilitator kelurahan. Sesuai konteks ini, menurut Suparman dan Soerjono (1980), partisipasi masyarakat adalah sebagai keinginan kemauan, keikutsertaan, kesanggupan, kesadaran dari setiap warga masyarakat untuk melaksanakan usaha-usaha pembangunan guna tercapainya tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah merupakan suatu proses, oleh karena itu pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara terus menerus, artinya bahwa dalam pembangunan itu partisipasi masyarakat akan berbarengan dengan proses itu sendiri.

Implementasi program PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dalam suatu proses yang relatif panjang yaitu lewat tahapan siklus. Tahapan siklus tersebut dapat dirangkum menjadi siklus identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil-hasil kegiatan dan monitoring-evaluasi. Sejalan dengan itu, Cohen dan Uphoff (1977) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu *Participation in Decision Making* (partisipasi dalam pengambilan keputusan), *Participation in Implementation* (Partisipasi dalam pelaksanaan), *Participation in Benefits* (Partisipasi dalam pengambilan manfaat), *Participation in Evaluation* (Partisipasi dalam evaluasi).

1. *Participation in Decision Making* (partisipasi dalam pengambilan keputusan).

Implementasi program PNPM Mandiri Perkotaan sangat sejalan dengan pendapat Cohen dan Uphoff (1977). Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat

berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dikemukakan sebelumnya bahwa berdasarkan Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah salah satu program pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Bentuk intervensinya adalah melalui tahapan siklus yang harus dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dengan dibantu secara teknis oleh fasilitator yang direkrut oleh pemerintah, bukan sebagai pelaksana, tetapi sebagai tenaga pendamping.

Tahapan siklus tersebut diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat mulai dari tingkat basis di lingkungan. Setelah diperkirakan sebagian masyarakat telah mengetahui tentang program ini, maka diadakanlah pertemuan di tingkat kelurahan yang dinamakan dengan Rembuk Kesiapan Masyarakat (RKM). Siklus RKM, masyarakat bermusyawarah untuk memutuskan apakah menerima atau menolak program ini yang dikuatkan dengan berita acara. Jika masyarakat menerima, maka konsekwensinya adalah menyiapkan relawan untuk mengawal proses-proses selanjutnya. Proses inilah awal terjadinya apa yang disebut oleh Cohen dan Uphoff sebagai *Participation in Decision Making* (partisipasi dalam pengambilan keputusan). Partisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut tidak hanya terjadi pada proses RKM, namun sebagaimana pendapat dari Soeparman dan Soerjono (1980) di atas bahwa partisipasi masyarakat akan berbarengan dengan proses pembangunan itu sendiri. Tahapan siklus-siklus selanjutnya masyarakat terus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan seperti menyepakati tentang masalah-masalah kemiskinan yang ada di lingkungannya, siapa yang tergolong miskin, menyepakati yang menjadi prioritas pembangunan, dan lain-lain.

Menurut data yang ada dengan dilengkapi wawancara dari beberapa informan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini sangat tinggi. Masyarakat sangat aktif, terutama pada tahun-tahun

pertama masuknya program, untuk mengikuti setiap pertemuan atau rembuk yang ada dan terutama kaum perempuan. Masyarakat sangat antusias menyampaikan pendapat-pendapatnya, dan usulan-usulan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka membangun lingkungan dan kelurahannya. Semua usulan yang disampaikan oleh masyarakat didokumentasikan dan selanjutnya dibentuk tim Perencanaan Partisipatif yang disepakati dari masyarakat itu sendiri untuk menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis) di tingkat kelurahan. Dokumen PJM-Pronangkis ini kemudian ditetapkan atau disahkan oleh kepala kelurahan dan akan menjadi acuan masyarakat lewat LKM dalam membuat kegiatan atau pembangunan yang ada di kelurahan.

Menariknya dalam program PNPM Mandiri Perkotaan ini dana BLM tidak dibagi rata di tiap-tiap lingkungan, namun berdasarkan skala prioritas yang diputuskan secara bersama-sama. Skala prioritas tersebut didasarkan pada faktor kemendesakan untuk dikerjakan atau dibangun, karena dana BLM per tahunnya hanya terbatas. Faktor kemendesakan yang menjadi pertimbangan karena antara lain, jika tidak dikerjakan atau dibangun segera, mungkin dapat membahayakan masyarakat sekitar, pemanfaatnya banyak warga miskin, dan lain-lain. Kebijakan itu memungkinkan ada lingkungan yang tidak mendapatkan porsi pembangunan, namun hal tersebut diputuskan oleh masyarakat secara bersama-sama atas dasar musyawarah dan mufakat dengan didasarkan rasa kebersamaan.

2. *Participation in Implementation* (partisipasi dalam pelaksanaan)

Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dan dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan adalah dengan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan bersama lewat KSM. KSM menjadi pelaksana kegiatan mulai dari penyusunan proposal kegiatan, pelaksanaan sampai pada membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan.

Masyarakat pada umumnya berpartisipasi dengan memberikan bantuan tenaga kerja secara sukarela, material, konsumsi dan lain-lain.

Masyarakat tidak hanya dituntut untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan suatu rencana kegiatan pembangunan, tetapi juga dituntut untuk ikut serta dalam pelaksanaan, sehingga kegiatan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Masyarakat sebagai sumber pembangunan selain sebagai target pembangunan juga sebagai sumber pelaksana pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan menurut Pretty (1995) seharusnya lebih menekankan kepada kemauan sendiri secara sadar/mobilisasi diri untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas pembangunan. Semua potensi manusia (tenaga kasar dan trampil serta dana) diarahkan bagi pelaksanaan pembangunan baik melalui swadaya gotong royong maupun sumbangan sukarela. Masyarakat sebagai salah satu unsur pelaksana pembangunan harus bertanggung jawab dalam aktivitas pelaksanaan pembangunan dengan jalan mengerahkan dukungan tenaga, keterampilan, dana serta fasilitas bagi program pembangunan yang telah ditetapkan dan menciptakan suasana kerjasama dengan pelaksana pembangunan lainnya. Pengerahan yang optimal dari potensi masyarakat bagi kepentingan pelaksanaan program perlu digali, dipelihara dan dikembangkan sehingga mampu menciptakan suasana kemasyarakatan yang mendukung pembangunan serta terwujudnya aktivitas yang kondusif dalam pelaksanaannya.

Wawancara kepada masyarakat ditemukan bahwa masyarakat sendirilah sebagai pelaksana kegiatan lewat KSM yang telah dibentuk dan disepakati bersama-sama. KSM menjadi penanggung jawab pelaksanaan sekaligus yang mengorganisir masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pelaksanaan pekerjaan atau pembangunannya. Masyarakat sendiri merasa bertanggung jawab untuk membantu dan terlibat dalam pekerjaan, meskipun mereka tidak mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Mereka bersama-sama bahu-membahu dalam membantu pekerjaan agar dapat cepat diselesaikan, sebagaimana pengakuan seorang ibu yang diwawancarai bahwa dia melakukan semuanya dengan ikhlas. Semuanya dilakukan bersama anggota masyarakat yang lain, karena dari awal mengetahui persis bahwa dalam program ini dana BLM

hanya merupakan rangsangan bagi masyarakat untuk berswadaya. Hasil dari pembangunan akan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri, sebagaimana dikatakan oleh Ife dan Tesoriero (2008), apabila yang dikerjakan yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka anggota masyarakat akan ikut berpartisipasi.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan juga terdorong oleh rasa keprihatinan dan rasa tanggungjawab antar sesama masyarakat, di mana ada sebagian masyarakat yang sangat minim akses infrastruktur seperti air bersih, jalan dan sebagainya. Mengacu dari apa yang dikatakan informan JD bahwa sebelum dibangun jalan setapak dan talud penahan longsor, akses jalan bagi masyarakat sekitar sangat tidak layak. Menurutnya sudah ada beberapa anggota masyarakat yang sering mengalami kecelakaan ketika melintasi jalan tersebut karena berada di pinggir tebing dan licin jika hujan turun. Senada dengan JD, informan NM juga mengatakan bahwa sebelum dibangun jalan setapak, kondisi jalan yang dilalui masyarakat sangat memprihatinkan dan sangat berbahaya terutama jika turun hujan atau dilalui pada malam hari karena gelap. Lokasi itu juga merupakan daerah rawan longsor, dan sudah ada rumah yang terbawa longsor, namun tidak ada korban jiwa karena telah dikosongkan sebelumnya. Setelah dibangun jalan setapak dan talud penahan longsor maka untuk melintasi jalan tersebut sudah relatif aman dan bahaya longsor sudah dapat diminimalisir. Konteks ini sesuai dengan apa yang dikatakan Spencer (1989), bahwa di dalam partisipasi ada unsur tanggung jawab, dalam partisipasi sesungguhnya merupakan keterlibatan mental dan perasaan lebih dari pada hanya semata-mata keterlibatan jasmani. Di sini partisipasi masyarakat muncul karena merasa sepenanggungan dengan masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggalnya.

3. *Participation in Benefits* (partisipasi dalam pengambilan manfaat)

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari prosentase keberhasilan program. Cohen dan Uphoff (1977) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menerima hasil pembangunan tergantung pada

distribusi maksimal suatu hasil pembangunan yang dinikmati atau dirasakan masyarakat, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Selanjutnya Ndraha (1983) mengatakan bahwa partisipasi dalam menerima hasil pembangunan berarti: menerima setiap hasil pembangunan seolah-olah milik sendiri; menggunakan atau memanfaatkan setiap hasil pembangunan; mengusahakan; merawat, memelihara secara rutin dan sistematis, tidak dibiarkan rusak dengan anggapan bahwa kelak tidak ada bantuan pemerintah untuk pembangunan yang baru.

Program PNPM Mandiri Perkotaan berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan menyebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai dari dana BLM, lebih khusus kegiatan lingkungan (infrastruktur) harus memiliki ketahanan sampai dengan minimal 3 tahun. Membangun KSM sebagai pelaksana kegiatan di dalamnya harus dilengkapi dengan unsur operasional dan pemeliharaan. Unsur ini dalam KSM yang nantinya akan menjamin bahwa daya tahan hasil kegiatan yang dibangun dapat dimanfaatkan dalam waktu yang panjang dengan mengorganisir masyarakat dalam mengoperasikan hasil kegiatan maupun memelihara atau merawatnya. Penelitian yang dilakukan didapatkan ternyata partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil kegiatan atau pembangunan belum maksimal. Kenyataan masyarakat sangat antusias dalam menerima program, karena mengetahui akan ada bantuan yang akan diberikan di kelurahan untuk pembangunan, namun dalam pemeliharaannya masih ada hasil kegiatan yang terabaikan. Sebagian kegiatan yang telah selesai dibangun dimanfaatkan oleh masyarakat, namun tidak diikuti dengan pemeliharaannya dan dibiarkan menjadi rusak. Sebagian besar hasil pembangun di kelurahan Taas, tetap terpelihara dengan baik misalnya air bersih, masyarakat pemanfaat membuat aturan bersama guna terus melestarikan hasil pembangunan tersebut. Aturan bersama yang dibuat adalah setiap pemanfaat membayar iuran yang disepakati untuk membiayai operasional dan pemeliharaannya. Begitu pula dengan pinjaman dana bergulir, masyarakat terus merawat kepercayaan yang telah diberikan LKM sehingga tingkat pengembaliannya 100 persen.

Pemanfaatan dan pemeliharaan hasil kegiatan berdasarkan wawancara yang dapat dirangkum ada juga kendala-kendalanya, baik yang bersifat teknis, maupun yang semata-mata masyarakat pemanfaat kurang peduli pada fasilitas yang telah dibangun. Aspek teknis terjadi misalnya, dalam pengelolaan air bersih tidak berjalan dikarenakan jaringan sumber listrik yang bermasalah, maupun kerusakan. Hasil wawancara ditemukan bahwa telah dilakukan fasilitasi oleh LKM dan kepala lingkungan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Lingkungan 1 misalnya, telah ada keluarga yang bersedia menalangi kendala dana untuk penambahan daya listrik dan akan diganti melalui pengelolaan iuran kelompok pengguna jika telah mencukupi. Permasalahan kerusakan mesin dilingkungan 5 telah disepakati oleh LKM untuk mengalokasikan dana pengadaan mesin baru di BLM tahun 2016.

4. *Participation in Evaluation* (Partisipasi dalam evaluasi).

Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Bentuk partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan program/kegiatan selanjutnya. Partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan sangat penting dan dibutuhkan dalam menjamin keberhasilan tujuan pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dapat diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang bersifat preventif dan represif terhadap program pembangunan yang dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan itu sendiri.

Evaluasi dari Cohen dan Uphoff dalam implementasi program PNPM Mandiri Perkotaan secara jelas berada pada siklus tinjauan partisipatif dan Rembuk Warga Tahunan (RWT). Setiap akhir tahun, memasuki triwulan empat dalam program PNPM Mandiri Perkotaan berdasarkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan tersebut berupa

tinjauan partisipatif untuk sekurang-kurangnya tiga hal yaitu: tinjauan program, tinjauan keuangan dan tinjauan kelembagaan. Tahapan siklus ini masyarakat bersama-sama panita tinjauan partisipatif yang dibentuk melakukan refleksi bersama untuk melihat program-program yang telah direncanakan lewat rencana tahunan (renta).

Inti dari pada tinjauan program ini masyarakat mengevaluasi rencana program tahun berjalan yang berhasil dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan. Program yang belum dilaksanakan apakah perlu diprogramkan kembali pada tahun berikut dengan dana BLM atau diusulkan masuk ke Musrenbang, atau dimitrakan dengan pihak luar, dan sebagainya. Tinjauan keuangan lebih difokuskan pada pengelolaan keuangan biaya operasional dan pembukuan yang dikelola oleh sekretariat LKM, keuangan pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh UPK-LKM dan hasil audit independen terhadap LKM. Begitu juga kelembagaan yang telah dibangun masyarakat yaitu LKM ditinjau menyangkut keaktifan keanggotaan yang telah disepakati dan dipilih langsung oleh masyarakat.

Rembuk Warga Tahunan (RWT) dilaksanakan setiap akhir tahun program dan biasanya jatuh pada bulan desember pada tahun berjalan. Pelaksanaan RWT tersebut di mana LKM menyampaikan hasil tinjauan partisipatif yang telah dilakukan oleh panitia yang telah dibentuk bersama masyarakat. Kesempatan inilah terjadi evaluasi oleh masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, keberhasilan, kendala, dan sebagainya. Kegiatan RWT dilakukan dengan cara LKM mengundang seluruh komponen masyarakat untuk mendengarkan hasil tinjauan partisipatif tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sekaligus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Hasil penelitian, setiap tahunnya LKM melaksanakan RWT di akhir tahun sesuai dengan ketentuan dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Mengacu dari data kehadiran yang ditemui jumlah kehadiran masyarakat tidak signifikan, padahal menurut koordinator LKM, mereka telah menjalankan undangan kepada masyarakat melalui surat yang turut diketahui dan

ditandatangani pemerintah kelurahan. Hasil wawancara dengan beberapa anggota masyarakat, mereka merasa tidak perlu hadir dalam rapat karena antara lain, percaya kepada koordinator LKM sebagai tokoh masyarakat yang baik dan dipercaya. Selain itu, beberapa anggota masyarakat mengatakan tak punya waktu mengikuti rapat, capek bekerja dan tidak memiliki kapasitas ikut dalam rapat.

Pelaksanaan pada tahapan ini seperti yang dikatakan Pretty (1995), dalam tipologi jenjang partisipasinya belum memenuhi syarat yang diharapkan. Menurut Pretty ada tujuh tingkatan yang berbeda dalam partisipasi masyarakat mulai dari tingkatan partisipasi yang paling rendah yaitu partisipasi pasif ke tingkatan partisipasi yang paling tinggi yaitu mobilisasi. Mobilisasi yang dimaksud di sini adalah, bagaimana masyarakat berpartisipasi dengan berinisiatif tanpa ketergantungan pada lembaga luar untuk mengubah sistem. Masyarakat secara sadar bersama-sama menjalankan pembangunan dan sekaligus melakukan evaluasi atau kontrol dalam proses pelaksanaannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat tinggi. Proses pengambilan keputusan adalah melalui tahapan siklus Rembuk Kesiapan Masyarakat (RKM), refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembangunan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), perencanaan partisipatif dan penentuan skala prioritas kegiatan. Masyarakat ditempatkan sebagai subyek pembangunan, di mana masyarakat sendiri yang melaksanakan kegiatan mulai dari tahapan identifikasi, perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), monitoring dan evaluasi kegiatan. Diorganisir Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bersama-sama dalam melaksanakan pekerjaan dengan bergotong royong. Hasil kegiatan telah dimanfaatkan dan dirawat atau dipelihara dengan membuat aturan yang disepakati bersama. Ada beberapa hasil kegiatan tidak dimanfaatkan secara maksimal dan tidak terpelihara. Sebagian masyarakat hanya mau menerima manfaat hasil kegiatan namun tidak peduli merawat atau memelihara. Setiap akhir

tahun pelaksanaan kegiatan dievaluasi dalam tahapan siklus tinjauan partisipatif dan diakhiri dengan Rembuk Warga Tahunan (RWT). Partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi kegiatan tingkat kehadiran rendah, dikarenakan berbagai hal seperti kesibukan, tak punya waktu, merasa diri tidak punya kapasitas, percaya kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat, dan lain lain.

Didasarkan pada simpulan di atas, maka disarankan agar model pengambilan keputusan dalam PNPM Mandiri Perkotaan perlu diadopsi oleh pemerintah dalam pembangunan kelurahan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pengambilan keputusan tidak boleh hanya dilakukan oleh sebagian elit kelurahan, tetapi perlu dilakukan rembuk-rembuk khusus untuk masyarakat miskin dan kaum perempuan agar bisa mengakomodir kepentingan mereka. Pemerintah kota perlu membuat program dan mengalokasikan dana untuk merangsang kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat yang mendorong pelestarian budaya gotong royong dalam pembangunan kelurahan. Rasa memiliki terhadap hasil-hasil kegiatan harus terus dibangun bersama masyarakat agar dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara maksimal. Aturan pemanfaatan menyangkut hak dan kewajiban harus disepakati bersama sejak awal dimulainya kegiatan. Selanjutnya, pemerintah kelurahan bersama LKM perlu mengsosialisasikan secara intens tentang pentingnya masyarakat terlibat dalam evaluasi kegiatan untuk kepentingan pembangunan ke depan. Pelaksanaan rembuk evaluasi kegiatan harus mempertimbangkan waktu luang masyarakat, agar pelaksanaannya lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, Wignyo, 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. ITS Press, Surabaya.
- Cohen, J.M, and N.T. Uphoff. 1977. *Rural Development Participation*. Ithaca, New York.
- Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2010. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*.

- Ife, Jim dan Tesoreiro, Frank. 2008. *Community Development: Alternative Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ndaraha, Taliziduhu. 1983. *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Di Beberapa Desa*. Yayasan Karya Dharma, IIP, Jakarta.
- Sanoff, H. 2000. *Community Participation Methods in Design and Planning*. John Wiley & Sons, Inc., Brisbane.
- Soetomo, 2006. *Stretegi-strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Spencer, L.J. 1989. *Winning Through Participation*. Kendal Hunt Publishing Company, USA.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung.

Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada Sektor Pendidikan Di Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika Provinsi Papua

Oleh
Gerson Wakerkwa¹⁶
Dr. Drs. Riane J. Pio, MSi¹⁷
Dr. Daud F. Liando, SIP, MSi¹⁸

Abstract

Empowerment of rural communities in the education sector is the policy of national community empowerment program implemented by the government incessantly , especially in rural communities various sectors . Reality shows in the implementation of the program in the district of Kuala Kencana Pemberdayaan optimally yet felt by the villagers .

By using qualitative descriptive approach was found that the cause of empowerment of rural communities in the education sector in the district of Kuala Kencana less than optimal due to lack of awareness of the importance of education , and the awareness of parents to send children still lacking because of the constraints of social status and economic factors of society . Empowerment requires educators who are able , followed by infrastructure , the availability and the need to implement programs for the empowerment of the education sector in accordance with the aspirations of the community to develop the potential that exists.

Keywords : Empowerment , Community , Education .

PENDAHULUAN

Mengacu pada berbagai program pemberdayaan masyarakat desa telah menjadi isu sentral pemerintah baik di pusat maupun daerah, pemberdayaan masyarakat dengan berbagai istilah yang dipakai oleh satuan kerja pemerintah daerah yang diterapkan di setiap provinsi dan daerah kabupaten/kota. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam rangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sudut pandang penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang, peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan pengembangan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta

¹⁶ Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

¹⁷ Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

¹⁸ Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

pengembangan kelembagaan di daerah, dan perlindungan melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan serta memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara melalui pembinaan, serta penyuluhan terpandu.

Dalam program pemberdayaan masyarakat yang menjamin tercapainya hasil yang baik, yaitu : (1). Penysadaran, (2). Pengorganisasian, (3). Kaderisasi pendampingan, (4). Dukungan teknis, (5). Pengelolaan sistem. Andanya upaya kekuatan dalam diri masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal yang mengarahkan pada pembentukan sikap, perilaku karakter, serta pengetahuan cukup. Dalam mencapai strategi pemberdayaan maka perlu teknik kajian parsitipatif. Teknik identifikasi kebutuhan masyarakat desa dan stratifikasi pemanfaatan sumber daya mobilitas penduduk.

Perencanaan pembangunan yang tidak memperhatikan semua aspek dari pembangunan adalah perencanaan yang bersifat perencanaan dari atas ke bawah, dimana pendekatan seperti itu hanya menjadikan masyarakat sebagai sasaran pembangunan objek bukan sebagai pelaku pembangunan subjek. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabat manusia secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Pemberdayaan masyarakat terutama di perdesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau memberikan modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi serta memperbaiki empat akses yaitu: (1) Akses terhadap sumberdaya; (2) Akses terhadap teknologi; (3) Akses terhadap pasar; (4) Akses terhadap sumber pembiayaan. Keempat akses ini, menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memfasilisasinya, juga berpartisipasi berperan aktif dari kelompok-kelompok

masyarakat di desa untuk membentuk usaha bersama atas kepentingan bersama pula yang diselenggarakan secara kekeluargaan.

Tetapi kenyataan dalam pemberdayaan masyarakat jauh dari harapan masyarakat menunjukan bahwa praktek pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sering kali jauh meleset dari konsepnya. Pemberdayaan menjadi lebih memperdayai upaya kemandirian masyarakat justru lebih cenderung melestarikan ketergantungan masyarakat kepada beragam bentuk bantuan baik bantuan melalui pemerintah daerah dan pihak ketiga, ironisnya program pemberdayaan tidak sedikit yang dijadikan ladang manipulasi/korupsi dan membawa kepada arena politik sebagai program janji tidak di realitasi di masyarakat pedesaan.

KAJIAN PUSTAKA

Dalam memberikan defenisi pemberdayaan dikemukakan pendapat menurut Suharto (2005:57), pemberdayaan atau pemberkuatan *empowerment* berasal dari kata '*Power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan sering kali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol.

Dalam pengertian yang diberikan terhadap pemberdayaan, jelas dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah proses pemberian dan atau optimasi daya yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, baik daya pengertian "kemampuan dan keberanian" maupun daya dalam arti "kekuatan atau posisi tawar". Dalam praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh banyak pihak, seringkali terbatas pada pemberdayaan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan atau penanggulangan kemiskinan. Karena itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat selalu dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk peningkatan pendapat.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2012 :161,162). Dijelaskan pendekatan pemberdayaan, dapat pula dipormulasikan dengan mengacu kepada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan, yaitu : (1). *Pendekatan*

Partisipasif, dalam arti selalu menempatkan masyarakat sebagai titik pusat pelaksanaan pemberdayaan, yang mencakup: (a) Pemberdayaan selalu bertujuan untuk pemecahan masalah masyarakat, bukan untuk mencapai tujuan-tujuan “orang luar” atau pengusaha; (b) Pilih kegiatan, metode dan teknik pemberdayaan, maupun teknologi yang ditawarkan harus berbasis pada pilihan masyarakat; (c) Ukuran keberhasilan pemberdayaan, bukan ukuran yang dibawa oleh fasilitator atau berasal dari luar tetapi berdasarkan ukuran-ukuran masyarakat sebagai penerima manfaat. (2). *Pendekatan Kesejahteraan*, dalam arti apapun kegiatan yang akan dilakukan, dari manapun sumberdaya dan teknologi yang akan digunakan, siapapun yang dilibatkan, pemberdayaan masyarakat harus memberikan manfaat terhadap perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. (3). *Pendekatan pembangunan berkelanjutan*, dalam arti bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terjamin keberlanjutannya, oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu menyiapkan masyarakat penerima manfaatnya agar pada suatu saat mereka akan mampu secara mandiri untuk melanjutkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagian proses pembangunan yang berkelanjutan.

Dibakukan konsep pemberdayaan bertolak dari pada ide-ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendiri, mendasari pengertian pemberdayaan masyarakat sebenarnya mengacu pada kata (*empowerment*) yaitu sebagai upaya untuk mengatualisasi potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan usaha di bidang pembangunan desa ialah penekanan kepada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya yang diharapkan memberikan peran aktif kepada individu bukan sebagai objek, tetapi sebagai pelaku yang menentukan hidup mereka.

Seperti telah dikemukakan, dalam praktek, kegiatan pemberdayaan seringkali berfokus pada upaya perbaikan pendapatan. Penulis dapat disimpulkan pemahaman seperti itu tidak salah, tetapi tidak cukup. Sebab hakekat dari pemberdayaan masyarakat adalah meningkatkan kemampuan, mendorong

kemauan dan keberanian, serta memberikan kesempatan bagi upaya-upaya masyarakat (setempat) untuk dengan atau tanpa dukungan pihak luar mengembangkan kemandiriannya demi terwujudnya perbaikan kesejahteraan (ekonomi, sosial, fisik dan mental) secara berkelanjutan. Mandiri disini bukan berarti menolak bantuan “pihak luar” tetapi kemampuan dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan: (a), Keadaan sumberdaya yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan; (b), Penguasaan dan kemampuan pengetahuan teknis untuk dimanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; (c), Sikap kewirausahaan dan ketrampilan manajerial yang dikuasai; (d), Kesesuaian sosial-budaya dan kearifan tradisional yang diwariskan serta dilestarikan secara turun-temurun.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu jenis penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu, Singarimbun dan Efendi (1989). Informan dalam penelitian ini yang merupakan informan ialah unsur pemerintah distrik Kuala Kencana, badan pengelolaan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan. Data yang terkumpul melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi ini berupa data kualitatif. Teknik yang dipergunakan untuk menganalisis data penelitian adalah teknik analisis deskriptif interpretatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Memilih dokumen/data yang relevan dan memberi kode. (2) Membuat catatan objektif, dalam hal ini sekaligus melakukan klasifikasi dan mengedit (mereduksi) jawaban. (3) Membuat catatan reflektif, yaitu menuliskan apa yang sedang dipikirkan peneliti sebagai interpretasi dalam sangkut pautnya dengan catatan objektif. (4) Menyimpulkan data dengan membuat format berdasarkan teknik analisis data yang dikendaki peneliti. (5) Melakukan triangulasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Distrik Kuala Kencana kabupaten Mimika secara astronomi berada pada posisi antara 134031'-138031' Bujur Timur dan 4060'-5018' Lintang Selatan dengan luas wilayah 511 Km². Berdasarkan data kependudukan Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Mimika 2013 penduduk kabupaten Mimika berjumlah 202.359 jiwa, yang paling banyak penduduk di Mimika Baru adalah penduduk terbanyak dengan Jumlah 131.777, sedangkan di distrik Kuala Kencana : 20288 jiwa, urutan kedua Setelah Mimika Baru yang terdiri atas 10.406 laki-laki dan 8.328 perempuan. Kemudian penduduk yang paling kecil adalah distrik Agimuga dengan jumlah penduduk 925 jiwa.

Pemberdayaan Masyarakat pada sektor pendidikan distrik Kuala Kencana sesungguhnya upaya holistik yang menyangkut semua aspek kehidupan yang ada terjadi di masyarakat untuk memberantas kemiskinan, kebodohan, kesehatan buruk, ketidakadilan dan keterbelakangan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya memberikan bantuan dana sekedar pada pembangunan fisik dan infrastruktur melainkan lebih pada pemberdayaan sektor pendidikan. Pendidikan merupakan sektor penting dalam mengubah perilaku kearah yang lebih baik, perilaku masyarakat dari aspek pengetahuan, sikap dan, keterampilan dimulai cara berpikir (*mind set*) dari pengetahuan dan pemahaman memiliki sikap yang positif menuju pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sektor pendidikan dikategorikan ada 4 (empat) kelompok tingkatan : 1). Pendidikan tingkat anak-anak; 2). Pendidikan tingkat remaja; 3). Pendidikan tingkat dewasa dan; 4). Pendidikan tingkat lanjut usia.

Pendidikan Tingkat Anak-Anak, pemberdayaan dalam sektor pendidikan diarahkan untuk mengubah pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat pemberdayaan pada aspek ini dimulai dari analisis kebutuhan dan masalah apa yang dihadapi masyarakat dalam sektor pendidikan, Pada level anak-anak usia 0-6 tahun dikembangkan istilah pendidikan Usia Anak Dini (PAUD). Pendidikan pada level ini dihadapkan kendala.

Berdasarkan data Susenas 2013 jumlah anak usia 0-6 tahun kabupaten Mimika tercatat 24.032 anak, dimana akses 3.898 anak telah mengikuti

pendidikan PAUD melalui jalur formal maupun non formal. Dengan demikian sudah 16,22 persen anak di kabupaten Mimika yang memperoleh akses terhadap PAUD, dengan rincian 7,44 persen sedang mengikuti program PAUD dan 8,78 persen telah mengikuti program PAUD. Artinya hampir separuhnya anak-anak di kabupaten Mimika belum terlayani dengan program PAUD, disebabkan pada beberapa kendala, di antaranya: kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak pada jenjang PAUD masih rendah; keterbatasan lembaga PAUD terutama di distrik Kuala Kencana, keterbatasan tenaga guru, keterbatasan biaya sarana pendidikan, dan aspek-aspek lainnya.

Upaya mensukseskan tingkat APK anak PAUD ini perlu dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sesungguhnya memiliki potensi besar untuk menyukseskan hal tersebut. Dimulai dari membangun kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya PAUD untuk masa depan anak didik mereka. Masyarakat di dorong untuk menyekolahkan anak-anaknya pada jenjang PAUD. Selanjutnya melalui kelembagaan yang ada dimasyarakat mulai dari RT/RT, karang taruna, koperasi PKK, Posyandu, Gereja, Masjid, atau kelembagaan yang lainnya membentuk PAUD. PAUD modal ini, tenaga pengajarnya adalah diambil dari masyarakat yang memiliki kemampuan dalam mendidik anak. Biasa juga dari guru SD, mahasiswa atau kaum terdidik lainnya yang ada di masyarakat tersebut. Tempat PAUD dapat memanfaatkan pekarangan rumah penduduk, kantor balai desa, tempat ibadah, kantor RT/RW atau tempat-tempat lainnya. Begitu pula alat permainan dapat memanfaatkan berbagai alat yang berasal dan dibuat oleh masyarakat.

Anak-anak usia PAUD perlu di antarkan oleh orangtuanya ketempat belajar dan tempat bermain. Dengan demikian orangtua dari anak-anak tersebut dapat bekerja mencari nafka untuk menghidupi kebutuhan ekonomi dan keluarga mereka. Jika yang mengantarkan anak tersebut pada orangtuanya, maka pada saat anak-anaknya belajar dan bermain di PAUD, orang tua anak-anak dapat diberdayakan dengan berbagai kegiatan pelatihan keterampilan. Keterampilan ini adalah yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga, misalnya menjahit, membuat berbagai olahan makanan atau kerajinan yang sesuai dengan potensi lokal.

Pelatihnya atau instruktornya dapat memanfaatkan masyarakat setempat yang memiliki keterampilan tertentu. Untuk memantangkan keterampilan ini, dengan demikian orang tua dapat meningkatkan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Pendidikan tingkat remaja pada tingkat remaja anak-anak seharusnya sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Lanjutan Atas SLTA, Namun pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang tidak bisa menamatkan pendidikan pada tingkat tersebut. Program pemerintah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pada usia 7-15 ternyata juga tidak bisa menuntaskan semua hingga 100 persen, termasuk pada tingkat sekolah dasar. Pada hal pendidikan merupakan modal yang sangat penting untuk masa depan generasi muda tersebut. Hal ini dilihat dari angka putus sekolah dan angka sering meloncat naik berakibat konflik antar warga selalu muncul sebagai penyebab utama.

Kendala pendidikan distrik Kuala Kencana kabupaten Mimika pada tingkat remaja ini diharapkan pada berbagai sektor, diantaranya kesadaran para orangtua untuk menyekolahkan anak masih banyak yang rendah. Disisi lain tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi juga sangat berat, sehingga tidak sedikit orang tua yang mengajak anak-anaknya untuk bekerja membantu mencari nafkah. Membangun kepada sasaran orang tua untuk menyekolahkan anak-anak pada usia remaja sangat penting, namun pada tahap ini membangun kesadaran saja tidak cukup, tetapi perlu upaya konkrit lainnya misalnya: pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi sehingga mendorong keberdayaan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan pada tingkat remaja tidak hanya dalam jalur pendidikan formal, tetapi dapat dilakukan melalui pendidikan non formal. Kursus-kursus atau berbagai pelatihan keterampilan. Bentuk keterampilan ini hendaknya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal. Penyelenggaraan ini kursus atau pelatihan ini perlu bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah setempat, dunia usaha, swasta dan masyarakat luas.

Pemberdayaan sektor pendidikan pada tingkat orang dewasa diarahkan pada peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik. Dimulai dari analisis kebutuhan dan potensi masyarakat dalam sektor pendidikan. Berbagai bentuk pelatihan dapat dikembangkan. Bentuk keterampilan ini disesuaikan dengan potensi masyarakat lokal dan langsung bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan pada kelompok dewasa ini perlu menerapkan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa.

Pemberdayaan pendidikan bagi kaum dewasa diarahkan pada kemandirian belajar. Kemandirian dalam arti belajar berarti kemampuan individu dalam mengelola dirinya untuk belajar, mengubah pengetahuan dan sikap dan kemampuannya tanpa bergantung pada pihak lain. Indikator kemandirian belajar adalah : 1) memiliki intensitas yang tinggi dalam memanfaatkan media belajar baik yang dirancang secara khusus maupun yang dimanfaatkan secara mandiri; 2) memiliki kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri untuk; menentukan tujuan pembelajaran, media belajar, serta indikator pencapaian pembelajaran; 3). Memiliki kemauan (inisiatif) untuk belajar dalam mengembangkan kompetensinya; 4). Memiliki disiplin yang tinggi untuk belajar baik secara sendiri atau dengan orang lain; dan 5). Mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya baik oleh dirinya sendiri atau dengan bantuan orang lain.

Pendidikan tingkat lanjut usia, pemberdayaan lanjut usia dalam sektor pendidikan ditujukan untuk memberikan peran atau aktivitas yang sesuai dengan kondisi fisik dan pengalamannya. Dengan aktivitas yang cukup, lanjut usia akan tetap sehat. Di sisi lain, dengan beraktivitas ini, lansia tetap produktif untuk dapat menghasilkan finansial untuk memenuhi keperluan hidupnya. Dengan demikian mereka akan menjadi lanjut usia yang tidak membebani kaum muda dan mandiri.

Secara umum lanjut usia dapat dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama lanjut usia yang secara fisik dan psikis perlu mendapatkan bantuan dan perawatan kaum muda. Pendidikan untuk pemberdayaan kepada kelompok ini terutama aspek keagamaan, meningkatkan keimanan, dan menjaga kesehatan. Di sisi lain mereka juga dapat memberikan peran dan aktivitas yang mungkin bisa dilakukan. Kelompok ke dua adalah lanjut usia yang masih

produktif dan bisa tetap aktif beraktivitas. Dengan segala wawasan dan pengalamannya, kelompok lansia memiliki kemampuan untuk aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, pada kelompok lanjut usia ini perlu memberikan kesempatan lebih berdaya sesuai dengan kemampuan, potensi yang dimiliki sesuai pengalamannya.

Pemberdayaan masyarakat desa pada sektor pendidikan di distrik Kuala Kencana penyelenggaraan program pendidikan bagi masyarakat perlu diupayakan secara seimbang sesuai kebutuhan masyarakat daerah bersangkutan agar komponen masyarakat dapat diperdayakan dengan maksimal. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan diberbagai tingkat pendidikan anak-anak; pendidikan tingkat remaja; pendidikan tingkat dewasa, pendidikan tingkat lanjut Usia melalui jalur pendidikan formal, informal dan, nonformal secara demokratis tidak memandang jenis kelamin, Agama, suku, ras dan atau status sosial masyarakat. Dibarengi dengan fasilitas sarana prasarana yang seimbang dan merata di setiap desa/distrik. Pendidikan berbasis pada masyarakat dengan prinsip dasar yang patut diperhatikan : 1). Kepedulian terhadap masalah kebutuhan dan potensi sumberdaya manusia; 2). Kepercayaan timbal-balik dari pelayanan program dan dari masyarakat pemilik program; 3). Pasilitasi (pemerintah) dalam membantu kemudahan masyarakat dalam berbagai proses kegiatan; 4). Adanya partisipasi, yaitu upaya melibatkan semua komponen lembaga atau individu terutama warga masyarakat dalam proses kegiatan dan; 5). Mengayomi peranan masyarakat dalam hasil yang dicapai. Sesuai dengan prinsip pendidikan memberikan proses penyadaran, pemahaman kesadaran pentingnya pendidikan bagi masyarakat.

Kemiskinan dan ketidakberdayaan merupakan masalah sosial terbesar yang dapat kita hadapi masyarakat, pemerintah kabupaten Mimika melalui dinas terkait berusaha dan bekerja keras pemberantas kemiskinan dan pemberantasan buta huruf menerapkan program wajib belajar 9 tahun bagi remaja usia 7-15 namun Pendidikan tetap saja mengalami hambatan, karena kurangnya kesadaran, pemahaman tentang pentingnya pendidikan sepanjang hidup manusia, baik bagi anak-anak, remaja, dewasa dan lanjut usia menjadi hak setiap manusia, banyak pandangan pendidikan hanya bagi anak saja. Padahal Undang-undang Republik

Indonesia nomor 23 tahun 2003 Sistem pendidikan nasional telah memberikan peluang dengan jelas bagi “tiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang ajat” artinya tidak ada batasan bagi warga negara usia tua atau muda, baik laki-laki maupun perempuan.

Selanjutnya dalam pemberdayaan masyarakat sektor pendidikan distrik Kuala Kencana ada pula kendala, yaitu : 1). Peran pemerintah tidak optimal, pemberdayaan msasyarakat adalah tanggungjawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, taraf hidup masyarakat, kesadaran pemahaman pada masyarakat peningkatan kapasistas masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat dan; 2). Partisipasi Masyarakat, melibatkan semua komponen masyarakat untuk menentukan pilihan mereka, ini seringkali kejangkalan sehingga masyarakat tidak merespon terhadap program pemerintah; 3). Peran pendidik dan sarana penunjang, pemberdayaan fasilitator melihat ketersediaan kondisi dilapangan dimana masyarakat merasakan agar program pemberdayaan berjalan baik.

PENUTUP

Pembahasan Hasil penelitian sebelumnya disimpulkan bahwa Konsep pemberdayaan pada sektor pendidikan distrik kuala kencana adalah peran pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan. Pemberdayaan dilaksanakan bertumbuh pada penguatan kapasitas masyarakat. Meningkatkan pemahaman tentang pendidikan bagi anak-anak, remaja, dewasa, lanjut usia pandangan negatif. Faktor penghambat pemberdayaan masyarakat : a). mengoptimalkan peran pemerintah (pasilitator); b). partisipasi masyarakat ditingkatkan; c). ketersediaan faktor penunjang pemberdayaan yang memandai.

Disarankan sesuai dengan pembahasan maka direkomendasikan untuk perlu ada diupaya pemerintah terhadap pemberdayaan penguatan kapasitas masyarakat disektor pendidikan distrik Kuala Kencana, dalam melaksanakan pemberdayaan pada dasarnya perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif dan terus-menerus kontinyu. Pemerintah daerah dan dinas terkait memperhatikan kebiasaan masyarakat untuk melihat faktor penghambat pemberdayaan masyarakat pada sektor pendidikan, pembangunan sarana pendidikan harus merata

disetiap desa dan atau distrik wilayah Kabupaten Mimika, menciptakan harmoni pelaksanaan program dilapangan, dengan meningkatkan insensitas kordinasi antar pihak dilapangan secara berkesinambungan dan mengutamakan karakteristik dan kearifan lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan setiap program pemberdayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dalam Angka Mimika Tahun 2013.

Mardikanto dan Soebiato, (2012) Pemberdayaan Masyarakat : Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta, Bandung.

Singarimbun, M. dan Effendi, S., ed (1989) Metode Penelitian Survai. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta.

Suharto, (2005) Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat : Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial. Refika Aditama, Bandung.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kabupaten Mimika Tahun 2013.

Tuloli, Jassin. 2002: Metode Penelitian Kualitatif dan Aplikasinya. Suatu Pendekatan Terhadap Ilmu-ilmu Sosial. IKIP. Gorontalo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Perilaku Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pada Kawasan PT Trimega Bangun Persada (TBP) Di Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

Oleh
Yostinus Luwudara¹⁹
Dr. Drs. Markus Kaunang, MSi²⁰
Dr. Verry Y. Londa, S. Sos, MSi²¹

Abstract

Kawasi village social life before 2005 was very orderly and organized and put together in every social life. However, reality shows there are currently several changes in the value / norm is happening in the community Kawasi. By using a qualitative design of this study attempts to analyze the behavior of social and economic life of society in Region Trimega PT Bangun Persada In the village Obi Kawasi District of South Halmahera in North Maluku province.

The results showed that the presence of industry which is managed by the company PT Trimega Bangun Persada (TBP) in the village Kawasi economically very helpful changes in the revenue structure of society, children were able to continue their education to university level as well as health care and transportation has been very available. However, the advances in tandem with behavioral deviation which is characterized by erosion of the value of the customs, mutual cooperation and social norms of society, so that people's lives are more likely to imitate Kawasi modern lifestyle is presented from the outside.

Keywords: Behavior, Social Economy, Society.

PENDAHULUAN

Kehadiran PT Trimega Bangun Persada (TBP), pengelola pertambangan nikel merupakan bagian dari proses pembangunan nasional. Secara khusus dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara mikro. Ada pun harapan agar membawa perubahan terhadap segala aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pembangunan itu tidak lain adalah suatu usaha perubahan untuk menuju ke keadaan yang lebih baik dengan berdasarkan kepada norma-norma tertentu.

¹⁹ Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

²⁰ Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

²¹ Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

Menurut Beratha (1982), pembangunan adalah suatu Perubahan yang direncanakan dengan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya, inilah yang disebut pembangunan. Pembangunan juga dapat menimbulkan suatu proses perubahan sosial. Menurut Soemardjan (2006), perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sosial, sikap dan pola tingkah-laku antar kelompok dalam masyarakat.

Secara geografis Desa Kawasi berada di pesisir pantai Selatan pulau Obi, termasuk desa tertinggal. Masyarakat didominasi oleh dua komunitas agama, yaitu Islam dan Kristen serta berasal dari suku Tobelo Galela dan suku Buton. Mata pencaharian kedua komunitas ini ialah petani dan nelayan. Sebelum kehadiran Industri nikel PT Trimega Bangun Persada (TBP) 2005, usaha pemenuhan kebutuahn sosial ekonomi keluarga hanya mengandalkan hasil pertanian dan perikanan yang diolah secara tradisional. Kesadaran akan pentingnya pendidikan sangat minim bahkan masyarakat kurang menyadari pentingnya arti pendidikan dalam menunjang kesejahteraan dan mutu sumber daya manusia. Akibatnya, kehadiran perusahaan tambang nikel yang menguasai dan mengelola lahan sekitarnya sama sekali tidak dengan sendirinya mengubah kehidupan sosial ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Masyarakat desa tetap menekuni profesi tradisional dengan pendapatan sebagai petani dan nelayan sekitar Rp 500.000,- Rp 1.000,000. Nilai nominal pendapatan ini diperoleh dari perhitungan kopra tiga kali masa panen/tahun. Sebaliknya para nelayan sangat tergantung dari kondisi alam. Sistem bertani masih bersifat nomaden atau berpindah-pindah dengan peralatan pertanian yang masih sangat tradisional. Pada hal, pendidikan merupakan salah satu aspek pembangunan yang memiliki peranan penting yang bertujuan memberikan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan nilai (*values*) serta pembinaan mental masyarakat itu sendiri. Maju mundurnya peradaban suatu bangsa dapat diketahui dari taraf pendidikannya.

Kehadiran industri tambang nikel PT Trimega Bangun Persada (TBP) sejak sepuluh tahun yang silam (2005), sangat berpengaruh terhadap perubahan masyarakat lokal. Perubahan yang sangat terlihat yakni homogenitas usaha

pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi heterogenitas. Dahulu masyarakat sangat tergantung pada alam demi pemenuhan kebutuhan hidup, sekarang masyarakat justru beralih ketergantungan pada perusahaan. Kondisi masyarakat dulunya hidup dengan sistem ekonomi yang sederhana atau subsisten, kini pemenuhan kebutuhan ekonominya digantikan oleh hasil-hasil dari produksi tambang yang lebih banyak menghasilkan uang.

Perubahan mata pencaharian ini secara perlahan-lahan diikuti dengan perubahan jumlah komposisi penduduk (*population*), penduduk tetap serta penduduk sementara. Kehadiran perusahaan beriringan dengan pemindahan kepemilikan lahan-lahan masyarakat lokal kepada para penguasa. Salah satu faktor pemicu adalah perilaku pengusaha yang membongkar lahan, namun kurang disikapi secara maksimal dalam ganti rugi. Hal ini benar-benar dimanfaatkan oleh para pejabat, pengusaha, serta oknum-oknum lainnya.

Dalam hal tata nilai/norma (*values/norms*) budaya tradisional agraris mengalami pergeseran menjadi budaya masyarakat industri. Kenyataan menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan nilai/norma yang terjadi dalam komunitas orang Kawasi, antara lain seperti; (1) sistem gotong royong dengan metode (sambung tanagan) mengalami pergeseran atau mulai hilang dan tergantikan dengan sistem penghargaan (*reward*) berupa upah sesuai dengan spesialisasi jenis pekerjaan yang dilakukan. (2) perubahan cara berpikir lokal kearah berpikir secara modern. (3) perubahan tata nilai dalam struktur keluarga tradisional “orang kawasi”. Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan dari keluarga besar (*extended family*) menjadi keluarga inti (*nuclear family*).

KAJIAN PUSTAKA

Secara garis besar, perilaku adalah tindakan atau pola respon yang dilakukan oleh seseorang pada situasi tertentu. Perilaku seseorang menyangkut tindakan atas respon hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sekitarnya yang dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, kekuasaan, persuasi atau genetika. Perilaku sosial merupakan perilaku yang terjadi dalam situasi sosial melalui cara orang berfikir, merasakan dan bertindak. Perilaku sosial

meliputi segala perilaku yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, seperti perilaku prososial dan perilaku asosial. Perilaku prososial adalah segala perilaku yang menguntungkan dan bermanfaat bagi orang atau kelompok lain, mempunyai konsekuensi sosial positif yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan fisik maupun psikis tanpa mengharapkan imbalan apapun, tanpa memperdulikan motif-motif si penolong. Perilaku asosial merupakan kebalikan dari perilaku prososial (Ramadhani, 2013).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku manusia yaitu Faktor Internal yang adalah tingkah laku manusia adalah corak kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam dirinya. Faktor-faktor intern yang dimaksud antara lain Ras/keturunan, Jenis kelamin, Sifat fisik, Kepribadian, Bakat dan Intelegensia; dan faktor Eksternal seperti pendidikan, agama, Kebudayaan, Lingkungan dan Sosial Ekonomi.

Masyarakat menurut Soekanto (1990) diartikan sebagai manusia yang hidup bersama, mereka sadar sebagai satu kesatuan dan mereka merupakan suatu sistem yang hidup bersama. Nurdin (dalam Setyawati 2002) masyarakat adalah golongan manusia yang saling berhubungan tetap atau agak tetap, yang diorganisir untuk aktifitas-aktifitas bersama dan terikat padanya. Menurut Syani pengertian dari masyarakat adalah sekelompok ikatan nilai dan norma sosial. Istilah masyarakat dapat pula diartikan sebagai wadah atau tempat orang-orang yang saling berhubungan dengan hukum dan budaya tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Roucek dan Waren (dalam Syani 1995) memberikan arti dari masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki rasa kesadaran bersama dimana mereka berdiam pada daerah yang sebagian besar atau seluruh warganya memperlihatkan adanya adat kebiasaan dan aktivitas yang sama pula. Anggota masyarakat yang hidup teratur akan mencerminkan betapa rukunnya mereka baik di dalam pergaulan, persahabatan dalam berbagai kegiatan. Wujud rasa kebersamaan dalam pergaulan di masyarakat dapat menghasilkan suatu hubungan yang harmonis dikalangan mereka sendiri. Bernhard (1980) memberikan pengertian dari masyarakat sebagai suatu kelompok orang yang identifikasinya

teratur sedemikian rupa di dalam menjalankan segala sesuatu yang diperlukan bagi hidup bersama secara harmonis.

Teori Perubahan Sosial sebagai acuan kajian dalam penelitian ini, Wilbert Moore (2007) memandang perubahan sosial sebagai “perubahan struktur sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial”. Setiap perubahan sosial dalam struktur masyarakat atau perubahan dalam organisasi sosial disebut perubahan sosial. William F. Ogburn (dalam Setiadi, 2007) mengemukakan bahwa ruang lingkup perubahan-perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan yang material maupun immaterial dengan menekankan bahwa pengaruh yang besar dari unsur-unsur immaterial. Kingsley Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam fungsi dan struktur masyarakat. Perubahan-perubahan sosial dikatakannya sebagai perubahan dalam hubungan sosial (*social relationship*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial tersebut. Syani (1995) menyebutkan bahwa pengertian perubahan adalah suatu proses yang mengakibatkan keadaan sekarang berbeda dengan keadaan sebelumnya, perubahan bisa berupa kemunduran dan bisa berupa kemajuan. Dalam khasana literature ilmu-ilmu sosial terutama sosiologi, pemahaman tentang perubahan sosial sering dikaitkan dengan beberapa kata lain yang menunjuk pada proses sosial yang sama seperti industrialisasi, modernisasi dan atau pembangunan. Bahkan didalam berbagai publikasih kata-kata tersebut dipakai secara bergantian (Soegihen, 1994). Selo Soemardjan (dalam Setiadi-Usman Kolip, 2010) menyatakan perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurutnya, antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan memiliki satu aspek yang sama, yaitu keduanya bersangkutan paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Bogdan Tylor (2002), dengan data utama bersumber dari wawancara kepada 16 orang informan yang merupakan representasi dari pemerintah Desa Kawasi, masyarakat Desa Kawasi, pimpinan PT Trimega Bangun Persada (TBP), dan *Device Comdev Local* serta data pendukung lainnya yang diperoleh melalui pengamatan langsung dan penggunaan dokumen terkait. Analisis data dilakukan dengan pendekatan konsep analisis yang dikemukakan oleh (Miles & Huberman, (2014) yaitu kategorisasi dan mereduksi data, pengelompokan data, melakukan interpretasi, menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan yang didasarkan pada kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transformasi, transisi pola hidup, gaya hidup merupakan konsekuensi logis dari pembauran yang dilakukan dengan cara-cara yang sengaja maupun melalui sebuah proses alamiah. Industrialisasi merupakan sebuah terobosan yang memiliki makna menerjang keakuan nilai-nilai budaya dan agama. Oleh karena itu, bias “pemaksaan” pemilik modal adalah sikap memaksakan kehendak dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, dan tradisi sebagaimana terjadi di Desa Kawasi sejak tahun 2005 hingga kini 2015.

1. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Kawasi Sebelum Kehadiran Kawasan PT Trimega Bangun Persada (TBP)

Desa Kawasi adalah sebuah Desa sangat tertinggal dalam semua aspek kehidupan, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan serta transportasi. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari hanya mengandalkan pada hasil bumi serta hasil tangkapan ikan. Ke dua hasil tersebut terutama untuk pemenuhan kebutuhan hidup dari keluarga karena walaupun panen berlimpah tetapi tidak ada ketersediaan sarana pemasaran atau distribusi. Hanya dengan sedikit nekat masyarakat harus bertarung melintasi ombak menuju pulau di seberang guna memasarkan hasil bumi serta ikan. Kondisi ini merupakan gambaran umum dari

hampir semua desa-desa tertinggal di seluruh Indonesia, yakni masyarakat dipaksakan harus bertahan menikmati ketidakberpihakan nasib.

Mencermati dilematis perasaan masyarakat menghadapi ketidakpastian ini, menurut Pierre Bourdieu, struktur terdapat dalam dunia sosial. Pada kenyataannya habitus sebagai “struktur sosial yang terinternalisasi dan termanifestasi”. Realitas sosial seperti ini mencerminkan pembagian objektif dalam struktur kelas, kelompok usia, gender, dan kelas-kelas sosial. Habitus diperoleh sebagai hasil pendudukan jangka panjang disuatu posisi dunia sosial. Dengan demikian, habitus bervariasi dan bergantung pada sifat posisi seseorang di dunia itu; tidak semua orang memiliki habitus yang sama. Akan tetapi, mereka yang menduduki posisi yang sama dalam dunia sosial cenderung memiliki habitus yang sama. Habitus dapat juga berupa fenomena kolektif.

Dalam memahami pola kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Kawasi, Giddens dalam kajian murni teori mengenai strukturasi (1984), menegaskan bahwa tidak akan ada pelaku yang membuat pilihan keculai dalam kondisi struktural spesifik dan tidak ada unsur atau ciri struktural akan terwujud keculai sebagai hasil dari konsekuensi-konsekuensi tindakan yang disengaja. Giddens dalam teori Strukturasi merujuk pada “dualitas Struktural”. Tidak hanya struktur itu menghambat dan menentukan bentuk-bentuk tertentu perilaku, tetapi juga memberikan kemampuan bagi perilaku; struktur memberikan kesempatan dan pembatasan sekaligus. Selanjutnya, kondisi-kondisi struktural dimana tindakan manusia diwujudkan, atau disebut Giddens sebagai “agensi”, direproduksi, atau didefinisikan kembali, oleh tindakan ini. Jadi, ketika suatu tindakan terjadi dalam suatu konteks struktural, konteks ini selanjutnya dapat diregenerasi, atau ditransformasi, oleh tindakan tersebut. Ada hubungan dialektik antara struktur dan tindakan. Begitulah Giddens meringkas konsep yang disebut “dualitas struktur”: setiap tindakan yang menyumbang bagi reproduksi struktur juga merupakan tindakan konstruksi, suatu upaya yang secara sengaja dilakukan, dan oleh karena itu dapat mengawali perubahan struktur itu pada saat yang sama mereproduksinya” (Giddens 1976).

Di dunia tradisional, apakah berbasis pertanian atau produksi industri. Hidup secara tradisional dapat mengetahui bahwa hal-hal dimasa depan secara substansial sama dengan masa lalu. Hidup dalam zaman modernitas akhir, kata Giddens, berarti kita tidak dapat bergantung pada komunitas dan stabilitas dengan cara ini dan, sebagai hasilnya, kita harus mengkombinasi perubahan dan ketidakpastian dengan menciptakan dan menciptakan kembali kehidupan kita seumur hidup suatu aktivitas yang ia sebut reflektivitas.

2. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kawasi Sejak Kehadiran Kawasan PT Trimega Bangun Persada (TBP)

Kehadiran kawasan industri nikel membawa perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat Kawasi. Kesejahteraan dan kemudahan-kemudahan memperoleh uang secara langsung membentuk strata baru, kelas sosial baru, pemilik modal dan tidak memiliki modal. Berbagai bentuk rentetan peristiwa mengiringi dan mempengaruhi secara langsung adalah pola perilaku terhadap kemajuan ekonomi, kemudahan memperoleh uang, persaingan pemenuhan lapangan kerja, serta persaingan meraih posisi strategis dalam pekerjaan.

Perilaku sosial merupakan perilaku yang terjadi dalam situasi sosial melalui cara orang berfikir, merasakan dan bertindak. Perilaku sosial meliputi segala perilaku yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, seperti perilaku prososial dan perilaku asosial. Perilaku prososial adalah segala perilaku yang menguntungkan dan bermanfaat bagi orang atau kelompok lain, mempunyai konsekuensi sosial positif yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan fisik maupun psikis tanpa mengharapkan imbalan apapun, tanpa memperdulikan motif-motif si penolong.

Perubahan perilaku sosial masyarakat Kawasi dalam hal memaknai uang, serta mempertahankan nilai-nilai tradisi merupakan suatu dilematis. Sifat dari perubahan itu sendiri tidak selalu mengarah pada kemajuan (progress) saja, juga kemunduran. Perubahan sebagai suatu kemajuan adalah perubahan yang memberi dan membawa kemajuan pada masyarakat. Hal ini tentu sangat diharapkan karena kemajuan itu bisa memberikan keuntungan dan berbagai kemudahan pada manusia. Sedangkan kemunduran ini terjadi apabila perubahan itu tidak

menguntungkan bagi masyarakat, seperti ketika perubahan yang bertujuan ke arah kemajuan berjalan tidak sesuai dengan rencana atau malah dampak negatif yang tidak direncanakan muncul dan menimbulkan masalah baru.

Dengan demikian, perubahan perilaku adalah perubahan tindakan, sikap atau pola respons seseorang dari satu bentuk ke bentuk yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi pada lingkungan sekitarnya. Sarwono (2001), bahwa perilaku adalah pengalaman yang paling langsung pada diri seseorang, oleh karena itu dalam pengalaman seseorang akan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dengan kata lain, pengalaman seseorang akan menjadi dasar utama dalam memberikan respons atau stimulus terhadap sesuatu yang dilakukannya. Oleh karena itu perilaku seseorang dapat berubah sesuai dengan harapan dan keinginan dari orang tersebut. Dengan demikian ketika terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut dalam diri seseorang dimaksud maka ada kemungkinan terjadi gejala perubahan perilaku yaitu kekuatan-kekuatan pendorong meningkat karena adanya stimulus yang memotivasi terjadinya apa yang disebut dengan perubahan perilaku.

Alat dan kondisi berbeda dalam hal dimana orang yang bertindak itu mampu menggunakan alat dalam usahanya mencapai tujuan. Kondisi merupakan aspek dalam situasi yang tidak akan dapat dikontrol oleh orang yang bertindak hal dimaksud. Tindakan sosial yang dikemukakan oleh Parsons lebih menekankan pada orientasi subjektif yang dalam hal ini ia mengandalkan pilihan-pilihan individu. Pilihan itu secara normatif diatur atau dikendalikan oleh nilai dan standar normatif bersama. Hal ini berlaku untuk tujuan-tujuan yang ditentukan oleh individu serta alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan dimaksud. Prinsip-prinsip dasar inilah yang mengandalkan semua tipe dan perilaku manusia tanpa memandang suatu konteks sosial tertentu.

3. Dampak kehadiran Kawasan PT Trimega Bangun Persada (TBP) Terhadap Perilaku kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kawasi

Industrialisasi memiliki dua efek domino terhadap masyarakat, baik nilai-nilai positif juga negatif. Kehadiran tambang nikel PT Trimega Bangun Persada (TBP) secara langsung dirasakan oleh masyarakat Desa Kawasi, di antaranya:

a. Degradasi Penghargaan Terhadap Nilai-Nilai Tradisional (Adat Dan Agama)

Realitas menunjukkan masyarakat Kawasi mengabaikan aturan adat sehingga kekuatan adat yang selama ini menjadi pengikat kehidupan sosial semakin melemah. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian dan sikap tegas menegakkan adat tanpa pandang bulu.

b. Perubahan Pola Pikir Serta Sikap Dan Perilaku (*Attitude*)

Jika dihubungkan dengan perilaku kehidupan masyarakat Desa Kawasi kekinian ketika hadirnya Industri maka secara tidak langsung dapat mempengaruhi sikap atau perilaku sosialnya yang sudah dibangun selama ini dalam kehidupan bermasyarakat hampir tidak diselamatkan.

c. Perubahan Sikap Terhadap Perasaan Kebersamaan (Emosional)

Perilaku masyarakat dalam kegiatan gotong royong menunjukkan bentuk solidaritas dalam kelompok masyarakat tersebut. Gotong royong merupakan ciri budaya bangsa Indonesia yang berlaku secara turun-temurun sehingga membentuk perilaku sosial yang nyata dalam tata nilai kehidupan sosial. Nilai tersebut menjadikan kegiatan gotong royong selalu terbina dalam kehidupan komunitas sebagai suatu warisan budaya yang patut untuk dilestarikan.

d. Perubahan Penghargaan Terhadap Nilai dan Etika (*Value and Ethics*)

Nilai pada hakikatnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu salah atau benar. Nilai merupakan bagian penting dari kebudayaan. Suatu tindakan dianggap sah (secara moral dapat diterima) jika harmonis atau selaras dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat dimana tindakan tersebut dilakukan. Ketika nilai yang berlaku menyatakan bahwa kesalehan beribadah adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi, maka jika terdapat orang tidak beribadah tentu akan dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Menyimak perubahan sikap penghargaan terhadap nilai-nilai dan etika, warga lokal memiliki kebebasan dalam mengekspresikan diri mereka tanpa dibatasi oleh tradisi lama. Tradisi lama mulai ditinggalkan dan diganti tradisi baru yakni budaya baru dari kota. Perilaku hidup yang dikaverkan oleh masyarakat setempat khususnya pada anak muda terhadap sesamanya semakin tidak beretika dan merugikan mereka

sendiri seperti merokok diusia dini, miras, bertato, berbusana yang tidak wajar, lubang telinga dan perilaku-perilaku negatif lainnya.

PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Kawasi sebelum kehadiran Kawasan PT Trimega Bangun Persada (TBP), masih secara tradisional, menggantungkan hidup pada pertanian serta perikanan bagi para nelayan. Masyarakat memiliki profesi ganda, baik bertani juga sebagai nelayan. Hasil pendapatan sangat minim, hanya sekedar pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari. Oleh karena kemiskinan, maka orang tua tidak mampu menyekolahkan anak-anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kehidupan sosial masih sangat familiar, kolektifitas tempat tinggal (extended family). Nilai-nilai adat istiadat, serta agama masih sangat mewarnai dalam hidup sehari-hari.

Dampak kehadiran Kawasan PT Trimega Bangun Persada (TBP) terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Kawasi dari sisi ekonomi memberikan kemudahan masyarakat memperoleh uang karena boleh berprofesi ganda, baik sebagai petani, nelayan, buruh serabutan di perusahaan, sebagai karyawan perusahaan, berwira usaha kamar kost, jualan makanan dan lainnya. Keprihatinan bahkan sudah sangat meresahkan adalah perubahan penghargaan terhadap nilai-nilai warisan dan agama. Sekarang, masyarakat sangat fokus mencari uang sehingga mengabaikan kewajiban-kewajiban beribadah. Orang-orang muda sangat sulit diatur bahkan mereka menolak diintervensi oleh orang tua. Pelanggaran terhadap norma agama dan budaya dianggap sebagai biasa-biasa saja, sama sekali tidak terlihat ada rasa bersalah apalagi rasa penyesalan.

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka penulis dapat menyarankan untuk dibutuhkan sinergisitas semua potensi masyarakat dalam usaha-usaha membangun kembali etos kerja, daya juang, sikap hidup hemat serta menjauhkan diri dari sikap materialistis, hedonis. Demikian pula perusahaan hendaknya tidak hanya mencari keuntungan dengan mengorbankan masyarakat Kawasi dalam mempertahankan nilai-nilai tradisi dan agama, serta Pemerinatah Daerah Halmahera Selatan selaku pemberi izin pertambangan ditingkat Daerah,

Dinas Pertambangan Halmahera Selatan selaku pengawas pertambangan, PT Trimega Bangun Persada (TBP) harus melakukan pengawasan melekat terhadap lingkungan agar sejak dini mencegah dampak negatif dari eksploitasi tambang.

DAFTAR PUSTAKA

- Lauer H. Robert. 2003. Prespektif Tentang Perubahan Sosial. Cetakan Ke empat, Rineka Cipta. Jakarta.
- Sarlito W. Sarwono. 2000. Psikologi Sosial. Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial. PT Balai Pustaka (Persero). Jakarta.
- Sugiono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. AlfaBeta. Bandung.
- Pip Jones. 2009. Pengantar Teori-Teori Sosial. Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme, Yayasan Obor Indonesia Jakarta.
- Wirawan, I. B. 2012. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigm. Fakta Sosial, Defenisi Sosial Dan Perilaku Sosial. Kencana Prenada Media. Jakarta.

Persepsi Masyarakat Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kecamatan Singkil Kota Manado

Oleh
Raymond Kodoati²²
Prof. Dr. Ir. V. V. Rantung, MA²³
Prof. Dr. Drs. Patar Rumapea, M.Si²⁴

Abstract

In the city of Manado in urban poverty reduction programs have been implemented since 2004, including in the district of Singkil. Of the various program implementation still poses various problems both of implementing itself or of public perception. This study was conducted to analyze public perception Singkil District of the city of Manado on the National Program for Community Empowerment Urban. The research method used in this study is qualitative.

The results showed that the public perception Singkil District of Manado on the National Program for Community Empowerment Urban has undergone a change from project orientation to orientation goals. However, changes in the public's perception is not followed by the role of the Institute for Community Self-reliance in carrying out the task of mentoring. Advised him to undertake capacity building and functioning of the Institute for Community Self-Reliance in order to carry out the task of mentoring.

Keywords: Perception, Community, Empowerment.

PENDAHULUAN

Besarnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran masih menjadi salah satu masalah utama di Indonesia saat ini. Meskipun dalam pelaksanaan pembangunan penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas, namun target penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sebagaimana tercantum dalam RPJM 2004-2009 masih sulit dicapai. Kenaikan harga minyak dunia selama tahun 2005 yang mengharuskan pemerintah menerapkan kebijakan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak memicu tingginya inflasi yang kemudian menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Pada bulan Maret 2006, jumlah penduduk miskin tercatat 39,05 juta jiwa atau 17,75 persen dari jumlah penduduk. Sejalan

²² Mahasiswa Prog. Studi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

²³ Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

²⁴ Staf Pengajar Pada Prog. Stusi PSP Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.

dengan itu angka pengangguran terbuka jumlahnya masih besar yaitu 10,9 juta jiwa atau 10,3 persen pada bulan Agustus 2006.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Penanggulangan kemiskinan memerlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh, namun penangannya selama ini cenderung parsial di masing-masing sektor dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam budaya kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan permasalahan kemiskinan mulai luntur.

Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) telah dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat dimasa datang. Selain itu, menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Pada tahun 2007 P2KP diadopsi menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan ini diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50 persen pada tahun 2015. Sasaran PNPM Mandiri Perkotaan adalah: (1) terbangunnya Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang dipercaya, aspiratif, representatif, dan akuntabel untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat; (2) tersedianya Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program

penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan pemukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan; (3) terbangunnya forum LKM tingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah; (4) terwujudnya kontribusi pendanaan dari pemerintah kota/kabupaten dalam PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

Di Kota Manado Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan sudah dilaksanakan sejak tahun 2004. Alokasi dana sejak tahun 2004-2006 sebesar Rp 6,7 milyar dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) berjumlah 1.926 dengan jumlah anggota 10.555 orang. Jenis-jenis kegiatan KSM terdiri dari kegiatan ekonomi sebanyak 1.044 KSM, kegiatan fisik 746 KSM dan kegiatan sosial sebanyak 136 KSM tersebar di 26 kelurahan. Pada tahun 2007, alokasi dana PNPM-P2KP sebesar Rp 9 milyar untuk 38 kelurahan dengan pagu dana setiap kelurahan antara Rp 150 juta sampai dengan Rp 450 juta. Dari dana tersebut Kecamatan Singkil mendapatkan pagu Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebesar Rp 1,7 milyar. Dana tersebut dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi bergulir, fisik dan sosial di 6 kelurahan yang merupakan lokasi lama dan tiga kelurahan adalah lokasi baru.

Data tersebut di atas memberikan gambaran bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kota Manado semakin mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Indikasinya ialah dana yang dikucurkan semakin besar dan kelompok sasaran dan penerima manfaat dari program tersebut semakin bertambah. Namun demikian, pelaksanaan program tersebut di lokasi sasaran masih menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan yang muncul antara lain rendahnya partisipasi masyarakat pada kegiatan-kegiatan fisik, pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan sasaran program masih kurang. Masyarakat masih memandang bantuan-bantuan pemerintah dari sudut pandang proyek semata, sehingga keuntungan saat inilah yang melekat dalam pikiran mereka bukan pada kesejahteraan di masa yang akan datang. Kesadaran masyarakat untuk mengembalikan pinjaman dana bergulir juga masih rendah.

Selain itu, pengendalian dan pengawasan yang kurang efektif serta transparansi yang masih kurang merupakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat Kecamatan Singkil Kota Manado tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberikan manfaat pada pengembangan keilmuan manajemen sumberdaya khususnya pada konsep persepsi masyarakat tentang pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan dan menjadi bahan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Manado dalam memahami persepsi masyarakat tentang program pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan dalam pengambilan pengambilan kebijakan.

KAJIAN PUSTAKA

Pada hakikatnya Persepsi merupakan proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, perasaan, maupun penciuman. Kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penaksiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi (Thoha, 2002). Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain termasuk yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal (Rakhmat Jalaludin 1998: 55). Persepsi meliputi juga kognisi (pengetahuan), yang mencakup penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan (Gibson, 1996 : 54).

Pada penelitian ini, persepsi masyarakat dikaitkan dengan pemahaman masyarakat akan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan (Suharto, 2005).

Pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan manusia yaitu manusia secara perorangan maupun manusia dalam kelompok yang rentan dan lemah.

Kartasasmita (1996: 144) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Dari pengertian di atas yang dikaitkan dengan pemberdayaan dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah tindakan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian yang dimulai dengan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat menjadi berkembang.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan secara umum yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan merupakan wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. (Kementerian Pekerjaan Umum : 2010).

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Pertimbangan digunakannya metode penelitian kualitatif dimaksudkan untuk menemukan dan memahami kenyataan yang terjadi berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan. Responden dalam penelitian ini adalah kelompok sasaran penerima manfaat Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Lembaga

Keswadayaan Masyarakat (LKM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di Kecamatan Singkil Kota Manado. Dari Sembilan kelurahan penerima BLM ditentukan secara sengaja tiga kelurahan, yaitu: Kelurahan Wawonasa, Kelurahan Ketang Baru dan Kelurahan Ternate Tanjung. Informan diambil secara insidental 5 orang setiap kelurahan dari unsur LKM yang terdiri dari pengurus dan anggota. Jumlah informan seluruhnya 15 orang. Data yang dikumpulkan melalui wawancara kepada dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) dengan tahapan yaitu Kategorisasi dan mereduksi data, data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, melakukan interpretasi pada data yang telah dikelompokkan berdasarkan hasil kategorisasi dan reduksi, melakukan pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun serta melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang didasarkan pada kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Singkil sebagai bagian dari wilayah Pemerintahan Kota Manado yang memiliki 9 kelurahan dengan 48 lingkungan dan di pimpin oleh seorang camat. Penduduk Kecamatan Singkil berjumlah 48.106 jiwa dengan 13.283 kepala keluarga, 2.360 keluarga miskin dan 7.674 jiwa dalam kategori miskin. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kecamatan Singkil Kota Manado telah dilakukan sejak tahun 2007.

Kegiatan yang dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) di Kecamatan Singkil Kota Manado antara lain yaitu bantuan langsung kepada masyarakat sebesar Rp 1,7 milyar yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan: ekonomi bergulir, infrastruktur dan sosial. Penentuan kelurahan penerima BLM di dasarkan pada kriteria pertahapan keluarga sejahtera dari BKKBN. Keluarga yang masuk kategori miskin apabila lebih dari 10% keluarga berada pada tahapan keluarga pra sejahtera dengan pendapatan lebih kecil atau sama dengan RP 850 ribu (dibawah upah minimum

propinsi). Di kecamatan Singkil ada 9 kelurahan masuk pada kategori tersebut termasuk kelurahan Wawonasa, Ketang Baru, dan kelurahan Ternate Tanjung.

Dari wawancara yang dilakukan diperoleh data dan informasi yaitu :

1. Pengetahuan, sikap dan perilaku dalam memahami tujuan, sasaran, kegiatan terhadap PNPM-MP oleh masyarakat dipahami sebagai Program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan (15 informan). Masyarakat memahami bahwa tujuan kegiatan PNPM-MP Meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin (10 informan) dengan kelompok sasaran adalah masyarakat miskin. Adapun kegiatan yang dilakukan pada bidang Infrastruktur, sosial, dan ekonomi (15 informan). Pemahaman akan kegiatan PNPM oleh masyarakat di Kecamatan Singkil diperoleh dari sosialisasi di kelurahan oleh Faskel dan konsultan. Sehingga dengan pemahaman ini masyarakat menyatakan mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilakukan.
2. Melalui kegiatan PNPM-MP, pemanfaatan & manfaat dana pinjaman bergulir oleh masyarakat sebagai tambahan modal usaha sehingga menjadikan pendapatan masyarakat meningkat/naik (15 informan), kebutuhan keluarga tercukupi terutama untuk makan dan pendidikan anak (15 informan). Akan tetapi belum dapat mencukupi biaya kesehatan (10 informan) serta pemebuan kebutuhan seperti beli alat elektronik belum cukup (10 informan). Dari dana yang diperoleh, masyarakat yang tidak pernah menunggak ada 4 informan dan pernah menunggak harian (11 informan). Dengan adanya bantuan melalui kegiatan PNPM-MP, masyarakat dalam pengelolaan usaha mampu bertahan (14 informan) sementara belum mampu mengembangkan sebanyak 15 informan.
3. Penilaian akan peran Lembaga Keswadayaan Masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam pelaksanaan PNPM :sangat berperan (7 informan), Cukup berperan (4 informan) dan Kurang berperan (4 informan). Pada pengelolalan kegiatan, masyarakat menilai transparansi 10 informan dan tidak transparan (5 informan)
4. Partisipasi yang ditunjukkan sebagai wujud dari terbentuknya persepsi masyarakat yaitu partisipasi langsung 15 informan, partisipasi tenaga 15

informan, partisipasi ide/gagasan 8 informan dan partisipasi pengawasan 9 informan.

Persepsi masyarakat tentang program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan penting artinya bagi keberhasilan program. Jika masyarakat memahami betul apa yang dimaksud dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), tujuan dan sasaran program tersebut dan siapa yang menjadi kelompok sasaran, maka masyarakat pasti mendukung dan mensukseskan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat secara keseluruhan telah mengetahui tentang PNPM-MP, Sosialisasi yang dilakukan oleh fasilitator dan konsultan di tingkat kelurahan sangat efektif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang PNPM-MP, tujuan, sasaran, dan kegiatan PNPM-MP. Implikasinya, masyarakat sangat mendukung pelaksanaan kegiatan PNPM-MP. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti kegiatan infrastruktur, sosial, dan ekonomi sangat membantu masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan.

Sikap masyarakat yang mendukung program bantuan pemerintah melalui PNPM-MP disebabkan oleh faktor intern dan faktor ekstern. Sejalan dengan yang dikemukakan Gerungan, (2002) bahwa pembentukan sikap senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia, dan berkenaan dengan obyek tertentu. Interaksi sosial di dalam kelompok maupun di luar kelompok dapat mengubah sikap atau membentuk sikap yang baru. Kondisi yang baik ini seharusnya menjadi kekuatan pengelola PNPM-MP di Kecamatan Singkil dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Faktor eksternal yang menyebabkan masyarakat bersikap positif terhadap pelaksanaan PNPM-MP adalah BLM untuk kegiatan infrastruktur, sosial, dan ekonomi yang menyentuh langsung kepentingan/kebutuhan masyarakat. Masyarakat menyadari bahwa program pemberdayaan adalah program dari mereka, oleh mereka dan untuk kesejahteraan hidup mereka sendiri. Faktor internal juga merupakan faktor yang sangat penting artinya sebagai obyek sikap. Faktor internal ialah faktor yang ada dalam diri individu itu sendiri yang dalam penelitian ini adalah kondisi masyarakat itu sendiri yang hidup dalam kemiskinan.

Suparlan (1984) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yang nampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka.

Salah satu program yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas perkembangan ekonomi masyarakat adalah dana bergulir. Kegiatan PNPM – MP diarahkan pada meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat pada penanggulangan kemiskinan. Dana bergulir adalah Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai dana pinjaman kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan harus dikembalikan kepada Unit Pengelola Keuangan (UPK) dengan harapan terjadinya peningkatan usaha yang berdampak pada bertambahnya penghasilan.

Peningkatan pendapatan usaha keluarga sebagai akibat dari bantuan dana pinjaman bergulir berdampak bagi peningkatan kesejahteraan keluarga miskin. Indikasinya kebutuhan pokok keluarga dapat dipenuhi, biaya pendidikan bagi anak-anak dapat diatasi, juga walaupun masih relatif kecil membantu biaya kesehatan bagi keluarga. Dari segi kemandirian usaha, keseluruhan informan yang berjumlah 15 orang masih pada tahap mempertahankan usaha, belum ada kemampuan untuk mengembangkan usaha. Pengembalian pinjaman, 11 informan pernah menunggak harian, hanya 4 tidak pernah menunggak. Informan yang menunggak harian terjadi bila pendapatan pada hari yang bersangkutan sangat rendah hanya cukup untuk biaya hidup keluarga. Namun demikian pinjaman tetap dilunasi pada hari-hari berikutnya saat pendapatan relatif tinggi karena banyaknya pembeli.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka terlihat bahwa dana pinjaman bergulir digunakan sesuai tujuan dan sasaran program. Bantuan dana pinjaman bergulir untuk usaha ekonomi produktif berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kemandirian usaha baru pada tahap mempertahankan, belum mampu untuk mengembangkan. Kesadaran untuk mengembalikan dana pinjaman bergulir cenderung meningkat. Oleh karena itu, keberhasilan penggunaan dana pinjaman bergulir perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk menuju ke kemandirian usaha. Sebab dengan dicapainya kemandirian usaha maka dengan sendirinya menjadikan masyarakat keluar dari zona kemiskinan menuju kepada kesejahteraan

yang diharapkan. Dengan terciptanya kemandirian pada masyarakat maka dengan sendirinya membentuk persepsi yang positif pada masyarakat tentang keberadaan PNPM-MP itu sendiri. Persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka (Robbins, 2003).

Pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh PNPM-MP tidak dapat dipisahkan dari peran Lembaga Keswadayaan Masyarakat. Apapun yang dilakukan oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat selalu dinilai oleh masyarakat. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan PNPM-MP di tingkat kelurahan. LKM adalah lembaga kepemimpinan kolektif yang prakarsa pembentukan dan pengelolaannya ditentukan oleh warga. Keberhasilan pada peningkatan keberdayaan masyarakat akan sangat ditentukan juga oleh peran Lembaga Keswadayaan Masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKM kurang efektif dalam melaksanakan tugas pendampingan kepada kelompok sasaran/penerima manfaat. Dari hasil wawancara terhadap 15 informan penerima manfaat, 7 informan mengatakan LKM sangat berperan dalam melaksanakan tugas, sementara 4 orang informan menyatakan cukup berperan, sedangkan 4 orang informan lainnya mengatakan kurang berperan. Transparansi dan akuntabel merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi LKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 orang informan mengatakan LKM transparan dalam pengelolaan dana BLM dan 5 mengatakan tidak transparan.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa Lembaga Keswadayaan Masyarakat dalam menjalankan tugas pengelolaan PNPM-MP di Kecamatan Singkil belum menunjukkan perannya secara maksimal sebagaimana tanggungjawab kerja pada pelaksanaan kegiatan PNPM-MP. Memperhatikan tugas dan fungsinya, nyata terlihat bahwa Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) merupakan dewan amanah atau pimpinan kolektif organisasi masyarakat setempat di kelurahan.

Salah satu prinsip dalam mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan PNPM adalah partisipasi. Masyarakat diharapkan terlibat secara aktif pada setiap

proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan secara keseluruhan berpartisipasi langsung pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Singkil. Partisipasi yang dilakukan masyarakat baik dalam bentuk ide/gagasan, tenaga, dan pengawasan, sedangkan partisipasi dalam bentuk materi tidak ditemukan. Dari ketiga bentuk partisipasi ini, bentuk partisipasi yang paling banyak dilakukan masyarakat ialah berupa tenaga, kemudian pengawasan, dan ide/gagasan.

Timbulnya partisipasi masyarakat tidak dapat dipisahkan dari persepsi yang terbantu pada masyarakat atas segala kegiatan yang dilakukan melalui PNPM-MP dan peran yang ditunjukkan oleh pelaksana kegiatan yang dalam hal ini Lembaga Keswadayaan Masyarakat. Persepsi sangatlah penting dalam mendukung proses kebijaksanaan, hal ini sebagaimana menurut Gibson, Ivancevich, Donnelly (1996 : 134 : disarikan) adalah : “proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologis”. Selanjutnya Mar’at (1984) mengemukakan bahwa : Persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu obyek psikologik dengan kacamata sendiri diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan obyek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Berdasarkan norma yang dimiliki pribadi seseorang akan terjadi keyakinan (*belief*) terhadap obyek tersebut.

Menurut Robbins (2003) ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu *perceiver*, target dan situasi. *Perciver* ciri orang yang bersangkutan. Jika seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya, ia dipengaruhi oleh karakteristik individu yang turut berpengaruh, seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapannya. Berkaitan dengan target, persepsi seseorang akan tergantung pada

sasaran yang dilihat oleh orang tersebut. Target dapat berupa orang, benda, atau peristiwa. Sifat sifat sasaran tersebut biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihat. Sementara itu persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi mana persepsi itu timbul perlu pula memperoleh perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan serta dalam pertumbuhan persepsi seseorang sehingga pada situasi yang demikian persepsi dapat berpengaruh langsung terhadap partisipasi masyarakat dalam menunjang segala kegiatan yang dilakukan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kecamatan Singkil Kota Manado.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat Kecamatan Singkil Kota Manado tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan telah mengalami perubahan dari orientasi proyek ke orientasi pencapaian tujuan program sebagaimana pada pemanfaatan dana begulir oleh penerima yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran program dan diikuti dengan kesadaran untuk mengembalikan dana pinjaman bergulir cenderung meningkat.

Akan tetapi perubahan persepsi masyarakat dari orientasi proyek ke orientasi pencapaian tujuan program tidak diikuti dengan peran Lembaga Keswadayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pendampingan pada pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan Singkil untuk menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin yang berakibat pada belum mampunya masyarakat mengembangkan usaha yang ada, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan, mengemukakan ide/gagasan cenderung meningkat dan partisipasi materi belum nyata terlihat.

Dari simpulan yang ada, maka penelitian ini menyarankan beberapa hal yaitu :

1. Diperlukannya sikap yang menunjukkan nilai-nilai hidup pada penyelenggara PNPM-MP yang tercermin di dalam suatu siklus merumuskan kebutuhan, merumuskan tujuan-tujuan, membuat alternatif perencanaan dan memutuskan

- pilihan perencanaan yang dianggap sesuai dan melaksanakan tindakan kegiatan PNPM-MP.
2. Untuk dapat meningkatkan persepsi masyarakat akan PNPM-MP maka LKM maupun Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat menyangkut tujuan dan sasaran kegiatan PNPM-MP
 3. Melakukan penguatan kapasitas pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat guna melaksanakan tugas pendampingan pada pelaksanaan PNPM-MP.
 4. Memfungsikan semua anggota Lembaga Keswadayaan Masyarakat pada melaksanakan tugas pendampingan pelaksanaan PNPM-MP.
 5. Melibatkan secara langsung masyarakat pada kegiatan penyusunan program.
 6. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk melakukan pengawasan atas setiap kegiatan dan penggunaan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan PNPM-MP

DAFTAR PUSTAKA

- Gerungan, W.A., 2002. *Psikologi Sosial*. Refika Aditama, Bandung.
- Gibson L. James, John M. Ivanvevich dan James H. Donnely Jr.1996. *Organisasi dan Manajemen : Perilaku, Struktur dan Proses*, ahli Bahasa Djoerban Wahid SH. Jakarta : Erlangga.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1996. *Pembangunan untuk rakyat, memadukan pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CDES.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2010. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Cipta Kaya.
- Mar'at. 1984. *Sikap Manusia, Perubahan serta Pengukurannya*. Ghalia. Bandung.
- Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Rohidi dan Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI-Press.
- Rakhmat, Jalaludin. 1998. *Metode Penelitian Komunikasi*. Jakarta : PT. Remaja Rosdakarya.
- Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi*. Penterjemah Diana Angelica. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Suparlan, P. 1984. *Kemiskinan di Perkotaan*. Gramedia. Jakarta.

Thoha, Miftah. 2002. *Perspektif Perilaku Birokrasi : Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara (Jilid II)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kajian Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Pelabuhan Amurang Kecamatan Amurang Barat Kabupaten minahasa Selatan

**Oleh
Selvy R Kalele²⁵**

Abstract

Development is basically a process of continuous and planned activities which is meant to change and improve the quality of socio – economic life towards a better and natural condition from time to time. If the development is incompatible with the socio – economic aspect in a certain region, it can then be said to be unsuccessful. The aims of this research are to describe and to analyze the socio-economic changes of the community around the harbour of Amurang, South Minahasa Regency. The method of research applies qualitative approach by collecting the data using in-depth interviews from twenty informants selected on the basis of certain considerations called sampling with purpose.

Keywords : Perubahan, Sosial Ekonomi, Masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan ini berarti harus mampu mencakup kapan, di mana dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Dengan kata lain, pembuat rencana pembangunan haruslah mampu untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan yang akan dilakukan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi daerah di era otonomi menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan iklim globalisasi. Setiap daerah dituntut untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan daerah secara terfokus melalui pengembangan ekonomi daerah yang langsung menyentuh kepada ekonomi rakyat. Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah

²⁵ Staf Pengajar Pada Politeknik Negeri Manado.

pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpelaku, dan antardaerah.

Pembangunan pada dasarnya merupakan proses aktivitas yang bersifat kontinyu dan terencana yang ditujukan untuk merubah dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik dan wajar dari waktu ke waktu. Keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya diukur dalam bidang ekonomi saja. Dalam proses pembangunan, kita menyadari bahwa dampak pembangunan selalu akan terjadi juga dalam bidang sosial ekonomi. Dengan kata lain, pembangunan yang akan dilakukan dapat dikatakan akan berhasil apabila pembangunan itu baik rencana maupun pelaksanaannya sesuai dengan aspek sosial ekonomi yang ada pada suatu daerah. Sebaliknya, apabila pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan aspek sosial ekonomi yang terdapat pada suatu daerah, maka dapat dikatakan bahwa pembangunan itu tidak akan berhasil.

Pelabuhan Amurang terletak di Kecamatan Amurang Barat yang secara strategis dijadikan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sebagai kawasan berbagai industri diantaranya pengembangan kawasan PLTU dan industri perkelapaan (Cargil). Dari observasi awal yang telah dilakukan, terdapat informasi bahwa walaupun pelabuhan Amurang belum rampung pembangunannya telah terjadi kegiatan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan datangnya kapal dagang dari Filipina untuk membeli hasil pertanian berupa kopra dan pembelian Holtikultura antar pulau. Selain kegiatan tersebut pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Minahasa Selatan yang letaknya bersebelahan dengan pelabuhan Amurang ternyata mempunyai nilai tambah terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat terutama para nelayan yang berada di Amurang dan sekitarnya.

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti sangat tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji dan mendeskripsikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berada di sekitar pelabuhan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini dilakukan karena pada umumnya setiap ada pembangunan cenderung akan adanya perubahan pada kehidupan sosial ekonomi

masyarakat yang berada di sekitar pelabuhan, termasuk pembangunan pelabuhan Amurang.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan terlebih dahulu dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2008). Moleong (2009) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Alasan menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang berada di sekitar pelabuhan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang bersifat deskriptif, yang menggambarkan fakta-fakta tentang masalah-masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diikuti dengan interpretasi secara rasional berbagai temuan di lapangan sekaligus menganalisis semua keadaan masyarakat di lokasi penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan peneliti, diperoleh fakta bahwa faktor Pelabuhan yang ada di Amurang barat sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Pengaruh tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupannya baik segi struktur masyarakat, sosial, administrasi, maupun segi sikap adat serta kepercayaan. Aspek perubahan sosial masyarakat, secara struktural dapat dilihat pada hubungan antar individu, pola hubungan, status dan peran dan kekuasaan. Hal ini dapat dilihat jelas pada pola hubungan yang dahulunya berada pada pola masyarakat pedesaan dimana masing masing individu saling membutuhkan berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat, namun sekarang

pola itu lambat laun berubah pada pola hubungan yang semakin kuat didasari oleh kepentingan tertentu, misalnya oleh karena adanya kepentingan ekonomis seperti dalam kegiatan mapalus. Dari segi kultural dapat dilihat pada Nilai atau norma sosial yang ada didalam masyarakat tersebut. Aspek ini sangat terasa pada nilai atau norma kehidupan yang sosial mulai berubah pada nilai atau norma yang cenderung individual. .Pelabuhan Amurang pada kenyataannya oleh kebijakan pemerintah Minahasa selatan sedang di kembangkan menjadi Pelabuhan Laut, Pelabuhan Ferri dan juga sebagai Pelabuhan Perikanan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa kehidupan sosial masyarakat dengan adanya Pelabuhan Amurang sudah mengalami perubahan. Hal ini terlihat dari salah satu indikator kehidupan sosial yakni interaksi sosial., Interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat disekitar Pelabuhan Amurang ini dengan adanya pelabuhan Amurang terjalin begitu baik. Ini terlihat dari berbagai kegiatan sosial yang dilakukan baik suka maupun duka, dimana warga yang ada saling tolong-menolong dan secara bersama-sama memberikan bantuan baik tenaga dengan cara membantu pembuatan bangsal dan memberikan bantuan lain baik dalam bentuk uang, bahan natura dan sebagainya. Aspek perubahan ini adalah menyangkut segi struktur dan kelembagaan sosial masyarakat tetapi juga sekaligus aspek budaya. Secara teoritis, maka teori modernisasi dalam pembangunan masyarakat sangat menekankan pada aspek manusia dan budaya sebagai elemen fundamental. Dari aspek ekonomi ada warga yang karena bertambahnya pekerjaan mereka, yaitu selain sebagai petani atau nelayan mereka juga bekerja sebagai buruh pelabuhan dan pedagang, sehingga mereka tidak mempunyai waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial seperti warga yang lain, walaupun demikian mereka mengganti tenaga mereka dalam bentuk uang. Selain itu kegiatan kerja bakti pun baik dalam rangka membangun tempat ibadah maupun jalan setapak terus dilakukan yaitu setiap hari minggu sore. Disini terlihat kerjasama yang baik antar sesama warga masyarakat.

Dalam perspektif modernisasi, pembangunan masyarakat lebih menekankan pada teori pertumbuhan ekonomi (economic growth). Pertumbuhan

ekonomi yang oleh Rostow merupakan kunci dari terjadinya perubahan sosial. Dengan adanya pelabuhan amurang, maka secara signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum di Minsel ataupun Sulut tetapi juga termasuk masyarakat sekitar Pelabuhan Amurang. Dari segi pertumbuhan ekonomi tersebut, dapat dilihat pada tingkat pertumbuhan pendapatan per Kapita (income per kapita) masyarakat sekitar Pelabuhan Amurang.

Dari segi pendidikan dengan adanya pelabuhan Amurang, masyarakat termotivasi dan memiliki keinginan untuk menyekolahkan anak-anaknya, menurut mereka meskipun orang tua hanya tamat SD tapi anak-anak mereka harus menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Hasil yang di peroleh terhadap informan dari penelitian ini saja telah menggambarkan bahwa tingkat pendidikan mereka cukup baik dimana tidak ada informan yang buta huruf bahkan ada yang sampai pada pendidikan Strata 1. Disisi lain juga jumlah sekolah dari anak usia sekolah pada masyarakat di sekitar Pelabuhan Amurang semakin meningkat untuk semua strata pendidikan. Karena dengan adanya pelabuhan ini, tingkat pendapatan mereka meningkat sehingga untuk mereka sangat optimis dalam hal menyekolahkan anak-anak karena mereka yakin bisa membiayainya.

Dalam hal pekerjaan mereka, dengan adanya Pelabuhan Amurang ini, mereka mendapatkan pekerjaan tambahan atau membuka lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat. Warga yang biasanya seharian hanya bekerja sebagai petani, namun setelah adanya pelabuhan ini, mereka pun menjadi buruh pelabuhan dimana ini menjadi hal yang sangat baik demi mencukupi kebutuhan keluarga. Didalam mereka melakukan pekerjaan tersebut, mereka menjalaninya dengan baik dan sangat menikmatinya. Bahkan masyarakat yang ada inipun tergabung dalam satu kelompok sosial yaitu Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dimana lewat adanya TKBM ini terjalin hubungan sosial yang baik antar warga yang ada. Selain itu juga untuk perempuan yang seharian hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga mereka mengambil kesempatan dan peluang yang ada dengan membuka kios atau warung di pinggir jalan untuk mengisi waktu mereka. Selain itu, dengan adanya pelabuhan tersebut terdapat beberapa jenis pekerjaan tambahan dari masyarakat sekitar yaitu menjadi pekerja baik administrasi maupun buruh

pada beberapa pabrik yang ada disekitar pelabuhan Amurang yang sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai tuntutan pekerjaannya. Hal lain juga yang mendorong kehidupan ekonomi masyarakat ialah bertumbuhnya sektor informal lainnya seperti warung makanan dan tempat Kost.

Kehidupan ekonomi masyarakat yang ada dapat terlihat dari beberapa indikator yang menjadi acuan wawancara kepada para informan menunjukkan adanya peningkatan apalagi dengan adanya Pelabuhan Amurang ini, warga sering melakukan rekreasi ke luar kota Amurang bersama keluarga dan juga ada yang melakukannya secara berkelompok. Hal inipun terlihat dari pendapatan yang ada, harta benda yang dimiliki, dan pola konsumsi keluarga. Menurut Sumardi (1986), pendapatan atau penghasilan adalah sejumlah uang yang diterima dari seseorang (atau lebih) anggota keluarga dari jerih payahnya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa pendapatan adalah segala penghasilan yang berupa uang yang biasanya dapat diterima sebagai balas jasa atau kontra prestasi. Sumber-sumber yang utama adalah gaji, upah atau jasa yang serupa dari majikan, pendapatan bersih dari usaha.

Dari penelitian yang telah dilakukan terlihat bahwa rata-rata tingkat pendapatan keluarga mengalami peningkatan dengan adanya pelabuhan Amurang ini. Dahulunya pendapatan mereka hanya bersumber dari hasil pertanian yang ada, namun sekarang mereka mendapatkan tambahan pekerjaan dengan menjadi buruh dan inipun mempengaruhi pendapatan keluarga. Selain itu mereka pun membuka kios di pinggir jalan atau di depan rumah sebagai penghasilan tambahan mereka.

Selain pendapatan mereka meningkat, perabotan Rumah Tangga yang ada pun bisa dikatakan sudah lengkap dengan berbagai barang elektronik yang ada. Bahkan rata-rata warga yang ada memiliki kendaraan bermotor baik motor, mobil bahkan ada yang memiliki kapal. Perubahan kehidupan ekonomi masyarakat yang ada ini bisa dilihat telah mengalami perubahan di tinjau dari berbagai indikator yang telah dijelaskan, dan hal inipun terjadi seiring dengan berjalannya waktu.

Dalam hal Kesehatan Masyarakat, sebelum adanya Pelabuhan Amurang kalau ada anggota keluarga yang mengalami sakit ada yang pergi ke Puskesmas, ada juga yang hanya membeli obat diwarung ada yang pergi ke orang tua yang dianggap bisa menyembuhkan dan ada juga yang hanya menggunakan ramuan tradisional. Dengan adanya Pelabuhan Amurang telah mampu merubah pola pikir masyarakat dalam hal Kesehatan dan ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan masyarakat kalau dulu mereka tidak mampu pergi ke Dokter, Puskesmas, RSUD. Dengan meningkatnya pendapatan pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan sudah bertambah karena informasi-informasi tentang kesehatan sudah banyak di ketahui masyarakat lewat media televisi dan radio. Dengan demikian pada saat ini ketika ada anggota keluarga mengalami sakit mereka pergi ke Puskesmas, Dokter, RSUD terdekat

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa pembangunan pelabuhan Amurang berpengaruh terhadap terjadinya perubahan sosial masyarakat sekitar lokasi pelabuhan. Perubahan sosial yang terjadi adalah perubahan secara struktural yaitu hubungan antar individu. Pola hubungan termasuk status, peran kekuasaan dan hubungan antar status. Perubahan secara kultural yaitu nilai dan norma sosial masyarakat. Pembangunan pelabuhan Amurang berpengaruh terhadap perubahan ekonomi masyarakat terutama pada penciptaan lapangan kerja yang baru dan peningkatan pendapatan.

Berdasarkan kesimpulan maka disarankan untuk pelabuhan akan menjadi penggerak utama pembangunan masyarakat Minahasa Selatan secara khusus dan Sulawesi Utara pada umumnya. Masyarakat sekitar pelabuhan Amurang agar tetap memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap dampak perubahansosial yang akan terjadi baik secara cepat atau lambat, sehingga perubahan sosial tersebut secara positif membantu memperkuat kehidupan sosial masyarakat. Pembangunan pelabuhan Amurang secara signifikan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar pelabuhan. Karena itu perlunya kesadaran masyarakat atas akses peran ekonomi masyarakatserta kesiapan sumberdaya masyarakat yang

bersaing dan kemampuan manajemen pendapatan keluarga, agar pertumbuhan ekonomi tersebut membawa manfaat positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A. 1995. Teori-Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Gramedia. Jakarta.
- Davis, K. 1990. Human Society. The Mac Millan Company. New York.
- Faqih, M. 2002. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Pustaka Pelajar dan INSIST. Yogyakarta.
- Kartasasmita, G. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. CIDES. Jakarta.
- Massile, R.S. 2008. Perubahan Sosial Dalam Masyarakat. UNSU. Medan.
- Moleong, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Soemardjan, S. 1962. Social Changes In Jogjakarta. Disertasi Ithaca, Cornell University Press, New York.
- Sugiyono, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Bandung.
- Sumardi, M. 1986. Kemiskinan Dan Bahan Pokok. CV. Rajawali. Jakarta.
- Tjokrowinoto, M. 1997. Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi. Penerbit Tiara Wacana. Yogyakarta.

Sikap Elit Politik Dalam Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Kota Manado

Oleh
Dr. Alfon Kimbal. S.Sos. M.Si

Abstract

Analyse of local political attitude elite to major election in Manado city depicting that positive attitude of Political Elite and also society and government to implementation of Pilkada in Manado City later. Some factor is assumed as impeller incidence of various problem at one particular area is : Collective Hardness and Mass Riot, Economics difference, political and social deprivasi, and primordialisme factor, like etnisitas and religion. There are seven strategic step in order to realizing implementation of Pilkada : Profesionalisme and Independency of KPUD, Role and Function of Parpol, Institute of Panwas, Role Of Self-Supporting Institute of Society (LSM), Reposition Role Of Government Officer Security, Role of Mass Media in Education of Politics, Sincerity and of siding Mass media. From three the finding hence can be concluded that 1)Positive attitude of Elite, Society and Government shall follow-up with existence of agreement between various side to realizing peaceful and peaceful Pilkada 2) the Various conflict that happened at area which will and have implementation of Pilkada have to anticipate early possible by approach among various side area and also always entangle society in every even and process of Pilkada as according to rule going into effect 3) Very expected by support and cooperation from various of side exist in area for the shake of its form of expectation with in the next Pilkada . Therefore suggested that by there is action of positive attitude of Local Elite to implementation of PILKADA Manado City.. In this case Elite becoming measuring rod in society have to really show of good Attitude in order to implementation of the next PILKADA because process of grab people conscience non by way of allowing all way for it.

Kata Kunci : Sikap, Elit Politik, Pemilihan Langsung

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (selanjutnya disebut PILKADA) merupakan bagian terpenting dari demokrasi di Indonesia disamping Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden. Dengan diselenggarakannya pesta demokrasi langsung tersebut dapat di pandang sebagai adanya kelenturan atau fleksibilitas pemerintah reformasi menjawab tuntutan masyarakat tentang perlunya suatu sistem pemerintahan yang memberi peran lebih besar kepada

masyarakat di Daerah, yaitu suatu sistem pemerintah yang tidak sentralistis. Demokrasi adalah kata yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan, karena membutuhkan kedewasaan berpolitik serta sarana dan prasarana yang terdukung mantap.

Berbagai konflik sebelum dan sesudah PILKADA bisa saja terjadi hanya karna disebabkan oleh hal mendasar, yaitu idiologi atau agama. Faktor idiologi biasanya amat krusial karena melibatkan keyakinan tertentu. Pluralitas dan keseimbangan jumlah penganut agama di daerah tertentu bisa menjelma menjadi petaka jika faktor non agama ikut bermain. Faktor primordial seperti agama memang sensitif sekaligus membelah soliditas masyarakat di suatu daerah. Dibutuhkan kearifan dan kecerdasan lokal agar pluralitas agama serta warna idiologi tidak menjadi petaka kemanusiaan. Masalah diatas merupakan imbas dari konflik pada tingkat Elite yang ternyata menyerempet berbagai warna idiologi pada suatu daerah.

Timbulnya berbagai masalah dan konflik sebelum dan sesudah pelaksanaan PILKADA tersebut maka selayaknya mengundang gugatan yang diarahkan kepada sang Elite. Yaitu, mesti ada yang salah dikalangan Elite, sehingga menimbulkan murka di kalangan massa. Konflik politis dapat berkembang menjadi konflik sosiologis, kelompok massa yang saling berhadapan membela Elitenya masing-masing. Massa pertama yang dimobilisasi umumnya dari kalangan yang kalah. Ada kemarahan dan kekecewaan yang dapat membakar massa. Suhu konflik meningkat jika diladeni oleh kelompok lawan. Dalam keadaan seperti itu maka eskalasi konflik susah untuk dikendalikan. Meski secara umum konflik terjadi masih terbatas gerakan yang dimotori oleh kandidat yang kalah. Sementara calon terpilih biasanya menyerahkan kepada peradilan yang berwenang untuk memutuskan.

Berdasarkan uraian diatas maka pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini untuk menganalisis sikap elite politik dalam pemilihan kepala daerah langsung di Kota Manado sebagai berikut :

- a. Bagaimana Sikap Elite Politik Lokal Kota Manado dalam Pemilihan langsung Kepala Daerah di Kota Manado ?

- b. Apa yang menyebabkan terjadinya berbagai konflik dan masalah sebelum dan sesudah pelaksanaan PILKADA di tiap Daerah pemilihan ?

Adapun tujuan penelitian ini antara lain : Untuk menemukan gambaran tentang Sikap Elite Politik Lokal Kota Manado dalam rangka pelaksanaan Pemilihan langsung Kepala Daerah di Kota Manado DAN Untuk menemukan penyebab terjadinya berbagai konflik dan masalah sebelum dan sesudah pelaksanaan PILKADA . melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori-teori Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam proses pelaksanaan pemerintahan di daerah dan sebagai pendidikan politik bagi masyarakat serta pemerintah dalam rangka mensukseskan amanat Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Serta melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa pengetahuan faktual bagi Pemerintah Kota Manado dalam proses pelaksanaan pemerintahan di daerah serta menformulasi setiap kebijakan, dalam hal ini kebijakan alternatif terbaik yang mungkin dapat diterapkan Pemerintah Kota Manado guna mensukseskan pelaksanaan PILKADA di Kota Manado sesuai dengan konsep Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

KAJIAN PUSTAKA

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 17 tahun 2005 yang didalamnya mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, diharapkan dapat mewujudkan praktek demokratisasi di daerah. Dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka sistem demokrasi perwakilan yang sebelumnya dilaksanakan dalam memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kini diganti dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi, dimana rakyat diberi kebebasan dalam memilih pasangan calon yang mereka kehendaki untuk menduduki jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerahnya masing-masing. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, sistem pemilihan Kepala Daerah yang digunakan yaitu sistem perwakilan. Pemilihan yang langsung melibatkan masyarakat sebagai

pemilih hanya pada pemilihan anggota legislatif saja, selanjutnya pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah akan dipilih dalam rapat paripurna oleh anggota legislatif. Terbentuknya sistem pemilihan Kepala Daerah secara langsung juga didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang tidak lagi memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2005 akan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Adapun mekanisme pencalonan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 diurutkan secara sistematis sesuai dengan tahapannya sebagai berikut:

- 1) Partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calonnya yaitu partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi perolehan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- 2) Dalam penetapan pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon yang dilakukan secara transparan sehingga bisa diakses oleh publik.
- 3) Dalam proses penetapan pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik maka masyarakat berhak untuk mengajukan pendapat dan tanggapan mengenai pasangan calon tersebut
- 4) Partai politik atau gabungan partai politik mengajukan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan secara berpasangan kepada KPUD untuk diteliti persyaratannya sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam suatu pelaksanaan demokrasi, tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk saling menghormati pendapat dan tanggapan masing-masing individu, tak terkecuali pada sistem pemerintahan yang kita laksanakan, dimana masing-masing individu memiliki hak untuk memberikan tanggapan dan pendapatnya dalam mengatur suatu kebijakan yang menyangkut kepentingan warga negara itu sendiri. Apabila dikaitkan dengan proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, masing-masing warga negara berhak untuk memilih dan berkewajiban untuk menghormati pendapat atau pilihan dari warga negara yang lain. Sesuai dengan pendapat Kuper dan Kuper (dalam Munandar et.al 2000 : 215) yang menjelaskan bahwa demokrasi hanya dimungkinkan jika masyarakat dapat mengakui kepentingan-kepentingan sebagian orang maupun masyarakat yang lain, dan mengorganisir diri untuk tindakan politis tertentu.

Di berbagai daerah hubungan Elite Lokal dengan masyarakat atau dengan parpol biasanya sangat dekat. Kedekatan itu bisa disebabkan oleh karisma tokoh tersebut atau mempunyai hubungan persaudaraan dan dari budaya yang sama. Kedekatan tersebut dapat digunakan sebagai pemicu bahkan pereda konflik yang ada, dalam hal ini peneliti menganggap bahwa terciptanya suatu pelaksanaan PILKADA yang diharapkan bersama berpulang kepada Elite yang ada di daerah karna dalam hal ini Elite-lah yang paling bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, alasan mengapa penulis menggunakan metode kualitatif karena penulis hanya bermaksud untuk menganalisis serta memperoleh gambaran tentang Sikap Elite Politik lokal Kota Manado terhadap Pelaksanaan Pemilihan langsung Kepala Daerah di Kota Manado dan langkah strategis apa yang ditempuh untuk menciptakan PILKADA yang aman dan damai di Kota Kupang serta Faktor apa saja yang menyebabkan konflik pada daerah yang akan dan telah melaksanakan PILKADA.

Untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data yaitu : (1). *Person*, sumber data berupa orang, (2) *Place*, sumber data berupa tempat, (3). *Paper*,

sumber data berupa symol. Dengan menjadikan elit politik yang ada di Kota Manado sebagai informan yaitu Pengurus Partai Politik, Pemerintah Kota, Anggota DPRD Kota Manado dengan teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (*wawancara*), dokumentasi, dan gabungan keduanya. Analisis data yang digunakan adalah berdasarkan langkah-langkah Reduksi Data, Display Data dan .Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam kaitannya dengan PILKADA maka Elite politik yang ada di daerah tersebut mempunyai peran yang sangat penting, dimana Elite yang ada di daerah tersebut dapat menjadi tolok ukur bagi keberhasilan pelaksanaan PILKADA. Elite juga merupakan tokoh yang harus diteladani, oleh sebab itu Elite politik harus menunjukkan sikap yang konsisten, baik itu pola pikir, pola sikap, maupun pola tindak. Sehingga tidak menjadi pemicu berbagai tindakan yang bersifat konflik terbuka yang memperlihatkan kepada publik secara telanjang, dan mengemukakan kepentingan kelompok tertentu.

Peran Elite dalam pelaksanaan PILKADA di Daerah bebar-benar sangat menonjol. Oleh sebab itu diperlukan suatu bentuk dan kejelasan sikap dari Elite yang ada di Daerah untuk terciptanya suatu penyelenggaraan PILKADA yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam kehidupan demokrasi, warga masyarakat adalah merupakan suatu kumpulan mayoritas politik yang memiliki hak dan kewajiban untuk menyampaikan aspirasi kepada negara. Masyarakat sebagai mayoritas politik menyalurkan aspirasi mereka melalui suatu wahana yang menampung aspirasi masyarakat, dimana dalam lingkup demokrasi disebut sebagai partai politik. Dalam konsepsi demokrasi, diketahui bahwa mayoritas politik tersebut merupakan pemegang kedaulatan. Jadi demokrasi bisa diselenggarakan jika mayoritas politik tersebut bersedia menyelenggarakannya menurut prosedur yang telah disepakati. Partai politik merupakan suatu lembaga yang tidak asing lagi bagi masyarakat, khususnya di Kota Manado. Masyarakat bisa memilih partai-partai politik yang

mengusung program-program atau kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

Masyarakat diluar anggota organisasi politik akan kesulitan untuk mencalonkan diri menjadi seorang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah walaupun memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk menjadi seorang pemimpin. Hal ini disebabkan karena orang tersebut harus bersaing dengan anggota partai yang lain yang ingin mencalonkan diri juga dalam konvensi yang dilakukan oleh partai politik. Sehingga dalam konvensi yang diselenggarakan oleh partai tersebut bisa menimbulkan adanya praktek politik uang atau upaya pembelian suara partai oleh para calon yang bersaing dalam konvensi.

Selama berlangsungnya PILKADA dikhawatirkan berbagai bentuk kekerasan kolektif yang berujung pada kerusuhan massal akan sering terjadi dengan intensitas dan frekuensi yang semakin tinggi. Sudah sejak lama berbagai bentuk kekerasan kolektif menjadi masalah nasional yang tidak kunjung dapat diantisipasi dan diselesaikan secara tuntas. Meskipun kejadiannya berawal di suatu daerah terpencil atau berskala lokal, namun pengaruhnya dapat sewaktu-waktu merembet ke daerah lain, yang lebih jauh dari lokasi kekerasan. Kekerasan massal itu tidak mesti muncul dan berawal di daerah perkotaan atau urban, tetapi juga di daerah-daerah lain yang relatif terpencil bahkan kawasan pedesaan. Secara umum bentuk-bentuk kekerasan kolektif itu terjadi dengan berbagai muatan sosial-politik, ekonomi dan etnisitas (primordialisme).

Dari kacamata teoritik, masing-masing disiplin ilmu memiliki cara dan pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan dan menguraikan maraknya fenomena kekerasan kolektif dan kerusuhan massal. Misalnya saja disiplin ilmu ekonomi biasanya mengajukan tesis kesenjangan kesejahteraan yang melahirkan kecemburuan sosial dan akhirnya kebencian kaum miskin terhadap kaum kaya, meskipun disiplin ilmu lainnya juga dapat menggunakan asumsi yang sama hanya saja titik tekan dalam alat analisisnya berbeda. Dalam perspektif yang sama, analisis kelas dan hubungan antar golongan yang tidak berimbang, dan eksploitatif sering digunakan oleh ahli ilmu politik, terutama dari madzhab kiri dan sosialis, meskipun hal sama juga dipakai golongan kanan (kapitalis), hanya saja dengan

asumsi teoritik yang berbeda. Sementara itu disiplin ilmu psikologi biasanya mengajukan tesis deprivasi (kekecewaan) relatif yang menetasakan perilaku tak terkontrol.

Secara umum ada banyak faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya konflik atau kekerasan kolektif. Faktor-faktor itu antara lain bersumber dari persoalan kesenjangan Ekonomi, deprivasi sosial dan politik, dan faktor primordialisme, seperti etnisitas dan agama. Masing-masing faktor itu secara sendiri-sendiri dapat melahirkan konflik dan kekerasan kolektif dalam skala yang luas dan massal. Namun diantara banyak kasus masing-masing faktor mempunyai keterkaitan atau pengaruh yang secara tumpang tindih (*cross cutting*). Demikian juga pemicunya, terkadang berdiri sendiri dan seolah-olah tidak ada hubungan langsung dengan persoalan dasarnya. Dalam beberapa kasus sering dijumpai persoalan yang awalnya sangat sederhana dan tergolong sepele seperti perkelahian antara dua pemuda berlainan agama atau etnis ataupun kebetulan berada pada dua kubu yang berbeda dalam PILKADA misalnya, kemudian memicu konflik yang lebih luas dan mendalam.

Untuk menghindari pertantangan yang terus-menerus dalam pemilihan kepala daerah, ada beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan sebagai bentuk perbaikan. Berikut adalah beberapa langkah yang mungkin dapat diambil oleh pemerintah Kota Manado dalam rangka pelaksanaan PILKADA yang akan datang. Pertama, mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah dengan pemilihan secara langsung. Kedua, memberikan ruang bagi eksperimen berdemokrasi yang benar dengan melibatkan masyarakat secara nyata melalui proses pemilihan langsung. Ketiga, dalam rangkain transisional, perlu pula dibuat semacam ruang hubungan politik yang jelas antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten atau Kota.

Selain tiga hal dasar diatas tentunya ada juga terdapat beberapa hal penting yang mungkin dapat ditanggapi oleh pemerintah antara lain Profesionalisme dan Independensi KPUD, Peran dan Fungsi Parpol, Pelembagaan Panwas, Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat, Reposisi Peranan Aparat Keamanan, Peranan Media Massa dalam Pendidikan Politik dan Kejujuran dan Pemihakan Pers.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisis Sikap Elite Politik Lokal terhadap Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung di Kota Manado, maka sesuai dengan masalah penelitian yang diangkat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan adanya keleluasaan yang dimiliki oleh partai politik dalam menentukan sendiri pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka bisa berimplikasi pada tidak efektifnya proses pencalonan yang dilaksanakan dengan mekanisme verifikasi atau konvensi yang dilakukan partai.
2. Penyebab terjadinya berbagai konflik PILKADA dimana : Kebanyakan terjadinya konflik dan masalah selama PILKADA disebabkan oleh ada sebagian Elite yang tidak berjiwa besar dan tidak menerima apapun hasil yang didapat, sehingga memanfaatkan massa untuk mencari keadilan.

Berdasarkan kesimpulan secara umum pada poin pertama diatas maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Proses pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, juga hendaknya memperhatikan kapabilitas, akseptabilitas, dan kompatibilitas yang dimiliki oleh masing-masing calon. Hal ini bisa dilihat dari *track record* masing-masing calon dan pengalaman masing-masing calon sebagai seorang pemimpin.
2. Diperlukan adanya pendidikan politik warga untuk mengimbangi kehidupan demokrasi yang terus berkembang di kalangan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers Jakarta

Alwi, Aidit, AKSP Zainal, 1989, *Elite Dan Modernisasi*, Liberty, Yogyakarta.

Azed, Bari, Abdul dan Amir, Makmur, 2005, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, FH, UI, Jakarta

Bogdan, R and Taylor S,J 1975 *intruction To Qualitative Research Methods*, Jhon Wiley, New York

- Mahendra A.A, Oka, 2005 *PILKADA ditengah konflik horisontal*, Gramedia, Jakarta
- Mar'at, 1981, *Pengukuran Sikap Manusia, Perubahan Serta Pengukurannya*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Mashad, Dororudin, 2005, *Konflik Antar Elite Politik Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Pustaka Pelajar, Jakarta
- Muller J, Daniel, 1992, *Mengukur Sikap Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sarundajang, S.H, 2005, *PILKADA Langsung, Problema dan Prospek*, Kata Hasta Pustaka, Jakarta
- Wahab, Solichin, 1997, *Analisis kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijakan negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Wasistiono, Sadu, dan Riyani Ondo, 2003 *Etika Hubungan Legislatif Eksekutif*, Fokusmedia, Bandung
- Winardi, J, 1992, *Harga dan Penetapan Harga Dalam Bidang Pemasaran (Marketing)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung